PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 80 TAHUN 2019
TENTANG
PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI DI KAWASAN GRESIK – BANGKALAN – MOJOKERTO – SURABAYA – SIDOARJO – LAMONGAN, KAWASAN BROMO – TENGGER – SEMERU, SERTA KAWASAN SELINGKAR WILIS DAN LINTAS SELATAN

RENCANA INDUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI KAWASAN GRESIK – BANGKALAN – MOJOKERTO – SURABAYA – SIDOARJO – LAMONGAN, KAWASAN BROMO – TENGGER – SEMERU, SERTA KAWASAN SELINGKAR WILIS DAN LINTAS SELATAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR ISI

Daftar Isi i

I PENDAHULUAN I.1

I.1 Percepatan Pembangunan Ekonomi Jawa Timur I.1

I.2 Posisi Geostrategis Jawa Timur dalam Konteks Regional dan Global I.2

I.3 Potensi dan Tantangan Provinsi Jawa Timur I.3

I.3.1 Potensi Provinsi Jawa Timur I.3

I.3.2 Tantangan Provinsi Jawa Timur I.4

I.4 Percepatan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur merupakan Bagian Integral Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah I.5

I.5 Pilar Utama Pembangunan dalam Rangka Percepatan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur I.6

II PRINSIP DASAR DAN PRASYARAT KEBERHASILAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI DI PROVINSI JAWA TIMUR II.1

II.1 Prinsip Dasar dan Prasyarat Keberhasilan Percepatan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur..... II.1

II.1.1 Prinsip Dasar dan Prasyarat Keberhasilan Pembangunan Provinsi Jawa Timur..... II.1

II.1.2 Peran Pemerintah dan Dunia Usaha..... II.1

II.1.3 Penguatan Konektivitas Antarwilayah..... II.2

II.1.4 Optimalisasi Pusat Kegiatan Ekonomi II.2

II.1.5 Pembangunan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru II.3

II.1.6 Pemanfaatan Potensi Kemaritiman II.3

II.1.7 Ketahanan Pangan, Air dan Energi II.3

II.1.8 Prinsip Keberlanjutan dan Mitigasi Kebencanaan dalam Pelaksanaan Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Provinsi Jawa Timur II.4

II.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur II.5

II.2.1 Arah Pengembangan Wilayah Provinsi Jawa Timur.. II.5

II.2.2 Pengembangan Kawasan Prioritas dan Pendukung di Provinsi Jawa Timur II.9

II.2.3 Kerangka Stategis dan Kebijakan Penguatan Konektivitas II.10

II.2.4 Penguatan Konektivitas (Intra Kawasan, Antar Kawasan dan Konektivitas International) II.11

II.2.5 Pemerataan Antarwilayah dan Penanggulangan Kemiskinan II.13

II.2.6 Penguatan Kemampuan SDM dan IPTEK II.15

III POSTUR GEOGRAFI WILAYAH, EKONOMI DAN KONEKTIVITAS JAWA TIMUR III.1

III.1 Kondisi Geografi Wilayah Provinsi Jawa Timur III.1

III.2 Postur Ekonomi Provinsi Jawa Timur III.4

III.2.1 Kontribusi Provinsi Jawa Timur terhadap Perekonomian Nasional III.4

III.2.2 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur III.5

III.2.3 Sektor/Kegiatan Ekonomi Prioritas III.7

III.2.4 Kawasan Sentra Produksi dan Komoditas Unggulan III.9

III.2.5 Kawasan Industri dan Kawasan Peruntukan Industri III.14

III.2.6 Aliran Komoditas Barang dan Tata Niaga Komoditas Unggulan III.15

III.2.7 Aliran Komoditas Barang Produk Industri Pengolahan III.16

III.2.8 Kegiatan Ekonomi Lainnya III.17

III.3 Kondisi Infrastruktur, Konektivitas dan Sistem Logistik di Provinsi Jawa Timur III.19

IV KAWASAN PRIORITAS DAN KAWASAN PENDUKUNG DALAM KONTEKS PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI DI PROVINSI JAWA TIMUR IV.1

IV.1 Kawasan Prioritas dan Kawasan Pendukung di Provinsi Jawa Timur IV.1

IV.2 Kawasan Prioritas Gerbangkertosusila dan Kawasan Pendukung Madura dan Kepulauan IV.2

IV.2.1 Kawasan Prioritas Gerbangkertosusila IV.2

IV.2.2 Kawasan Pendukung Madura dan Kepulauan IV.14

IV.3 Kawasan Prioritas Bromo-Tengger-Semeru dan Kawasan Pendukung Selingkar Ijen IV.30

IV.3.1 Kawasan Prioritas Bromo Tengger Semeru IV.30

IV.3.2 Kawasan Pendukung Selingkar Ijen IV.41

IV.4 Kawasan Prioritas Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan IV.55

IV.4.1 Gambaran Umum Kawasan Prioritas Selingkar Wilis dan Lintas Selatan IV.55

IV.4.2 Tema Pembangunan Kawasan Prioritas IV.63

IV.4.3 Strategi Percepatan Pembangunan Kawasan Prioritas IV.63

IV.4.4 Kebijakan, Program/Kegiatan yang Dibutuhkan dalam Rangka Percepatan Kawasan Prioritas Selingkar Wilis dan Lintas Selatan IV.64

V PELAKSANAAN DAN TATA KELOLA RENCANA INDUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI DI KAWASAN GERBANGKERTOSUSILA, KAWASAN BROMO – TENGGER – SEMERU, SERTA KAWASAN KAWASAN SELINGKAR WILIS DAN LINTAS SELATAN V.1

V.1 Tahapan Pelaksanaan V.1

V.2 Sumber Pembiayaan V.3

V.3 Kemudahan dalam Perizinan dan Fasilitas Insentif V.5

V.4 Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi V.6

VI KEBUTUHAN PROGRAM/PROYEK PRIORITAS DALAM RANGKA PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI DI KAWASAN GERBANGKERTOSUSILA, KAWASAN BROMO TENGGER SEMERU, SERTA KAWASAN KAWASAN SELINGKAR WILIS DAN LINTAS SELATAN VI.1

VI.1 Kawasan Prioritas Gerbangkertosusila VI.3

VI.2 Kawasan Madura dan Kepulauan sebagai Pendukung Kawasan Gerbangkertosusila VI.10

VI.3 Kawasan Kawasan Prioritas Bromo-Tengger-Semeru VI.13

VI.4 Kawasan Selingkar Ijen sebagai Pendukung Kawasan Bromo-Tengger-Semeru VI.18

VI.5 Kawasan Prioritas Selingkar Wilis dan Lintas Selatan VI.20

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Percepatan Pembangunan Ekonomi Provinsi Jawa Timur

Hakikat pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan, dan pedoman pembangunan nasional. Lebih lanjut, dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif wilayah serta didukung oleh sumber daya yang berkualitas. Pembangunan ekonomi nasional pada prinsipnya tidak terlepas dari pemerataan pembangunan di seluruh daerah. Pembangunan daerah perlu senantiasa ditingkatkan agar laju pertumbuhan antar daerah serta laju pertumbuhan antar wilayah perkotaan dan perdesaan semakin seimbang dan serasi sehingga pelaksanaan pembangunan nasional serta hasilnya semakin merata di seluruh Indonesia. Percepatan pembangunan daerah berpotensi memberikan kontribusi yang signifikan pada akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia secara umum dapat dikatakan baik walaupun saat ini mengalami perlambatan. Perlambatan ini dipengaruhi oleh berlanjutnya penurunan kinerja sektor eksternal ditandai dengan penurunan ekonomi global. Dari sisi produksi, pertumbuhan didorong oleh hampir semua lapangan usaha. Sementara dari sisi permintaan domestik, khususnya konsumsi rumah tangga mengalami peningkatan, didorong oleh tingkat keyakinan konsumen dan penyaluran bantuan sosial/pemberian subsidi. Adapun di Provinsi Jawa Timur, pertumbuhan ekonominya meningkat dengan tingkat yang lebih tinggi diatas tren pertumbuhan ekonomi nasional.

Keberhasilan Provinsi Jawa Timur dalam perekonomian tidak terlepas dari kinerja industri pengolahan yang baik, yang menjadi penyumbang terbesar terhadap sektor industri pengolahan secara nasional, serta didukung oleh pengembangan sektor pariwisata unggulan. Dapat dikatakan bahwa provinsi yang berbasis pada sektor industri merupakan salah satu prasyarat peningkatan ekonomi daerah. Namun pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa Timur pada masa yang akan datang tidaklah mudah untuk dihadapi, karena dinamika ekonomi nasional dan global menuntut untuk selalu siap terhadap perubahan guna mewujudkan provinsi yang maju dengan hasil pembangunan yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Disatu sisi, percepatan pembangunan tersebut dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Namun disisi lain, kaidah pembangunan yang berkelanjutan harus tetap menjadi perhatian. Dalam konteks percepatan pembangunan Provinsi Jawa Timur diperlukan penyusunan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Ekonomi (RIPPE) Kawasan Gresik - Bangkalan- Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo - Lamongan (Gerbangkertosusila), Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan dengan tetap memperhatikan kaidah pembangunan berkelanjutan.

Percepatan dan pemerataan pembangunan ekonomi tersebut diharapkan dapat mewujudkan kualitas pembangunan yang berkelanjutan dengan meningkatnya kualitas hidup seluruh masyarakat di Provinsi Jawa Timur dan nasional.

I.2 Posisi Geostrategis Provinsi Jawa Timur Dalam Konteks Regional dan Global

Secara geografis, wilayah Jawa Timur terletak pada jantung penghubung (*Centre of Gravity*) antara kawasan barat dan timur Indonesia. Pergerakan barang dan jasa dari wilayah Sumatera dan Jawa menuju timur Indonesia maupun ke luar negeri, khususnya ASEAN dan Eropa, menjadikan Provinsi Jawa Timur sebagai pusat logistik nasional maupun internasional. Secara ekonomi, Provinsi Jawa Timur merupakan penyumbang APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) terbesar kedua setelah Provinsi DKI Jakarta. Provinsi Jawa Timur merupakan sebuah provinsi yang memiliki keunggulan dan potensi besar. Provinsi ini terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) kabupaten dan 9 (sembilan) kota yang tersebar di wilayah pegunungan, pesisir, dan kepulauan. Populasinya hampir mencapai satu per enam dari populasi Indonesia dan lebih dari seperempat populasi Pulau Jawa, dengan hampir setengah penduduknya tinggal di wilayah perkotaan. Besarnya kegiatan ekonomi yang juga disebabkan oleh tingginya arus barang dan perdagangan di Provinsi Jawa Timur menjadikannya memiliki peran penting dalam memberikan kontribusi perekonomian secara nasional.

Gambar 1. 1 Peta Geostrategis Provinsi Jawa Timur

Sumber: Sekretariat Kebijakan Satu Peta, 2019

I.3 Potensi dan Tantangan Provinsi Jawa Timur

I.3.1. Potensi Provinsi Jawa Timur

I.3.1.1. Pengembangan Ekonomi Berbasis Industri

Provinsi Jawa Timur memiliki potensi yang besar sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, terutama pertumbuhan sektor industri pengolahan. Pertumbuhan perekonomian di Provinsi Jawa Timur sebagian besar berpusat di Wilayah Pantura dan/atau wilayah dengan radius 100 km dari Surabaya. Beberapa wilayah di luar Gerbangkertosusila memiliki potensi inheren untuk pengembangan kawasan industri, terutama wilayah yang memiliki aksesibilitas laut dan udara. Industri yang memiliki dampak penting meliputi pabrik semen, farmasi, industri makanan dan minuman, serta petrokimia, dengan pengembangan terpusat di sekitar Wilayah Surabaya, Gresik, Mojokerto, Pasuruan, Tuban, dan Lamongan.

I.3.1.2. Sumber Daya Alam

Provinsi Jawa Timur memiliki potensi sumber daya alam yang bervariasi, seperti pertanian, kelautan, perikanan, peternakan, dan perkebunan. Pada sub-sektor pertanian, Provinsi Jawa Timur merupakan lumbung pangan dengan daya dukung yang besar terhadap ketersediaan pangan nasional. Komoditas utama meliputi padi, jagung, kedelai, dan ubi kayu. Pada sub-sektor perikanan, komoditas yang menjadi unggulan ialah perikanan budidaya dan tangkap seperti bandeng, rumput laut, tuna, dan kerapu. Pada sub-sektor peternakan, aktivitas ekonomi didominasi oleh komoditas sapi, kambing, dan unggas. Pada sub-sektor perkebunan, aktivitas ekonomi mencakup perkebunan tanaman tahunan maupun perkebunan tanaman semusim. Komoditas perkebunan utama di Provinsi Jawa Timur, terutama tebu, tembakau, kopi, dan kakao. Provinsi Jawa Timur juga berpotensi untuk pengembangan buah-buahan dan memberikan kontribusi nasional sebesar 20% (dua puluh per seratus). Jenis buah-buahan yang mempunyai nilai ekonomi tinggi yaitu mangga (Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Pacitan), pisang (Kabupaten Lumajang, Kabupaten Magetan, dan Kabupaten Banyuwangi), dan jeruk (Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Madiun, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Magetan, dan Kabupaten Jombang).

Selain itu, salah satu potensi sumber daya alam yang dimiliki adalah sub sektor migas dan pertambangan. Provinsi Jawa Timur telah memproduksi minyak dari akhir abad 18 terutama di daerah Cepu, Bojonegoro, kemudian terus berkembang di lepas pantai timur dan lepas pantai utara Provinsi Jawa Timur. Untuk sektor pertambangan mineral, memiliki sekitar 20 jenis bahan galian yang mendukung sektor industri maupun konstruksi, yaitu potensi batu lempung dan batu gamping di utara, potensi batu pecah, krikil, pasir di lajur Gunung Api Tengah, serta potensi mineral logam, marmer, onyx, batu gamping, dan fosfat di sepanjang pegunungan selatan. Dengan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, tentu akan berdampak terhadap kinerja pembangunan dan perekonomian di Provinsi Jawa Timur.

I.3.1.3. Ketersediaan Infrastruktur

Provinsi Jawa Timur telah didukung oleh keberadaan infrastruktur, antara lain jalan nasional (jalan tol dan jalan non tol), jalur kereta api, bandara, dan pelabuhan yang mampu mendukung pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pada tahun 2018 total panjang jalan nasional di Jawa Timur sebesar 2.361 km (belum termasuk jalan tol). Provinsi Jawa Timur dilalui oleh beberapa jaringan jalan nasional dan jalan strategis nasional. Selain itu, sedang dilakukan pembangunan jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan (Pansela) yang menghubungkan kabupaten/kota dari Kabupaten Pacitan hingga Kabupaten Banyuwangi.

Dalam Perpres Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, terdapat 25 (dua puluh lima) proyek PSN di Jawa Timur dengan total investasi sebesar Rp. 460,9 Triliun, terdiri atas 8 (delapan) proyek pembangunan jalan tol, 1 (satu) proyek pembangunan jalan layang (*fly over*) Teluk Lamong, 2 (dua) proyek kereta api, 1 (satu) proyek bandara, 6 (enam) proyek bendungan, serta pembangunan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum), kilang minyak, kawasan industri, dan pembangkit listrik. Selain itu, saat ini juga sedang disusun rencana pembangunan kereta cepat Jakarta-Surabaya, serta pengembangan Pelabuhan Paciran yang diharapkan dapat semakin meningkatkan aksesibilitas transportasi dari dan menuju Provinsi Jawa Timur. Namun demikian, konektivitas pada beberapa daerah sentra produksi dan kawasan industri belum optimal sehingga perlu didukung dengan penyediaan infrastruktur yang memadai.

I.3.2. Tantangan Provinsi Jawa Timur

1.3.2.1. Disparitas Spasial Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur yang cukup tinggi belum terjadi secara merata di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Secara spasial, dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi berpusat di daerah sekitar Surabaya, Mojokerto, Pasuruan, Gresik, Batu, dan Malang, serta Bojonegoro. Kabupaten Bojonegoro merupakan kabupaten yang memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi di Provinsi Jawa Timur pada periode Triwulan I-2019.

Daerah dengan pertumbuhan ekonomi rendah tersebar di Pacitan, Kediri, Probolinggo, Bangkalan, Sampang, dan Sumenep. Adapun daerah dengan pertumbuhan ekonomi terendah di Provinsi Jawa Timur pada periode Triwulan I-2019 adalah Kabupaten Sumenep. Disparitas pertumbuhan ekonomi ini berdampak pula pada tingginya tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Ketimpangan pendapatan tidak hanya terjadi antar kawasan namun juga dalam satu kawasan yang sama. Hal ini terindikasi dari tingginya tingkat kemiskinan pada wilayah-wilayah yang pertumbuhan ekonominya relatif tinggi. Wilayah-wilayah tersebut terpusat pada wilayah Pantura. Sehingga dibutuhkan upaya pembangunan Provinsi Jawa Timur yang memperhatikan aspek

inklusivitas dan keberlanjutan, guna mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur.

1.3.2.2. Biaya Logistik

Tingginya biaya logistik dari Provinsi Jawa Timur ke berbagai destinasi menjadikan aktivitas perekonomian Provinsi Jawa Timur menjadi kurang kompetitif. Untuk jalur laut, salah satu penyebab tingginya biaya logistik adalah lamanya *dwelling time* di pelabuhan Tanjung Perak. Sebagai perbandingan, *dwelling time* pelabuhan Tanjung Priok yang lebih cepat. Kedepannya, diperlukan strategi dan upaya yang kuat dalam perbaikan tata kelola kepelabuhanan di Provinsi Jawa Timur, sehingga *dwelling time* dapat dipersingkat untuk menarik lebih banyak peluang berusaha. Selain itu, kapal-kapal barang/penumpang yang melalui alur pantai barat Surabaya harus membayar *fee* pemakaian alur laut kepada PT. Pelindo III. Selain biaya logistik jalur laut, biaya logistik jalur darat dan udara di Provinsi Jawa Timur pun perlu diperhatikan dalam upaya optimasi konektivitas infrastruktur di masa depan. Dibutuhkan mekanisme pengendalian biaya logistik yang handal, agar biaya logistik jalur darat dan udara dapat dikurangi untuk menarik lebih banyak investor, serta mengoptimasi kegiatan usaha di Provinsi Jawa Timur. Percepatan pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa Timur perlu dilakukan melalui pendekatan pembangunan wilayah yang komprehensif dan integratif, agar seluruh infrastruktur yang telah dibangun dapat memberikan dampak yang optimal terhadap aktivitas perekonomian di Provinsi Jawa Timur, serta dapat mendukung pemerataan ekonomi di seluruh wilayah.

I.4 Percepatan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur merupakan Bagian Integral Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah

Percepatan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur yang tertuang dalam Rencana Induk Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya – Sidoarjo – Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger – Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan lintas selatan merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Rencana Induk tersebut bukan dimaksudkan untuk mengganti dokumen perencanaan pembangunan yang telah ada seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031, namun menjadi dokumen yang terintegrasi dan komplementer serta khusus melakukan percepatan pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa Timur. Dalam RPJMN 2020-2024 yang merupakan amanat dari RPJPN 2005-2025, pada konteks upaya optimasi konektivitas infrastruktur dan pemerataan ekonomi, arah pembangunan nasional telah berorientasi pada penciptaan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan berdaya saing; pembangunan berbasiskan kewilayahan guna mengurangi kesenjangan; peningkatan kualitas dan daya saing SDM yang cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter; serta penguatan infrastruktur yang berdasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah.

Sementara itu, dalam Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024, Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan penegasan khusus pada inklusivitas pembangunan yang berpusat pada rakyat, yang secara implisit mengandung makna pembangunan yang berkeadilan dan merata. Strategi umum pembangunan Provinsi Jawa Timur 2019-2024 juga secara lebih tegas menyatakan keberpihakannya kepada rakyat miskin melalui strategis pertumbuhan ekonomi yang berorientasi pada pengentasan kemiskinan. Berlandaskan strategi pembangunan ekonomi yang inklusif tersebut, maka Pemerintah Provinsi Jawa Timur salah satunya berupaya untuk meningkatkan aktivitas ekonomi dan kelembagaan ekonomi UMKM (Usaha Masyarakat Kecil dan Menengah) dan koperasi, meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan ketahanan pangan, serta percepatan kinerja sektor industri agro maupun non-agro. Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga berupaya meningkatkan kontribusi sektor pariwisata melalui pengembangan industri pariwisata yang berdaya saing dengan tetap melestarikan budaya lokal. Dukungan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi juga tertuang dalam RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031, dimana arah pengembangan ekonomi diarahkan untuk meningkatkan daya saing wilayah yang tinggi dan berkelanjutan melalui pengembangan sistem agropolitan, minapolitan dan sistem metropolitan. Kebijakan pengembangan wilayah Provinsi Jawa Timur melalui pemantapan sistem perkotaan PKN sebagai kawasan metropolitan dan peningkatan keterkaitan dengan sentra-sentra produksi utama di Provinsi Jawa Timur dengan pusat pengolahan dan pemasaran sebagi inti pengembangan sistem agropolitan dan minapolitan. Berdasarkan hal tersebut, maka Rencana Induk Percepatan Pembangunan Ekonomi (RIPPE) Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya – Sidoarjo – Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger – Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan telah sejalan dengan arah pembangunan nasional, arah kebijakan umum dalam RPJMD 2019-2024, dan RTRW 2011-2031 khususnya terkait peningkatan konektivitas dan system transportasi antar wilayah dan pemerataan kesejahteraan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Mengingat dinamika kewilayahan yang mempengaruhi perubahan arah pengembangan wilayah dalam perencanaan tata ruang dan perencanaan pembangunan wilayah, maka akan dilakukan penyesuaian rencana tata ruang wilayah dengan RIPPE Jawa Timur.

I.5 Pilar Utama Pembangunan dalam Rangka Percepatan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur

Dalam rangka percepatan pembangunan di Provinsi Jawa Timur, maka dibutuhkan landasan pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan yang berkelanjutan tersebut secara umum memuat 3 pilar utama pembangunan, yaitu pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial, dan pelestarian lingkungan hidup. Pertumbuhan ekonomi menjadi tolok ukur kemajuan ekonomi di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi diukur dari pertumbuhan konsumsi, investasi, dan neraca perdagangan suatu wilayah. Semakin tinggi konsumsi, investasi, dan neraca perdagangan maka semakin baik tingkat pertumbuhan ekonominya. Lebih lanjut, dukungan investasi menjadi hal yang penting untuk mempercepat pembangunan suatu wilayah. Untuk itu, maka diperlukan peningkatan efisiensi dan kemudahan proses perizinan serta peningkatan investasi yang inklusif terutama dari investor domestik maupun asing.

Akan tetapi, pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus diimbangi oleh pembangunan ekonomi yang merata di seluruh wilayah. Keterbatasan anggaran pembangunan di suatu wilayah membutuhkan strategi dalam pembangunannya. Untuk itu, diperlukan pembangunan di pusat-pusat kegiatan ekonomi utama dan penguatan konektivitas antar wilayah pengembangan yang diharapkan dapat menghela pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut dan wilayah pendukungnya.

Pada era ekonomi berbasis pengetahuan, peran sumber daya manusia yang berpendidikan menjadi kunci utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sumberdaya manusia yang berpendidikan diharapkan mampu berinovasi dengan basis ilmu pengetahuan dan riset teknologi untuk pengembangan ekonomi agar dapat bersaing secara global. Aktivitas ekonomi yang dapat meningkatkan pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial tidak akan berarti banyak bagi pembangunan berkelanjutan jika berdampak pada kerusakan lingkungan. Oleh sebab itu, pelestarian lingkungan hidup tetap menjadi landasan pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa Timur.

BAB II

PRINSIP DASAR DAN PRASYARAT KEBERHASILAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI DI PROVINSI JAWA TIMUR

II.1 Prinsip Dasar dan Prasyarat Keberhasilan Percepatan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur

II.1.1. Prinsip Dasar dan Prasyarat Keberhasilan Pembangunan Provinsi Jawa Timur

Dalam melakukan percepatan pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa Timur dibutuhkan perubahan dalam cara pandang dan perilaku seluruh komponen di Provinsi Jawa Timur, dengan pemenuhan prinsip dasar perubahan sebagai berikut:

a. Perubahan harus terjadi untuk seluruh komponen masyarakat;

b. Perubahan pola pikir (*mindset*) dimulai dari Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dengan birokrasinya;

c. Perubahan membutuhkan semangat kerja keras dan keinginan untuk membangun kerjasama dalam kompetisi yang sehat;

d. Pemanfaatan dan penguatan modal sosial dalam masyarakat melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk meningkatkan kohesifitas;

e. Produktivitas, inovasi, dan kreativitas didorong oleh Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) menjadi salah satu pilar perubahan;

f. Peningkatan jiwa kewirausahaan;

g. Peningkatan peran dunia usaha dalam pembangunan ekonomi; dan

h. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan, termasuk penurunan emisi gas rumah kaca.

II.1.2. Peran Pemerintah dan Dunia Usaha

Dunia usaha mempunyai peran utama dan penting dalam pembangunan ekonomi, terutama dalam peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja, sementara Pemerintah bertanggung jawab menciptakan kondisi ekonomi makro yang kondusif dan tersedianya infrastruktur ekonomi yang menunjang untuk mendukung percepatan dan perluasan investasi. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan harus didukung oleh komitmen dunia usaha maupun Pemerintah, berupa:

a. Dunia usaha meningkatkan investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja;

b. Dunia usaha melakukan inovasi untuk mengembangkan teknologi dan metode produksi dalam rangka memenangkan persaingan global;

c. Pemerintah memberikan kesempatan yang sama dan adil untuk seluruh dunia usaha, baik yang berskala besar, menengah, kecil dan mikro;

d. Pemerintah didukung oleh kemudahan birokrasi yang melayani kebutuhan dunia usaha;

e. Pemerintah menciptakan kondisi ekonomi makro, politik, hukum dan sosial yang kondusif untuk berusaha;

f. Pemerintah memberikan kemudahan perizinan dan non-perizinan sebagai fasilitas kemudahan berusaha;

g. Pemerintah memberikan komitmen nyata dalam menciptakan kondisi yang kondusif untuk percepatan penyediaan infrastruktur yang handal;

h. Pemerintah menyediakan perlindungan dan pelayanan dasar sosial;

i. Bentuk usaha pemanfaatan sumber daya dilakukan secara efisien dengan manajemen yang berasaskan inklusivisme dan keberlanjutan; dan

j. Mendorong integrasi pusat penelitian dan pengembangan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan lingkungan dan berlandaskan pelestarian lingkungan.

II.1.3. Penguatan Konektivitas Antarwilayah

Penguatan konektivitas antar wilayah dilakukan oleh pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, yang diwujudkan dalam bentuk:

a. Merealisasikan sistem yang terintegrasi antara logistik nasional, sistem transportasi wilayah, pengembangan wilayah, serta sistem komunikasi dan informasi;

b. Identifikasi simpul-simpul transportasi (*transportation hubs*) dan *distribution centers* untuk memfasilitasi kebutuhan logistik bagi komoditi utama dan penunjang;

c. Penguatan konektivitas intra dan antar pusat-pusat kegiatan ekonomi serta konektivitas nasional dan internasional; dan

d. Peningkatan jaringan komunikasi dan teknologi informasi untuk memfasilitasi seluruh aktivitas ekonomi, aktivitas pemerintahan, dan sektor pendidikan.

II.1.4. Optimalisasi Pusat Kegiatan Ekonomi

Optimalisasi pusat kegiatan ekonomi yang telah ada di Provinsi Jawa Timur dilakukan dengan cara penguatan infrastruktur. Penguatan infrastruktur dilakukan untuk kawasan-kawasan yang sudah memiliki pusat-pusat ekonomi terbangun, namun dapat ditingkatkan kontribusinya melalui penambahan infrastruktur.

II.1.5. Pembangunan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru

Pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi baru dilakukan dengan dukungan infrastruktur yang telah ada ditambah dengan infrastruktur tambahan untuk mendukung pusat pertumbuhan baru. Pengembangan dilakukan untuk kawasan-kawasan yang aktivitas ekonominya belum optimal, dan perlu didorong untuk menciptakan kesejahteraan dan memajukan pemerataan ekonomi.

II.1.6. Pemanfaatan Potensi Kemaritiman

Percepatan pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa Timur juga dapat dilakukan dengan cara pengelolaan aset dan akses dalam bentang wilayah darat dan wilayah perairan teritorial, landas kontinen (*continental shelf*) maupun Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia berbasiskan wawasan nusantara. Pemanfaatan dilakukan dengan:

a. Pemanfaatan posisi strategis maritim Provinsi Jawa Timur untuk menjaga dan meningkatkan ketahanan dan kedaulatan ekonomi Provinsi Jawa Timur;

b. Pemanfaatan potensi jalur laut untuk memastikan pemerataan pembangunan ekonomi secara nasional dan regional; dan

c. Peningkatan daya saing jalur laut internasional dan kemaritiman bangsa dengan memanfaatkan jalur *Sea Line of Communication* (*S LoC*) dan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang dimiliki.

II.1.7. Ketahanan Pangan, Air, dan Energi

II.1.7.1. Ketahanan pangan

Ketahanan Pangan merupakan prasyarat penting untuk mendukung keberhasilan pembangunan Indonesia berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. Ketahanan pangan memperhatikan dimensi konsumsi dan produksi;

b. Pangan tersedia secara mencukupi dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia untuk memenuhi kebutuhan hidup yang sehat dan produktif;

c. Upaya diversifikasi konsumsi pangan terjadi jika pendapatan masyarakat meningkat dan produk pangan dihargai sesuai dengan nilai ekonominya;

d. Diversifikasi produksi pangan terutama tepung-tepungan, disesuaikan dengan potensi produksi pangan daerah;

e. Pembangunan kegiatan investasi pangan baru berskala ekonomi Luar Jawa; dan

f. Peningkatan produktivitas melalui peningkatan kegiatan penelitan dan pengembangan.

II.1.7.2. Ketersediaan Air Bersih

Kebijakan terkait penyediaan air bersih tidak terfokus pada pembangunan infrastruktur, namun juga harus memperhatikan beberapa prinsip sebagai berikut:

a. Pemerintah memastikan ketersediaan dan akses terhadap air bagi seluruh penduduk;

b. Penyediaan air bersih memperhatikan kelestarian lingkungan sumber air untuk menjaga keberlanjutannya;

c. Pengembangan hutan tanaman harus dilanjutkan guna memastikan peningkatan luas hutan untuk keberlanjutan ketersediaan air; dan

d. Kabupaten/Kota memastikan tercipta/terjaganya luasan hutan sebagai persentase tertentu dari luas wilayahnya.

II.1.7.3. Ketahanan Energi

Ketahanan energi didasarkan kepada manajemen resiko dari kebutuhan dan ketersediaan energi di Indonesia yang meliputi:

a. Manajemen resiko didasarkan pada pengaturan komposisi energi (*energy mix)* yang mendukung pembangunan ekonomi Indonesia secara berkelanjutan;

b. Revisi peraturan perundang-undangan yang tidak mendukung iklim usaha, serta perbaikan konsistensi antar peraturan;

c. Pembatasan ekspor komoditas energi untuk pengolahan lebih lanjut di dalam negeri guna meningkatkan nilai tambah ekspor;

d. Tata kelola penambangan untuk meminimalkan kerusakan lingkungan;

e. Memitigasi ketergantungan energi Indonesia (terhadap impor minyak) yang kemudian membebani APBN dengan mendorong pengembangan energi terbarukan;

f. Mendorong pemanfaatan sumberdaya energi yang ketersediaannya cukup banyak (batubara) atau energi yang terbarukan;

g. Mengembangkan strategi kebijakan harga energi yang mendorong upaya-upaya efisiensi energi dan diversifikasi energi, khususnya ke arah pengembangan energi baru dan terbarukan; dan

h. Mendorong efisiensi pemanfaatan dan diversifikasi energi pada pembangkit listrik dan terutama sektor- sektor dengan konsumsi energi tinggi.

II.1.8. Prinsip Keberlanjutan dan Mitigasi Kebencanaan dalam Pelaksanaan Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Provinsi Jawa Timur

Pembangunan yang berkelanjutan juga memastikan keberlanjutan lingkungan sebagai ekosistem utama manusia, diantaranya:

a. Mengusahakan pengurangan resiko bencana, seperti dengan melakukan bentuk adaptasi terhadap perubahan iklim di Indonesia;

b. Penyesuaian perencanaan infrastruktur dan desain terhadap dampak cuaca ekstrem dan perubahan iklim sebagai bentuk penguatan adaptasi bangsa;

c. Pengembangan ekonomi rendah emisi karbon (*low carbon economy*) sebagai bentuk mitigasi perubahan iklim, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) serendah mungkin;

d. Pengembangan kapasitas dan peningkatan penelitian dan pengembangan teknologi tepat guna untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di Indonesia; dan

e. Memastikan pendanaan yang memadai dan berkelanjutan agar memungkinkan pemerintah dan masyarakat melakukan berbagai aksi nyata untuk mengurangi emisi GRK serta untuk beradaptasi dengan dampak buruk perubahan iklim.

II.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur

II.2.1. Arah Pengembangan Wilayah Provinsi Jawa Timur

II.2.1.1. Kerangka Regulasi Arah Perencanaan dan Pengembangan Wilayah dalam Perspektif Nasional

Pengembangan wilayah Provinsi Jawa Timur diarahkan untuk mewujudkan ruang wilayah yang berbasis agrobisnis dan jasa komersial yang berdaya saing global dalam pembangunan berkelanjutan. Arah pengembangan wilayah ini diwujudkan melalui pemerataan pembangunan antar wilayah dan pertumbuhan ekonomi, pengembangan pusat pertumbuhan wilayah dalam meningkatkan daya saing daerah, penyediaan sarana dan prasarana wilayah, pemantapan fungsi lindung dan kelestarian sumber daya alam dan buatan, optimasi fungsi budidaya kawasan, keterpaduan program pembangunan berbasis agrobisnis dan jasa komersial, dan kemudahan bagi pengembangan investasi daerah.

Dalam RPJMN 2020-2024, arah pengembangan wilayah di Provinsi Jawa Timur diselenggarakan melalui pengembangan kawasan strategis dan percepatan pembangunan konektivitas. Pengembangan kawasan strategis dilakukan melalui penguatan konektivitas infrastruktur pada pusat pertumbuhan ekonomi yang telah ada dan pusat pertumbuhan ekonomi baru. Pengembangan kawasan strategis di Provinsi Jawa Timur diprioritaskan di Kawasan Gerbangkertosusila yang didukung dengan Kawasan Madura dan Kepulauan, Kawasan Bromo Tengger Semeru yang didukung dengan Kawasan Selingkar Ijen, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan.

II.2.1.2. Kerangka Regulasi Arah Perencanaan dan Pengembangan Wilayah dalam Perspektif Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan RTRW Provinsi Jawa Timur 2011 – 2031, arah pengembangan wilayah Provinsi Jawa Timur terdiri atas rencana sistem perkotaan dan penetapan fungsi Wilayah Pengembangan. Sistem perkotaan di wilayah

provinsi menunjukkan keterkaitan antarkota/antarperkotaan yang membentuk hierarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah provinsi. Sistem perkotaan tersebut memiliki potensi sebagai pusat kegiatan wilayah dan pusat pertumbuhan ekonomi. Sistem perkotaan di Provinsi Jawa Timur terdiri dari Pusat Kegiatan Nasional (PKN) di Kawasan Perkotaan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo - Lamongan (Gerbangkertosusila) dan Malang, Pusat Kegiatan Wilayah di Probolinggo, Tuban, Kediri, Madiun, Banyuwangi, Jember, Blitar, Pamekasan, Bojonegoro, dan Pacitan, Pusat Kegiatan Wilayah Provinsi (PKWP) di Pasuruan dan Batu, Pusat Kegiatan Lingkungan di Jombang, Ponorogo, Ngawi, Nganjuk, Tulungagung, Lumajang, Sumenep, Magetan, Situbondo, Trenggalek, Bondowoso, Sampang, Kepanjen, Mejayan, Kraksaan, Kanigoro, dan Bangil.

Gambar 2. 1 Sistem Perkotaan Provinsi Jawa Timur

Sumber: RTRW Provinsi Jawa Timur, 2011-2031, diolah Sekretariat Kebijakan Satu Peta 2019

Selanjutnya, arah pengembangan wilayah Provinsi Jawa Timur diselenggarakan melalui Wilayah Pengembangan (WP) di setiap pusat kegiatan dalam sistem perkotaan sesuai dengan skala pelayanan perkotaan. Wilayah Pengembangan tersebut merupakan satu kesatuan wilayah yang terdiri atas satu dan/atau beberapa kabupaten/kota yang membentuk kesatuan struktur pelayanan secara berhierarki yang di dalamnya terdapat pusat pertumbuhan dan wilayah pendukung. Provinsi Jawa Timur memiliki 8 (delapan) WP terdiri dari WP Gerbangkertosusila Plus yang berpusat di Kota Surabaya, WP Malang Raya yang berpusat di Kota Malang, WP Madiun yang berpusat di Kota Madiun, WP Kediri yang berpusat di Kota Kediri, WP Probolinggo-Lumajang yang berpusat di Kota Probolinggo, WP Blitar yang berpusat di Kota Blitar, WP Jember yang berpusat di Perkotaan Jember, dan WP Banyuwangi yang berpusat di Perkotaan Banyuwangi.

Tabel 2. 1 Fungsi Wilayah Pengembangan Provinsi Jawa Timur

No	Wilayah Pengembangan	Fungsi Wilayah
1	Gerbangkertosusila Plus	Pertanian tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, kehutanan, perikanan, peternakan, pertambangan, perdagangan, jasa, pendidikan, kesehatan, pariwisata, transportasi, dan industri
2	Malang Raya	Pertanian tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, kehutanan, perikanan, peternakan, pertambangan, perdagangan, jasa, pendidikan, kesehatan, pariwisata, dan industri
3	Madiun dan Sekitarnya	Pertanian tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, kehutanan, peternakan, pertambangan, pariwisata, pendidikan, kesehatan, dan industri
4	Kediri dan Sekitarnya	Pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan, pertambangan, pendidikan, kesehatan, pariwisata, perikanan, dan industri;
5	Probolinggo-Lumajang	Pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, pertambangan, pariwisata, pendidikan, dan kesehatan
6	Blitar	Pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan, pertambangan, pendidikan, kesehatan dan pariwisata
7	Jember	Pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan, pertambangan, pendidikan, kesehatan, dan pariwisata
8	Banyuwangi	Pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri, pendidikan, kesehatan, dan pariwisata

Sumber: RPJM Provinsi Jawa Timur, 2019-2024

Berdasarkan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, kebijakan pembangunan kewilayahan di Provinsi Jawa Timur diarahkan pada:

a. Peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat melalui peningkatan kompetensi dan pemerataan distribusi tenaga kesehatan dan pendidikan, pengembangan kurikulum pendidikan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja serta peningkatan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dan pendidikan;

b. Pengembangan dan peningkatan sektor unggulan dalam mengembangkan perekonomian yang produktif, efisien dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan produktivitas sektor unggulan, peningkatan nilai tambah sektor primer dengan hilirisasi produk unggulan, peningkatan kerjasama antar daerah dalam pengembangan kawasan, penyederhanaan regulasi untuk kemudahan investasi, peningkatan akses masyarakat terhadap sumber pendanaan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin; dan

c. Pemerataan pembangunan antar wilayah melalui peningkatan layanan prasarana transportasi dalam rangka mendukung sistem logistik, peningkatan kualitas lingkungan permukiman, peningkatan pengelolaan limbah, pengoptimalan dukungan pendanaan pembangunan melalui kemitraan stakeholder, dan peningkatan konektivitas ekonomi.

Poros pengembangan Provinsi Jawa Timur terbagi dalam 7 (tujuh) fokus pengembangan yaitu:

a. Koridor Maritim dan Logistik di Tuban – Gresik – Bangkalan -Sumenep (jalur utara);

b. Koridor Industri Agro di Tuban – Madiun – Magetan - Pacitan (Jalur Utara-Selatan sisi Barat);

c. Koridor Pariwisata dan Maritim Perikanan di Pacitan – Prigi - Sendangbiru – Jember - Banyuwangi (Jalur Selatan);

d. Koridor Pengembangan Kota Menengah di Madiun – Nganjuk – Kediri – Jombang – Pasuruan - Situbondo (jalur Tengah dan Utara Tapal Kuda);

e. Koridor Megapolitan di Surabaya - Malang;

f. Koridor Logistik Maritim dan Pariwisata di Banyuwangi – Situbondo - Sumenep (Jalur Utara - Selatan sisi Timur); dan

g. Koridor Pengembangan Kota Menengah Kompak (*smart and compact*) di Magetan – Trenggalek – Tulungagung - Malang (Dampit) – Lumajang – Jember - Banyuwangi (Kalibaru) (Jalur Tengah).

Gambar 2. 2 Arahan Pengembangan Wilayah Jawa Timur

Sumber: RPJM Provinsi Jawa Timur, 2019-2024

Secara garis besar, upaya optimasi konektivitas infrastruktur dan pemerataan ekonomi yang hendak dirintiskan di Provinsi Jawa Timur telah selaras dengan arah pengembangan wilayah. Hal tersebut didukung pula dengan potensi kegiatan ekonomi dan keunggulan wilayah Provinsi Jawa Timur yang didominasi oleh kegiatan industri pengolahan; pertanian, perkebunan, dan kehutanan; dan pariwisata, yang juga merupakan fokus sektor dalam rangka transformasi ekonomi Pemerintah ke depan. Berdasarkan arahan pengembangan wilayah, telah disepakati kawasan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur adalah Kawasan Gerbangkertosusila Plus, Bromo – Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan.

II.2.2. Pengembangan Kawasan Prioritas dan Pendukung di Provinsi Jawa Timur

Percepatan pertumbuhan ekonomi bertumpu terhadap optimalisasi pengembangan pusat pertumbuhan wilayah dan penyediaan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung aktivitas ekonomi dalam kawasan ataupun memfasilitasi pergerakan arus barang dan orang. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan terdiri dari 2 jenis, yaitu primer dan lateral. Pusat-pusat pertumbuhan primer merupakan pusat-pusat pertumbuhan yang dari sisi skala mempunyai *leverage* dan kesamaan arah pengembangan terhadap Provinsi Jawa Timur secara keseluruhan. Sementara pengembangan pusat pertumbuhan lateral merupakan pusat-pusat pertumbuhan dengan fokus untuk pengembangan sumber-sumber pertumbuhan non-tradisional. Pengembangan pusat pertumbuhan primer dan lateral yang dilakukan secara bersamaan diharapkan dapat memberikan nilai tambah pada masing-masing kawasan, mengingat pada masing-masing kawasan tersebut memiliki potensi yang berbeda-beda.

Penggabungan potensi pada masing-masing kawasan diharapkan dapat memberikan nilai yang lebih besar secara keekonomian bagi seluruh kawasan atau pada masing-masing kawasan. Mengingat sinergi pembangunan antar kawasan tersebut bukan disebakan karena salah satu kawasan dianggap tidak mampu untuk membangun kawasan, sehingga diperlukan kawasan lain untuk mendukung kawasan tersebut. Sinergi pembangunan berbasis kawasan yang saling mendukung tersebut lebih memberikan kepastian dalam pengembangan konektivitas antar kawasan yang akan mendapatkan prioritas dalam pembangunan sebagai prasyarat dalam meningkatkan kelayakan secara ekonomi, dan elaborasi atas potensi kewilayahan tidak hanya mengacu pada satu produk, namun dilakukan terhadap semua produk pada wilayah-wilayah di kawasan dimaksud.

Berdasarkan prinsip di atas, pengembangan kawasan di Provinsi Jawa Timur dapat dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu Kawasan Gerbangkertosusila yang didukung Kawasan Madura dan Kepulauan; Kawasan Bromo – Tengger - Semeru yang didukung Kawasan Selingkar Ijen, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan.

II.2.3. Kerangka Stategis dan Kebijakan Penguatan Konektivitas

Penguatan konektivitas merupakan salah satu kerangka strategi yang ditempuh dalam rangka percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi nasional. Penguatan konektivitas ditempuh dengan memperluas pertumbuhan melalui konektivitas wilayah - wilayah yang menghubungkan hinterland dengan pusat-pusat pertumbuhan. Peningkatan konektivitas nasional berdampak terhadap meningkatnya ekonomi biaya yang rendah dan meningkatkan daya saing kawasan sehingga dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi dan menanggulangi kemiskinan.

Kebijakan penguatan konektivitas nasional terus diperkuat oleh Pemerintah salah satunya melalui kebijakan tol laut dan Proyek Strategis Nasional (PSN). Implementasi PSN diperkuat melalui berlakunya Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Proyek Strategis Nasional dan implementasi tol laut diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Dari Dan Ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan. Penguatan konektivitas nasional perlu diselaraskan dengan arahan pengembangan wilayah yang telah diatur dalam Rencana Pengembangan Wilayah (RPJMN, RPMD, RTRWN, RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten, dll). Kebijakan konektivitas nasional memiliki beberapa dokumen yang berlaku hingga saat ini. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota mulai dilakukan revisi untuk menanamkan PSN dalam rangka memperkuat mandat bagi pemerintah dan untuk memfasilitasi implementasi pembangunan infrastruktur.

Gambar 2. 3 Kebijakan Penguatan Konektivitas Nasional

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2018

Kerangka strategis penguatan konektivitas dilakukan melalui penguatan simpul-simpul transportasi (pelabuhan, terminal, stasiun, depo, pusat distribusi dan kawasan pergudangan serta bandara) yang perlu diintegrasikan dengan jaringan transportasi dan pelayanan sarana intermoda transportasi. Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengembangan produk/komoditas unggulan dan meningkatkan aksesibilitas antar pusat pertumbuhan ekonomi (KEK, Kawasan Industri, kawasan pariwisata, dll), lokasi kegiatan ekonomi, dan infrastruktur pendukungnya. Konsep Wilayah Pengembangan perlu terintegrasi dengan *hub* utama (gerbang arus perdagangan ekspor) yang terhubung dengan area industri, perkotaan, area maritim, dengan infrastruktur jalan sebagai koridor utama atau *backbone*. Strategi tersebut dapat memperkuat konektivitas baik intra kawasan, antar kawasan, maupun konektivitas global.

II.2.4. Penguatan Konektivitas (Intra Kawasan, Antar Kawasan dan Konektivitas International)

Saat ini permasalahan konektivitas internasional sulit dipisahkan dari masalah konektivitas regional. Para pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan perlu memperhatikan kebijakan-kebijakan yang muncul termasuk perencanaan tata ruang, alur rantai pasokan, dan memperkuat ketahanan rantai pasokan terhadap gangguan atau bencana. Indonesia saat ini berada pada peringkat ke 61 dalam kualitas infrastruktur logistik dengan nilai indeks sebesar 2,81.

Kondisi tersebut menggambarkan Indonesia sangat membutuhkan kebijakan penguatan konektivitas baik dari sektor transportasi darat, laut, dan udara secara masif dan melibatkan semua unsur sehingga berdampak terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Gambar 2. 4 Kerangka Kerja Konektivitas Nasional

Sumber: MP3EI, 2011, diolah Kedeputian Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, 2019

Tantangan utama konektivitas di Provinsi Jawa Timur adalah integrasi antara simpul transportasi dan simpul-simpul pertumbuhan ekonomi (kawasan industri, kawasan ekonomi khusus). Sebagai pintu gerbang jalur konektivitas internasional di Indonesia bagian Timur, Pelabuhan Tanjung Perak menjadi pintu masuk arus logistik internasional. Pelabuhan Tanjung Perak merupakan pelabuhan terbesar dan tersibuk nomor dua di Indonesia. Hal tersebut berdampak terhadap meningkatnya arus distribusi barang dari dan menuju wilayah Provinsi Jawa Timur baik untuk barang dalam negeri maupun perdagangan internasional. Peningkatan kualitas dan akses menuju Pelabuhan Tanjung Perak dapat merangsang proses distribusi barang semakin luas kepada kawasan belakangnya (*hinterland*). Langkah strategis untuk penguatan konektivitas dengan pembangunan Pelabuhan Terminal Teluk Lamong dan *Java Integrated Industrial Port and Estate (JIIPE)*. Dukungan interkoneksi konektivitas adalah jaringan jalan nasional berupa jalan tol yang menghubungkan Provinsi Jawa Timur bagian Barat ke Timur.

Pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa Timur perlu dilakukan melalui pendekatan yang komprehensif, agar seluruh infrastruktur yang dibangun dapat memberikan manfaat yang optimal terhadap aktivitas perekonomian di Provinsi Jawa Timur, serta dapat mendukung pemerataan ekonomi di seluruh wilayah.

Gambar 2. 5 Strategi Penguatan Konektivitas Intra-Kawasan, Antar-Kawasan, dan Konektivitas Internasional

Sumber: MP3EI, 2014, diolah Kedeputian Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, 2019

Konsepsi tersebut akan menjadi tulang punggung yang membentuk postur konektivitas nasional dan sekaligus diharapkan berfungsi menjadi instrumen pendorong dan penarik keseimbangan ekonomi wilayah, yang tidak hanya dapat mendorong kegiatan ekonomi yang lebih merata ke seluruh wilayah Indonesia, tetapi dapat juga menciptakan kemandirian dan daya saing ekonomi nasional yang solid.

II.2.5. Pemerataan Antarwilayah dan Penanggulangan Kemiskinan

Meskipun pemerintah telah bertekad mempercepat penyediaan infrastruktur, hingga saat ini konektivitas kawasan di Provinsi Jawa Timur belum optimal, hal tersebut menimbulkan tingginya disparitas ekonomi di Provinsi Jawa Timur. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur tumbuh sebesar 5,51 persen, *year-on-year* (*yoy*) dari Triwulan I-2018 ke Triwulan I-2019. Namun, angka pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi ini belum terjadi secara merata di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Bojonegoro merupakan kabupaten yang memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi di Provinsi Jawa Timur (10,26%), sedangkan Kabupaten Sumenep memiliki pertumbuhan ekonomi terendah di Provinsi Jawa Timur (2,86%) pada periode Triwulan I-2019. Disparitas pertumbuhan ekonomi ini berdampak pula pada tingginya tingkat penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur.

Angka kemiskinan di Provinsi Jawa Timur (10,98%) tergolong tinggi yaitu berada diatas rata-rata nasional (9,41%). Secara regional, angka kemiskinan ini masih tersebar di Jalur Pantai Utara (Pantura) dan tersebar di seluruh provinsi. Terdapat 8 (delapan) Kabupaten/Kota yang memiliki angka kemiskinan dibawah rata-rata nasional yaitu Kota Surabaya, Kota Pasuruan, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Batu, Kota Malang, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Banyuwangi. Hal ini disebabkan karena tingginya aktivitas kegiatan ekonomi yang memberikan *multiplier effect* besar terhadap pembangunan perekonomian seperti kegiatan Industri Manufaktur, Industri Pengolahan, dan Sektor Pariwisata.

Gambar 2. 6 Peta Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, diolah oleh Sekretariat Kebijakan Satu Peta, 2019

Ketimpangan pendapatan yang terjadi bukan hanya terjadi antar kawasan namun juga dalam satu kawasan yang sama. Hal ini terindikasi dari tingginya tingkat kemiskinan pada wilayah-wilayah yang pertumbuhan ekonominya relatif tinggi. Di masa yang akan datang, dibutuhkan upaya pembangunan kawasan Provinsi Jawa Timur yang memperhatikan aspek inklusivitas, guna mendorong pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur. Wilayah-wilayah tersebut terpusat pada wilayah Pantura. Kabupaten/ Kota dengan tingkat penduduk miskin tertinggi di Provinsi Jawa Timur.

II.2.6. Penguatan Kemampuan SDM dan IPTEK

Peningkatan kemampuan SDM dan IPTEK Nasional menjadi salah satu dari strategi utama pelaksanaan Pembangunan Provinsi Jawa Timur. Hal ini dikarenakan pada era ekonomi berbasis pengetahuan, mesin pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada kapitalisasi hasil penemuan menjadi produk inovasi. Dalam konteks ini, peran SDM yang berpendidikan menjadi kunci utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Oleh karena itu, tujuan utama di dalam sistem pendidikan dan pelatihan untuk mendukung hal tersebut haruslah bisa menciptakan sumber daya manusia yang mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perkembangan sains dan teknologi.

Sumber daya manusia yang produktif merupakan penggerak pertumbuhan ekonomi untuk menghasilkan tenaga kerja yang produktif, maka diperlukan pendidikan yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan pembangunan. Dalam ekonomi yang semakin bergeser ke arah ekonomi berbasis pengetahuan, peran pendidikan tinggi sangat penting, antara lain untuk menghasilkan tenaga kerja yang unggul dan produktif, yang semakin mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan, untuk meningkatkan nilai tambah kegiatan ekonomi yang berkelanjutan. Pendidikan tinggi di sini terdiri dari program pendidikan akademik, program pendidikan kejuruan, serta program pendidikan profesi.

Di Indonesia sendiri, saat ini proporsi SDM dengan latar belakang pendidikan tinggi tergolong rendah. Pada tahun 2010, jumlah angkatan kerja dengan latar belakang pendidikan tinggi hanya berkisar pada 7 persen (Malaysia 20%, OECD 40%) sementara pendidikan dasar menjadi mayoritas untuk mengusahakan peningkatan proporsi angkatan kerja yang berkualitas, dimana penduduk usia muda didorong untuk setidaknya mengenyam pendidikan hingga menengah atas dan membuka luas kesempatan pendidikan tinggi. Sehingga SDM Indonesia dapat berperan aktif dalam usaha pencapaian target pertumbuhan ekonomi di tahun 2025.

BAB III

POSTUR GEOGRAFI WILAYAH, EKONOMI DAN KONEKTIVITAS JAWA TIMUR

III.1 Kondisi Geografi Wilayah Provinsi Jawa Timur

Provinsi Jawa Timur terletak antara 7,12' – 8,48' LS dan 111,0' – 114,4' BT dan merupakan Provinsi yang memiliki wilayah terluas di Pulau Jawa, yaitu mencapai 47.799,75 km^2. Provinsi Jawa Timur terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu Jawa Timur daratan dan Kepulauan Madura. Luas wilayah Provinsi Jawa Timur daratan sebesar 90 persen, sementara luas Kepulauan Madura sekitar 10 persen. Batas wilayah Provinsi Jawa Timur meliputi:

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa;

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Bali;

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan perairan terbuka, yaitu Samudra Hindia;

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah.

Topografi di Provinsi Jawa Timur beragam, ada yang berupa pegunungan perbukitan, dan kepulauan. Oleh karena itu, wilayah ini memiliki sumber daya pertanian, kelautan, kehutanan, dan pertambangan yang potensial. Iklim di daerah Provinsi Jawa Timur termasuk dalam tropis lembab dengan curah hujan rata-rata 2.100 mm/tahun. Suhu udara di daerah ini berkisar antara 26,7-29,5 derajat Celcius. Struktur geologi di Provinsi Jawa Timur didominasi oleh batuan sedimen Alluvium. Batuan hasil gunung berapi juga tersebar di bagian tengah wilayah Provinsi Jawa Timur sehingga daerah ini relatif subur. Beragam jenis batuan yang tersebar di Provinsi Jawa Timur menyebabkan besarnya ketersediaan bahan tambang di wilayah ini.

Secara administratif, Provinsi Jawa Timur terdiri atas 38 Kabupaten/Kota (29 Kabupaten dan 9 Kota) yang mempunyai 666 Kecamatan dengan 5.674 desa/kelurahan berstatus perdesaan, dan 2.827 desa/kelurahan berstatus perkotaan. Sementara itu, Kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang memiliki jumlah kecamatan terbanyak, yaitu Kabupaten Malang dengan 33 kecamatan dan kabupaten dengan desa/kelurahan terbanyak adalah Kabupaten Lamongan sebanyak 474 desa/kelurahan. Kabupaten di Provinsi Jawa Timur terbagi menjadi 29 kabupaten, meliputi Kabupaten Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Kediri, Malang, Lumajang, Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, Pasuruan, Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, Nganjuk, Madiun, Magetan, Ngawi, Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Gresik, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Kabupaten Sumenep. Serta, 9 (sembilan) kota, yaitu Kota Surabaya, Madiun, Kediri, Blitar, Malang, Batu, Pasuruan, Probolinggo dan Kota Mojokerto.

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang memiliki luas wilayah terbesar adalah Kabupaten Banyuwangi yakni seluas 5.782,40 km^2 atau 12,10 persen dari luas total Provinsi Jawa Timur, sedangkan Kabupaten/Kota yang memiliki luas administrasi terkecil adalah Kota Mojokerto yakni 16,47 km^2 setara 0,03 persen dari luas Provinsi Jawa Timur. Sebagian besar wilayah Provinsi Jawa

Timur mempunyai karakteristik topografi daratan relatif datar dengan kemiringan lereng 0-15 persen yang berada hampir di wilayah Provinsi Jawa Timur khususnya di bagian Utara, sedangkan untuk kemiringan lereng 15-40 persen berada pada daerah perbukitan dan pegunungan, kemiringan lereng >40 persen berada pada daerah pegunungan yang sebagian besar pada wilayah Provinsi Jawa Timur Bagian Selatan.

Gambar 3. 1 Peta Geomorfologi Provinsi Jawa Timur

Sumber: Sekretariat Kebijakan Satu Peta, 2018

Pada tahun 2010, Provinsi Jawa Timur memiliki jumlah penduduk sebanyak 37.476.757 jiwa (Data Sensus Penduduk, 2010). Jumlah penduduk tersebut terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2018, jumlah penduduk Provinsi Jawa Timur mencapai 39,5 juta jiwa penduduk yang terdiri atas 19,5 juta penduduk laki-laki dan 20 juta penduduk perempuan. Provinsi Jawa Timur memiliki laju pertumbuhan penduduk per tahun sebesar 0,31 persen (2010-2018). Sementara itu, rasio jenis kelamin Provinsi Jawa Timur pada tahun 2018 sebesar 97,52. Angka ini dapat diinterpretasikan bahwa dalam 100 penduduk perempuan terdapat 97 hingga 98 penduduk laki-laki. Kepadatan penduduk di Provinsi Jawa Timur tahun 2018 mencapai 826 jiwa/km^2. Angka kepadatan penduduk tertinggi yaitu Kota Surabaya sebesar 8.233 jiwa/km^2 dan kepadatan terendah di Kabupaten Banyuwangi sebesar 278 jiwa/km^2.

Kota Surabaya mempunyai jumlah penduduk yang paling besar, yaitu 2,89 juta jiwa, diikuti Kabupaten Malang 2,59 juta jiwa dan Kabupaten Jember 2,44 juta jiwa. Jumlah penduduk Provinsi Jawa Timur terbanyak ada pada kelompok umur 15-19 tahun, artinya komposisi penduduk usia sekolah yang produktif masih cukup tinggi sehingga perlu kebijakan dari pemerintah terkait kesehatan dan pendidikan penduduk usia ini. Jumlah penduduk berumur 15

tahun ke atas di Provinsi Jawa Timur yang termasuk angkatan kerja sekitar 21,3 juta jiwa penduduk, sedangkan yang bukan angkatan kerja sekitar 9,4 juta jiwa penduduk.

Gambar 3. 2 Peta Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Jawa Timur

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, diolah oleh Sekretariat Kebijakan Satu Peta 2019

Sejak tahun 2010, pertumbuhan penduduk di Provinsi Jawa Timur sudah berada dibawah satu persen, yaitu sebesar 0,7 persen per tahun. Laju pertumbuhan penduduk Provinsi Jawa Timur selama 9 (sembilan) tahun terakhir, periode 2010-2018, seluruh kabupaten/kota mengalami peningkatan laju penduduk kecuali Kabupaten Lamongan. Kabupaten/kota dengan laju pertumbuhan penduduk tertinggi adalah Kabupaten Sidoarjo dengan laju sebesar 2,21 persen per tahun. Terdapat 10 (sepuluh) kabupaten/kota yang memiliki laju pertumbuhan penduduk di atas 1 persen adalah Kabupaten Gresik dengan laju 1,59 persen, Kabupaten Sampang dengan laju 1,58 persen, Kabupaten Pamekasan dengan laju 1,44 persen, Kota Probolinggo dengan laju 1,26 persen, Kota Batu dengan laju 1,22 persen, Kabupaten Mojokerto dengan laju 1,20 persen, Kabupaten Bangkalan dengan laju1,20 persen, Kota Pasuruan dengan laju 1,02 persen, Kota Blitar dengan laju 1,01 persen, dan Kabupaten Pasuruan dengan laju 1,00 persen.

Provinsi Jawa Timur di bagian selatan dipenuhi dengan 10 (sepuluh) gunung api aktif antara lain Gunung Semeru, Gunung Bromo, Gunung Welirang, Gunung Ijen, Gunung Raung, Gunung Liman, Gunung Arjuna, Gunung Lawu, Gunung Argopuro, dan Gunung Wilis/Kawi. Hal tersebut sejalan dengan risiko bencana gempa bumi yang tinggi hingga menengah. Untuk Provinsi Jawa Timur bagian utara cenderung lebih aman dengan risiko gempa bumi rendah.

Gambar 3. 3 Peta Kebencanaan Provinsi Jawa Timur

Sumber: Sekretariat Kebijakan Satu Peta, 2018

III.2 Postur Ekonomi Provinsi Jawa Timur

III.2.1. Kontribusi Provinsi Jawa Timur terhadap Perekonomian Nasional

Berdasarkan data BPS, Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tertinggi kedua nasional, dengan besaran Rp. 2.019 Triliun, atau 14,61 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional pada tahun 2017. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur pada Triwulan-II 2019 mencapai 5,72 persen, yang sejak 2014 secara tren selalu berada di atas angka pertumbuhan ekonomi nasional. Dari segi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 7,89 persen, diikuti Jasa Perusahaan sebesar 7,69 persen. Dari segi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada

komponen pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani rumah tangga sebesar 9,64 persen, diikuti Ekspor Luar Negeri 7,31 persen dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 6,40 persen. Provinsi Jawa Timur selain menjadi provinsi dengan PDRB tertinggi kedua nasional, menurut riset yang dilakukan *Asia Competitiveness Institute* (ACI) adalah provinsi yang menjadi peringkat pertama pada tahun 2017 dalam tingkat kemudahan berbisnis. Kategori peniliaian ini terdiri dari daya tarik investor, keramahan berbisnis dan kebijakan yang kompetitif.

Gambar 3. 4 Laju Pertumbuhan Ekonomi (%), 2014-2019 Triwulan II

Sumber: BPS, diolah Kedeputian Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, 2019

III.2.2. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur pada triwulan I 2019 mencapai 5,5 persen (*yoy*), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 5,6 persen (*yoy*). Namun, angka pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi ini belum terjadi secara merata di seluruh Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Bojonegoro merupakan kabupaten yang memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi di Provinsi Jawa Timur (10,26 persen), sedangkan Kabupaten Sumenep memiliki pertumbuhan ekonomi terendah di Provinsi Jawa Timur (2,86 persen). Dibandingkan dengan provinsi di Pulau Jawa, kinerja perekonomian Provinsi Jawa Timur pada periode ini lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Barat, Banten, dan Provinsi Jawa Tengah

Gambar 3. 5 Laju Pertumbuhan Ekonomi (%), 2014-2019 Triwulan II

Sumber: BPS, diolah Kedeputian Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, 2019

Menurut jenis lapangan usaha, kontribusi terbesar perekonomian Provinsi Jawa Timur berasal dari sektor industri pengolahan, sektor perdagangan besar dan eceran, serta sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Ketiga sektor masing-masingnya menyumbang PDRB sebesar Rp. 586,25 Triliun (29,03 persen), Rp. 367,19 Triliun (18,18 persen), dan Rp. 258,42 Triliun (12,80 persen). Sektor industri pengolahan didominasi oleh sub-lapangan usaha industri makanan dan minuman (Rp. 185,82 Triliun), industri pengolahan tembakau (Rp. 156,03 Triliun), serta sektor industri kimia, farmasi, dan obat tradisional (Rp. 46,97 Triliun). Pada triwulan I 2019, sub-lapangan usaha industri pengolahan tumbuh 7,3 persen (*yoy*). Selain ketiga sektor utama tersebut, sektor pariwisata mencatatkan pertumbuhan tahunan sebesar 13,23 persen dalam periode 2014-2017 (menggunakan proksi sektor penyediaan akomodasi dan makanan-minuman). Angka tersebut menunjukkan bahwa sektor pariwisata memiliki potensi pengembangan lebih lanjut di masa depan.

Gambar 3. 6 Struktur Ekonomi Provinsi Jawa Timur Tahun 2017
(PDRB Atas Dasar Harga Berlaku)

Sumber: BPS, diolah Kedeputian Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, 2019

Dalam konteks ekspor, Provinsi Jawa Timur berkontribusi terhadap 10,91 persen dari nilai ekspor nasional (2017). Tiga komoditas utama dengan nilai ekspor tertinggi adalah perhiasan dan permata (USD 3.088 juta), lemak dan minyak hewan nabati (USD 1.391 juta), serta kayu dan barang dari kayu (USD 1.298 juta).

Gambar 3. 7 Nilai Ekspor Provinsi Menurut Komoditas, 2014-2017 (USD Juta)

Sumber: BPS, diolah Kedeputian Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, 2019

III.2.3. Sektor/Kegiatan Ekonomi Prioritas

Mempertimbangkan kondisi saat ini dan potensi Provinsi Jawa Timur secara umum, diperlukan konsep pembangunan pengembangan wilayah yang bertumpu pada sektor-sektor industri prioritas. Rencana Induk Percepatan Pembangunan Ekonomi (RIPPE) Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya – Sidoarjo – Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger – Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan bertujuan untuk mendukung pengembangan potensi-potensi yang ada di Provinsi Jawa Timur. Dalam konteks Provinsi Jawa Timur, pilar prioritas pembangunan ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mewujudkan pemerataan kesejahteraan secara berkeadilan. Sasaran tersebut dapat dicapai dengan pengutamaan 4 pilar prioritas pembangunan yang meliputi:

a) Penguatan daya saing industri manufaktur dan perdagangan;

b) Peningkatan nilai tambah agroindustri;

c) Percepatan pertumbuhan industri pariwisata; serta

d) Pengembangan industri mikro, kecil & menengah.

Sasaran spesifik untuk setiap pilar prioritas tersebut adalah sebagai berikut:

Gambar 3. 8 Empat Pilar Prioritas Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur

Sumber: Hasil Analisis Kedeputian Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, 2019

Provinsi Jawa Timur memiliki potensi yang cukup besar dari sisi pusat pertumbuhan maupun infrastruktur. Di sisi pusat pertumbuhan sektor industri pengolahan, perekonomian Provinsi Jawa Timur sebagian besar terpusat di wilayah Pantura dan/atau wilayah dengan radius 100 km dari Surabaya. Beberapa wilayah di luar Gerbangkertosusila memiliki potensi *inheren* untuk pengembangan kawasan industri, terutama wilayah yang memiliki aksesibilitas laut dan udara. Industri-industri yang memiliki dampak penting meliputi industri semen, farmasi, produk olahan makanan, serta petrokimia, dengan pengembangan terpusat di wilayah Surabaya, Gresik, Mojokerto, Pasuruan, Tuban, dan Lamongan.

Di sektor pariwisata, Provinsi Jawa Timur memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk dapat meningkatkan PDRB dan pertumbuhan ekonominya. Potensi yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Timur terdiri dari potensi wisata yang ada di daratan maupun berbasis kemaritiman. Kawasan peruntukan wisata di Provinsi Jawa Timur meliputi wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan. Pada tahun 2017, jumlah kunjungan wisatawan nusantara ke objek-objek wisata yang Provinsi Jawa Timur adalah kurang lebih 65.623.535 kunjungan, sedangkan kunjungan wisatawan mancanegara adalah 401.778 kunjungan. Sesuai arahan dan penetapan dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Jawa Timur 2017-2037, untuk zona pariwisata pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diklasifikasikan ke dalam sub zona wisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil, wisata alam bawah laut dan wisata olahraga air sesuai potensi sumber daya wisata bahari.

Untuk mendukung pusat-pusat ekonomi yang ada maupun mendorong pusat pertumbuhan ekonomi baru, Provinsi Jawa Timur telah didukung oleh keberadaan jaringan jalan nasional, jalan tol, kereta api, bandara, pelabuhan serta bendungan. Diperlukan optimasi konektivitas antara pusat pertumbuhan ekonomi dengan jaringan infrastruktur di Provinsi Jawa Timur untuk mendukung percepatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

Gambar 3. 9 Peta Keterkaitan Antar Pusat Kegiatan Ekonomi

Sumber: BAPPEDA Provinsi Jawa Timur, diolah Sekretariat Kebijakan Satu Peta, 2019

III.2.4. Kawasan Sentra Produksi dan Komoditas Unggulan

Provinsi Jawa Timur merupakan lumbung pangan dan dengan daya dukung yang besar terhadap ketersediaan pangan nasional. Komoditas utamanya meliputi padi, jagung, kedelai dan ubi kayu. Sebaran sentra produksi pertanian masih terkonsentrasi di wilayah Pantura, memunculkan *trade off* dengan pengembangan industri manufaktur di kawasan tersebut. Rencana pengembangan pertanian lahan kering di Provinsi Jawa Timur ditetapkan dengan luas sekurang-kurangnya 849.033 ha atau sekitar 17,76 persen dari luas Provinsi Jawa Timur yang diarahkan pada daerah-daerah yang belum terlayani oleh jaringan irigasi. Untuk mencukupi kebutuhan pangan nasional dan Provinsi Jawa Timur, perlu dilakukan perlindungan terhadap lahan pertanian pangan sehingga dapat menjamin ketersediaan lahan. Berdasarkan hal tersebut telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri ATR/BPN No. 399/Kep-23.3/X/2018 tentang Penetapan Luas Lahan Baku Sawah Nasional Tahun 2018, lahan baku sawah yang meliputi pertanian lahan basah, lahan kering, dan hortikultura.

Potensi lahan baku sawah dengan luas saat ini kawasan pertanian 2.020.491,71 ha terdiri pertanian lahan basah sebesar 911.863 ha dan pertanian lahan kering/tegalan/kebun campur sebesar 1.108.627,71 ha.

Gambar 3. 10 Peta Lahan Sawah

Sumber: Sekretariat Kebijakan Satu Peta, 2018

Tanaman pangan yang dimaksud dalam sektor ini meliputi komoditi padi dan palawija (jagung, kacang hijau, kacang kedelai, ubi kayu, ubi jalar dan palawija lainnya). Capaian produksi padi pada tahun 2014-2017 mengalami pertumbuhan sebesar 1,75 persen dengan produksi tertinggi dicapai pada tahun 2016. Produksi Kedelai juga menurun jika dibandingkan tahun 2016, namun komoditas jagung yang mengalami peningkatan. Perkembangan produksi padi dan kedelai tahun 2017 melambat disebabkan menurunnya tingkat produktivitas padi dan kedelai akibat menurunnya jumlah curah hujan pada tahun 2017 sebanyak 1.547,3 mm, hanya 52 persen dari jumlah curah hujan pada tahun 2016 yang mencapai 2.976,8 mm.

Tabel 3. 1 Produksi Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Timur (Ton)

Komoditi	**Tahun**				
	2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018*)**
Padi	12.397.049	13.154.967	13.633.701	13.060.464	13.000.476
Jagung	5.737.382	6.131.163	6.278.264	6.335.252	6.543.358
Kedelai	355.464	344.998	274.317	200.916	244.442

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, diolah Kedeputian Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, 2019

Kawasan perkebunan di Provinsi Jawa Timur dikembangkan berdasarkan fungsi kawasan dan potensi yang ada pada masing-masing daerah berdasarkan prospek ekonomi yang dimiliki. Berdasarkan komoditasnya, pengembangan perkebunan dibagi dalam 2 (dua) kelompok yang terbagi atas perkebunan tanaman tahunan yang mencakup tebu, tembakau, kapas, serat karung dan wijen. Yang kedua adalah perkebunan tanaman semusim antara lain berupa kelapa, kopi, kakao, cengkeh, jambu mete, teh, kenanga, lada, kemiri, pala, karet dan sebagainya. Pengembangan potensi perkebunan diarahkan melalui sinergi antar sektor antar wilayah dalam pengembangan perkebunan (agropolitan/ kawasan pertanian terpadu).

Tabel 3. 2 Potensi Produktivitas Komoditi Perkebunan (Ton)

No	**Komoditi**	**Realisasi Produktivitas**				
		2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
1.	Tebu	6.350	6.499	5.963	6.186	-
	- Gula Kristal	5.753	5.976	5.186	5.624	5.265
	- Gula Merah	6.947	7.022	6.739	6.747	6.412
2.	Tembakau	912	927	886	997	835
3.	Kopi	739	787	802	795	795
	- Kopi Arabica	718	810	824	807	806
	- Kopi Robusta	761	763	779	782	783
4.	Kakao	1.078	909	899	892	2.661
5.	Kelapa	1.377	1.328	1.360	1.356	3.971
6.	Jambu Mete	706	665	671	675	685
7.	Cengkeh	406	392	411	412	410

Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur, diolah Kedeputian Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, 2019

Gambar 3. 11 Peta Komoditas Unggulan

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Timur, diolah Sekretariat Kebijakan Satu Peta, 2019

Provinsi Jawa Timur sebagai lumbung pangan nasional saat ini telah mampu mencukupi kebutuhan daging sapi dalam provinsi. Jumlah ternak sapi potong tahun 2018 mencapai 4.657.567 juta ekor yang berkontribusi 28 persen terhadap populasi nasional. Jumlah ternak sapi perah di Provinsi Jawa Timur sebanyak 283.311 ekor yang berkontribusi 51 persen terhadap populasi nasional dengan produksi susu segar sebanyak 516.199.064 kg. Provinsi Jawa Timur surplus daging sapi dan mampu memasok sapi siap potong ke luar provinsi sebanyak kurang lebih 300 ribu ekor tiap tahun.

Berdasarkan data dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dalam kurun waktu 3 tahun yaitu 2013-2016 hutan rakyat di Provinsi Jawa Timur telah mengalami perkembangan rata-rata sebesar 5 persen per tahun, pada tahun 2016 luas hutan rakyat di Provinsi Jawa Timurmencapai 739.156,93 ha dengan produksi sebesar 3.102.302,8181 m^3 atau 10 kali lipat jika dibandingkan produksi kayu milik Perhutani sekitar 300.000 m^3/tahun.

Selain agroindustri, Provinsi Jawa Timur juga memiliki potensi untuk minapolitan. Provinsi Jawa Timur memiliki panjang garis pantai 3.498,12 km^2 dengan total luas perairan laut sebesar 126.672 km^2. Jumlah pelabuhan perikanan pantai untuk melayani nelayan di Provinsi Jawa Timur bertambah dari 9 unit pada tahun 2014 menjadi 22 unit pada tahun 2019, diantaranya ada 8 pelabuhan perikanan yang akan dikembangkan berstandar internasional yaitu Pelabuhan Muncar Banyuwangi, Tamperan Pacitan, Tambak Rejo Blitar, Bulu Tuban, Mayangan Probolinggo, Pasongsongan Madura, Pelabuhan Paiton dan Pondok Dadap Blitar. Potensi produksi perikanan di Provinsi Jawa Timur mencapai 1.504.363,81 ton pada tahun 2015 dan meningkat mencapai 1.643.681,13 ton sampai dengan triwulan IV tahun 2018.

Tahun 2018, produksi garam nasional sebesar 70 persen ditopang dari Provinsi Jawa Timur sebesar 952.286,08 ton. Potensi produksi garam Provinsi Jawa Timur sangat tinggi cenderung stabil dan meningkat karena didukung oleh iklim tropis dengan musim kemarau efektif rata-rata 5-6 bulan setiap periodenya dan tekstur serta banyak kontur tanah di beberapa wilayah dapat didayagunakan sebagai tambak garam. Saat ini diterapkan sistem pembuatan Rumah Garam yang dapat meningkatkan efisiensi produksi garam. Lokasi rumah garam saat ini terdapat pada Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Probolinggo.

Tabel 3. 3 Produksi Perikanan Laut Provinsi Jawa Timur (Ton)

Wilayah	2015	2016	2017	s/d TW IV 2018
Utara	129.860,50	89.981,50	108.682,90	110.155,20
Selatan	273.396,40	300.287,80	305.961,60	306.536,50
Jumlah	403.256,90	390.269,30	414.644,50	416.691,60

Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur, diolah Kedeputian Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, 2019

Gambar 3. 12 Peta Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara

Sumber: Sekretariat Kebijakan Satu Peta, 2018

III.2.5. Kawasan Industri dan Kawasan Peruntukan Industri

Sektor Industri adalah salah satu potensi penyumbang perekonomian terbesar Provinsi Jawa Timur. Pembangunan Kawasan Industri di Provinsi Jawa Timur diprioritaskan pada daerah-daerah yang berada di dalam Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI). WPPI Provinsi Jawa Timur telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Jawa Timur Tahun 2019-2039. Daerah diluar WPPI yang mempunyai potensi juga tetap dipertimbangkan dan dapat dibangun kawasan industri yang bersinergi dengan WPPI yang sudah ditetapkan.

WPPI di Provinsi Jawa Timur meliputi wilayah Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Bangkalan. Disebutkan juga dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang RPIP Jawa Timur Tahun 2019-2039, terdapat WPPIP yang tersebar di beberapa wilayah seperti Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Madiun. Total penyediaan lahan saat ini untuk kawasan industri adalah sekitar 36.761,28 ha, sedangkan potensi kawasan industri baru sekitar 32.527,24 ha.

Gambar 3. 13 Peta Kawasan Industri Provinsi Jawa Timur

Sumber: Sekretariat Kebijakan Satu Peta, 2018

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Jawa Timur Tahun 2011-2031, disebutkan arahan pengembangan kawasan industri di Provinsi Jawa Timur didasarkan pada kecenderungan perkembangan lokasi kawasan peruntukan industri di Provinsi Jawa Timur saat ini dan potensi kawasan, difokuskan berhubungan dengan pangsa pasar ekspor saat ini. Pengembangan kawasan industri di Provinsi Jawa Timur saat ini dikonsentrasikan di sekitar Pantai Utara Jawa, mulai dari Kota Surabaya, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo pada kawasan Gerbangkertosusila. Industri kimia dasar yang berdampak penting terhadap pembangunan dan perkembangan wilayah, seperti industri semen, farmasi, bahan makanan serta petrokimia dapat dikonsentrasikan di sekitar wilayah Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Tuban dan Kabupaten Lamongan.

Sebagai *case study*, saat ini Industri hasil tembakau merupakan salah satu potensi terbesar yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Timur. Selama 6 tahun terakhir, yaitu tahun 2011-2017, kontribusi cukai rokok Provinsi Jawa Timur 54,66 persen terhadap nasional dengan nilai sebesar Rp. 77,4 Triliun. Rata-rata area pada 10 tahun terakhir sebesar 110.496 ha, tumbuh rata-rata 5,2 persen per tahun di 27 Kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Untuk hasil produksinya, Provinsi Jawa Timur menyediakan 66 persen dari produksi tembakau nasional pada tahun 2018.

III.2.6. Aliran Komoditas Barang dan Tata Niaga Komoditas Unggulan

Industri pengolahan merupakan salah satu kontributor utama dalam perekonomian Provinsi Jawa Timur, dimana tiap tahunnya mengalami peningkatan yang dapat dilihat pada tahun 2013 memberikan kontribusi sebesar 28,79 persen, tahun 2014 sebesar 28,95 persen, 2015 sebesar 29,28 persen 2016 sebesar 28,92 persen tahun 2017 sebesar 29,03 persen dan 2018 sebesar 29,73 persen. Industri pengolahan ini turut memberikan kontribusi terhadap penyediaan lapangan kerja.

Berdasarkan data BPS tahun 2013-2019, sekitar 76 persen pangsa industri pengolahan dikuasai oleh 5 sub sektor yaitu 31,7 persen makanan dan minuman, 26,6 persen pengolahan tembakau, 8,01 persen kimia, farmasi dan obat tradisional, 5,21 persen kertas dan barang dari kertas dan 4,68 persen kayu dan barang dari kayu. Untuk sentra produksi makanan dan minuman yang berada di Provinsi Jawa Timur terdapat di wilayah Gresik, Kediri, Malang, Mojokerto, Pasuruan, Sidoarjo, Surabaya dan Lamongan. Wilayah Jabodetabek, Jawa Tengah, Bali, Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat menjadi provinsi tujuan utama dari komoditi beras, gula, kedelai, cabai merah dan daging sapi yang termasuk dalam industri makanan minuman di Provinsi Jawa Timur. Untuk komoditi semen, *crude oil*, pupuk, barang proyek, keramik, gula pasir, minyak kelapa sawit dan beberapa komoditi lainnya (20 komoditi) didistribusikan menuju Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan Timur.

Untuk komoditas agroindustri tembakau, alur komoditas barang dari wilayah produsen terutama di sekitar wilayah Madura dan Jember dimulai dari gudang produksi di lokasi perkebunan di masing-masing kabupaten, kemudian disalurkan ke pabrik-pabrik rokok yang ada di Kabupaten Kediri, Malang dan Pasuruan serta pabrik rokok kecil di sekitarnya. Produk rokok yang sudah diolah kemudian dipasarkan di Provinsi Jawa Timur, khususnya di Kota Surabaya dan sebagian besar dipasarkan secara nasional melalui Jalur Tol Koridor Tengah Pulau Jawa, dan pelabuhan di Tanjung Perak dan sekitarnya. Komoditas agroindustri lainnya juga memiliki garis besar alur produksi dan tata niaga yang sama dengan komoditas tembakau, yang membedakan adalah pada lokasi perkebunan dan industri pengolahan yang sebagian besar tidak jauh dari lokasi perkebunan.

Gambar 3. 14 Alur Komoditas Provinsi Jawa Timur

Sumber: Bank Indonesia, diolah Sekretariat Kebijakan Satu Peta, 2019

III.2.7. Aliran Komoditas Barang Produk Industri Pengolahan

Untuk mendukung perkembangan perekonomian di Provinsi Jawa Timur juga perlu diprioritaskan pada industri yang berorientasi pada ekspor. Komoditas ekspor terbagi atas 2 kelompok, yaitu migas dan non migas. Pada bulan Maret 2019, ekspor migas Provinsi Jawa Timur adalah 4,16 persen, sedangkan non migas mencapai 95,84 persen.

Berdasarkan data Bank Indonesia tahun 2019, komoditas produk barang perhiasan/permata saat ini menjadi komoditas ekspor non migas utama dengan nilai sebesar USD 315,20 juta. Komoditas ini paling banyak diekspor ke Hongkong dengan nilai USD 77,68 juta. Peringkat kedua yang terbanyak diekspor Provinsi Jawa Timur adalah produk lemak dan hewan nabati yang menyumbang nilai ekspor USD 123,59. Produk ini menyumbang sekitar 7,14 persen dari total ekspor non migas dan utamanya dikirim ke Tiongkok dengan nilai USD 51,97 Juta. Produk barang peringkat ketiga adalah Tembaga dengan nilai ekspor sebesar USD 117,44 Juta.

Produk barang ini menyumbang sekitar 6,78 persen dari total ekspor non migas pada Bulan Maret 2019 dan utamanya diekspor ke Vietnam sebesar USD 28,99 Juta. Barang-barang lainnya yang menjadi produk ekspor dari Provinsi Jawa Timur adalah kayu dan barang dari kayu, bahan kimia organik, ikan dan udang, kertas/karton, produk kimia, mesin/peralatan listrik, daging dan ikan olahan serta barang lainnya. Namun begitu, komoditas seperti tembaga sebagian besar dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan nasional, selain untuk diekspor. Hampir keseluruhan alur logistik ekspor komoditas tersebut dikirim melalui simpul logistik Pelabuhan Tanjung Perak dan sekitarnya.

Jika dilihat menurut negara tujuan utama ekspor non migas, yang terbesar pada bulan Januari-Maret 2019 adalah Amerika Serikat yang mencapai USD 651,61 Juta (13,54 persen), disusul berikutnya diekspor ke Jepang sebesar USD 649,37 Juta (13,50 persen) dan ke Tiongkok sebesar USD 502,29 Juta (10,44 persen). Ekspor non migas ke kawasan ASEAN mencapai USD 937,19 juta (19,48 persen) dan ke Uni Eropa mencapai USD 410,95 Juta (8,54 persen).

III.2.8. Kegiatan Ekonomi Lainnya

Pembangunan wilayah Provinsi Jawa Timur tidak hanya didukung oleh kegiatan ekonomi prioritas, namun juga ada kegiatan ekonomi lainnya yang mendukung pertumbuhan perekonomian, salah satunya pertambangan mineral, pertambangan minyak dan gas bumi, serta potensi panas bumi/geothermal. Provinsi Jawa Timur memiliki potensi pertambangan mineral logam dan mineral bukan logam, dimana untuk mineral logam, diantaranya adalah pasir besi, emas dan mineral pengikutnya, dan mangan. Potensi pertambangan mineral bukan logam yang dianggap potensial meliputi bentonite, phiropilit, feldspar, zeolite, kaolin, toseki, pasir/sirtu dan pasir kwarsa. Pertambangan di Provinsi Jawa Timur tersebar di beberapa Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), yaitu WUP Batubara yang meliputi wilayah Trenggalek, Pacitan dan Tulungagung; WUP Logam yang meliputi wilayah Banyuwangi, Jember, Lumajang, Malang, Trenggalek, Tulungagung dan Pacitan. Untuk WUP Non Logam tersebar hampir di seluruh Kabupaten di Provinsi Jawa Timur yaitu wilayah Banyuwangi, Situbondo, Pacitan, Bojonegoro, Nganjuk, Tuban, Jombang, Lamongan, Bangkalan, Sampang, Pemekasan dan Sumenep.

Gambar 3. 15 Peta Sumberdaya Mineral dan Batubara

Sumber: Sekretariat Kebijakan Satu Peta, 2018

Provinsi Jawa Timur memiliki beberapa potensi sumber energi, salah satunya adalah minyak dan gas bumi serta panas bumi. Provinsi Jawa Timur memiliki kawasan pertambangan minyak dan gas bumi, terdapat 33 blok migas 6 dikembalikan, yang berstatus produksi sebanyak 18 wilayah kerja, status eksplorasi sebanyak 12 wilayah kerja dan status *development* sebanyak 3 wilayah kerja. Selain minyak dan gas bumi, juga dimiliki potensi panas bumi atau *geothermal* yang merupakan salah satu sumber energi yang relatif ramah lingkungan dan salah satu energi alternatif. Potensi panas bumi di wilayah Provinsi Jawa Timur berada pada lokasi yang berdekatan dengan gunung aktif, diantaranya berada di Kabupaten Ngawi, Magetan, Pacitan, Ponorogo, Madiun, Nganjuk, Kediri, Tulungagung, Trenggalek, Madiun, Bojonegoro, Jember, Banyuwangi, Situbondo, Blitar, Gresik, dan Kabupaten Tuban.

Selain industri yang telah disebutkan sebelumnya, industri alas kaki bisa dipertimbangkan menjadi salah satu sektor strategis yang dapat memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional. Indonesia merupakan salah satu eksportir alas kaki terbesar ke-5 di dunia setelah China, India, Vietnam dan Brazil. Bahkan untuk peningkatan ekspor alas kaki Indonesia melebihi pertumbuhan nilai ekspor dunia yang menunjukkan bahwa kualitas produk dalam negeri memiliki daya saing diatas rata-rata. Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu sentra produksi alas kaki di Indonesia terutama alas kaki yang berbahan dasar kulit yang memiliki pangsa pasar ekspor utama ke Eropa.

Meskipun pangsa industri alas kaki Provinsi Jawa Timur masih relatif kecil, namun memiliki tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi. Pada tahun 2017, pertumbuhan industri alas kaki Provinsi Jawa Timur mencapai 13,82 persen (*yoy*), jauh melebihi pertumbuhan industri manufaktur Provinsi Jawa Timur yang hanya mencapai 5,69 persen (*yoy*). Meskipun memiliki kontribusi yang rendah terhadap PDRB, yang kurang dari 1 persen, namun industri alas kaki bersifat padat karya yang menyerap sekitar 6 persen tenaga kerja. Industri lainnya yang menyerap tenaga kerja yang serupa dengan industri alas kaki adalah industri *furniture* dengan serapan tenaga kerja 5-6 persen di Provinsi Jawa Timur.

III.3 Kondisi Infrastruktur, Konektivitas, dan Sistem Logistik di Provinsi Jawa Timur

Pembangunan infrastruktur di Provinsi Jawa Timur tumbuh pesat dengan adanya 25 Proyek Strategis Nasional (PSN) yang tertuang di dalam Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dengan nilai investasi sebesar Rp. 460,9 Triliun. Dari 10 proyek jalan, baik jalan tol, *fly over*, maupun *double track* terdapat 6 proyek yang sudah beroperasi. Diantaranya Jalan Tol Pandaan – Malang, Jalan Tol Solo – Ngawi, Jalan Tol Ngawi – Kertosono, Jalan Tol Kertosono – Mojokerto, dan Jalan Tol Pasuruan – Probolinggo. 4 proyek lainnya masih dalam proses konstruksi yaitu Jalan Tol Probolinggo – Banyuwangi, Jalan Tol Krian – Legundi – Bunder – Manyar, Pembangunan *Fly Over* Teluk Lamong, dan *Double Track* Jawa Selatan.

Gambar 3. 16 Peta Lokasi Proyek Strategis Nasional Provinsi Jawa Timur

Sumber: Sekretariat Kebijakan Satu Peta, 2018

Selain itu, terdapat 3 proyek yang masih dalam tahap penyiapan yaitu Kereta Api Semi Cepat Jakarta – Surabaya, Bandara Kendiri, dan Ekspansi Kilang Minyak Tuban. Kemudian terdapat 12 proyek lainnya yang masih dalam tahap konstruksi seperti pembangunan bangunan, kawasan industri *Java Integrated Industrial Port Estate* (JIIPE), Pembangunan pembangkit listrik dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Bromo – Tengger – Semeru. PSN merupakan bagian dari pengembangan infrastruktur yang ditujukan untuk mengembangkan kawasan prioritas dan kawasan pendukung di Provinsi Jawa Timur. Ketentuan yang berlaku terhadap proyek-proyek PSN yang terdapat di Provinsi Jawa Timur akan juga mendapatkan perlakuan yang sama dengan proyek-proyek yang terlampir dalam RIPPE Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya – Sidoarjo – Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger – Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan.

Dari 25 PSN yang terdapat di Provinsi Jawa Timur, terdapat 4 (empat) proyek yang termasuk ke dalam Proyek Infrastruktur Prioritas berdasarkan Permenko Perekonomian Nomor 5 .Tahun 2017 tentang Percepatan Penyiapan Infrastruktur Prioritas, antara lain:

a. Jalan Tol Probolinggo – Banyuwangi;
b. Kilang Minyak Tuban (ekspansi);
c. Pengembangan Lapangan Unitasi Gas Jambaran – Tiung Biru; dan
d. PLTSa Kota Surabaya.

Tabel 3. 4 Daftar Proyek Strategis Nasional Provinsi Jawa Timur

No.	Proyek Strategis Nasional	No.	Proyek Strategis Nasional	No.	Proyek Strategis Nasional
1.	Jalan Tol Pandaan – Malang (37,63 km)	10.	Double Track Jawa Selatan	19.	Bendungan Tukul
2.	Jalan Tol Solo – Ngawi (90,1 km)x	11.	Kereta Api Jakarta - Surabaya	20.	Bendungan Tugu
3.	Jalan Tol Ngawi – Kertosono (87 km)	12.	Bandara Kediri	21.	Bendungan Semantok
4.	Jalan Tol Kertosono – Mojokerto (40,5 km)	**13.**	**Kilang Minyak Tuban (ekspansi)**	22.	Bendungan Bagong
5.	Jalan Tol Gempol – Pasuruan (34,2 km)	**14.**	**Pengembangan Lapangan Unitisasi Gas Jambaran – Tiung Biru**	23.	Kawasan Industri Java Integrated Industrial Port Estate (JIIPE), Gresik

No.	Proyek Strategis Nasional	No.	Proyek Strategis Nasional	No.	Proyek Strategis Nasional
6.	Jalan Tol Pasuruan – Probolinggo (45 km)	**15.**	**PLTSa Surabaya**	24.	KSPN Bromo – Tengger – Semeru
7.	**Jalan Tol Probolinggo – Banyuwangi (170,4 km)**	16.	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan	25.	PLTGU Grati
8.	Jalan Tol Krian – Legundi – Bunder – Manyar (38,3 km)	17.	Bendungan Bendo		
9.	Pembangunan *Fly Over* dari dan menuju Terminal Teluk Lamong (2,4 km)	18.	Bendungan Gongseng		

Sumber: Perpres Nomor 56 Tahun 2018

Dari sisi infrastruktur, Provinsi Jawa Timur telah didukung oleh keberadaan system jaringan jalan nasional, jalan tol, kereta api, bandara, pelabuhan serta bendungan yang mampu untuk mendukung pusat-pusat pertumbuhan baru. Provinsi Jawa Timur dilalui oleh beberapa jaringan jalan nasional dan jalan strategis nasional, salah satunya adalah Jalan Lintas Pantai Selatan (Pansela) Provinsi Jawa Timur yang menghubungkan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur bagian selatan dari Kabupaten Pacitan hingga Kabupaten Banyuwangi. Pembangunan *Double Track* dan Reaktivasi Jalur KA, Pengembangan Pelabuhan Paciran (Lamongan), dan Rencana Pengembangan Pelabuhan Probolinggo juga menjadi salah satu proyek strategis nasional yang ada di Provinsi Jawa Timur. Diperlukan upaya penguatan konektivitas antara pusat pertumbuhan dengan infrastruktur Provinsi Jawa Timur untuk mendukung percepatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

Gambar 3. 17 Peta Transportasi Provinsi Jawa Timur

Sumber: Sekretariat Kebijakan Satu Peta, 2018

Sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur, pembangunan pusat ekonomi dan infrastruktur telah dilaksanakan dengan cukup pesat dalam 5 tahun terakhir. PSN di Provinsi Jatim yang masih berlangsung pada triwulan II 2019 mencakup Jalan Tol Pandaan – Malang (37,62 km), Jalan Tol Pasuruan – Probolingo (45 km), Jalan Tol Probolinggo – Banyuwangi (170,4 km), Jalan Tol Krian – Legundi – Bunder – Manyar (38,3 km), *Fly Over* Terminal Teluk Lamong (2,4 km), jalur *double track* Jawa Selatan, Kereta Api Jakarta – Surabaya, pembangunan Bandara Kediri, ekspansi kilang minyak Tuban, pengembangan Lapangan Unitisasi Gas Jambaran-Tiung Biru, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan serta pembangunan beberapa bendungan yaitu Bendungan Bendo, Gongseng, Tukul, Tugu, Semantok dan Bagong.

Gambar 3. 18 Peta Lokasi Infrastrruktur Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur

Sumber: Sekretariat Kebijakan Satu Peta, 2018

Kondisi infrastruktur sanitasi seperti Tempat Pembuangan Akhir (TPA), Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL), dan Instalasi Pembuangan Lumpur Tinja (IPLT) di Provinsi Jawa Timur sebagian besar sudah tersebar hampir di seluruh wilayah Kabupaten/Kota, namun masih terdapat beberapa Kabupaten/Kota yang belum memiliki infrastruktur, seperti: TPA, IPAL, maupun IPLT. Provinsi Jawa Timur menjadikan sanitasi sebagai salah satu fokus pembangunan.

Gambar 3. 19 Peta Lokasi Utilitas Provinsi Jawa Timur

Sumber: Sekretariat Kebijakan Satu Peta, 2018

Keberadaan jalur Pantura menjadikan wilayah tersebut sebagai jalur utama dalam proses distribusi barang dan sebagai salah satu lintas utama koridor perekonomian nasional yang berperan besar dalam mendorong industri barang dan jasa nasional. Kehadiran Jalan Tol Ngawi – Kertosono juga menjadi alasan untuk meningkatkan efisiensi barang dan jasa yang masuk maupun keluar Provinsi Jawa Timur. Sistem logistik dan keberadaan infrastruktur transparan merupakan pilar pendukung untuk penguatan konektivitas di Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan Tatanan Transportasi Wilayah Provinsi Jawa Timur, pengembangan sistem transportasi termasuk logistik di Provinsi Jawa Timur diorientasikan pada upaya penyeimbangan antara permintaan jasa transportasi dengan penyediaan jaringan prasarana dan pelayanan transportasi dengan mengintegrasikan dan mengkombinasikan moda yang ada, baik transportasi jalan, kereta api, sungai dan danau, penyeberangan, laut, dan udara, maupun pipa, sesuai dengan potensi wilayah. Ditinjau dari posisi geografis Provinsi Jawa Timur berperan sebagai simpul logistik Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan sekitar 70 persen kapal melintas di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) menunjukkan posisi strategis logistik Provinsi Jawa Timur.

Gambar 3. 20 Peta Lokasi Ketenagalistrikan Provinsi Jawa Timur

Sumber: Sekretariat Kebijakan Satu Peta, 2018

Kondisi sistem logistik Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019 telah cukup memadai. Adapun demikian, mengingat kegiatan produksi baik sektor industri maupun sektor agraris berlokasi (secara simpul logistik) terpusat di sekitar Gerbangkertosusila, maka diperlukan strategi pengembangan untuk memeratakan pengembangan wilayah sekaligus membagi muatan logistik ke wilayah *hinterland* dari Surabaya. Pelabuhan di sekitar Gerbangkertosusila berupa Pelabuhan Tanjung Perak dan sekitarnya didukung dengan Pelabuhan Probolinggo dan Pelabuhan *Lamongan Integrated Shorebase* (LIS). Dengan adanya pengembangan industri manufaktur di sekitar Pantura (Tuban, Lamongan, Gresik), terdapat pengembangan Terminal Khusus yang terpadu dengan indusri. Sedangkan wilayah Pansela Provinsi Jawa Timur dengan prospek pengembangan setelah nantinya jadi Jalan Pansela / JLS serta pengembangan koneksi dengan Australia perlu diperkuat dengan pengembangan satu atau beberapa Pelabuhan, salah satunya Pelabuhan Gelon.

Gambar 3. 21 Peta Jalan Provinsi Jawa Timur

Sumber: Sekretariat Kebijakan Satu Peta, 2018

Dengan telah beroperasinya Jalan Tol Koridor Tengah Jawa, Jalan Tol Surabaya-Malang, dan Jalan Tol Pasuruan-Probolinggo, yang belum diiringi dengan tumbuhnya arus barang dari sektor industri maupun agro, saat ini masih terdapat kekurangan kapasitas yang masih menjadi prospek investasi pengembangan ekonomi Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan proyeksi masa depan dengan prospek pengembangan industri dan komoditas agro di Provinsi Jawa Timur, maka untuk dapat menciptakan daya saing diperlukan pengembangan jalur kereta api barang dan *dryport*. Selain itu, dengan tumbuhnya pusat pertumbuhan baru di Koridor Tuban-Bojonegoro, Tulungagung-Trenggalek, Kepanjen (Malang), dan Lumajang-Jember maka diproyeksikan adanya kebutuhan jalan tol baru terutama berupa jalan sirip yang menghubungkan Utara-Selatan di Provinsi Jawa Timur. Sedangkan di wilayah kepulauan saat ini juga masih kurang terlayani dengan prasarana dan sarana konektivitas dan logistik, sehingga perlu untuk mengembangkan *linkage* logistik seiring dengan dikembangkannya prospek pariwisata dan perikanan di wilayah kepulauan.

Namun mengingat tingginya biaya logistik di Provinsi Jawa Timur disebabkan oleh pola distribusi yang terlalu panjang. Biaya logistik yang belum efisien, antara lain disebabkan ole: *Pertama*, beban antar moda yang tidak berimbang, sehingga masih terjadi penumpukan *"heavy loaded"* pada transportasi jaringan jalan dan belum berkembangnya moda-moda transportasi lainnya. *Kedua*, kondisi prasarana transportasi yang belum siap untuk mendukung sistem transportasi multimoda. *Ketiga*, *transshipment* yang eksesif menyebabkan transportasi intermoda tidak berjalan secara ideal, terutama disebabkan interkoneksi antar moda dan manajemen sistem transportasi multimoda yang belum optimal.

BAB IV
KAWASAN PRIORITAS DAN KAWASAN PENDUKUNG DALAM KONTEKS PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI DI PROVINSI JAWA TIMUR

IV.1. Kawasan Prioritas dan Kawasan Pendukung di Provinsi Jawa Timur

Provinsi Jawa Timur memiliki kondisi yang baik di bidang ekonomi dan sosial budaya. Untuk mendorong pertumbuhan di tiap-tiap kawasan, diperlukan pendekatan yang sesuai dengan karakteristik tiap-tiap kawasan. Guna mengoptimasi konektivitas infrastruktur dan pusat pertumbuhan, pendekatan yang dipergunakan akan bergantung pada seberapa jauh infrastruktur dan pusat pertumbuhan di masing-masing kawasan prioritas telah terbangun. Untuk mendukung percepatan pembangunan kawasan prioritas, kawasan pendukung juga perlu menjadi fokus dalam konteks pemerataan pembangunan di Provinsi Jawa Timur. Arah pengembangan kawasan pendukung ini dilakukan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah khususnya di wilayah itu sendiri. Penguatan pengembangan kawasan prioritas dengan didorong oleh kawasan pendukung ini, diharapkan dapat menunjang pengembangan kawasan prioritas agar lebih optimal serta menciptakan kesejahteraan dan memajukan pemerataan ekonomi.

Terdapat dua pendekatan yang akan diterapkan dalam percepatan pembangunan ekonomi Provinsi Jawa Timur, yaitu pendekatan untuk pusat pertumbuhan yang telah ada dan pendekatan pengembangan pusat pertumbuhan baru. Pendekatan pusat pertumbuhan yang telah ada memerlukan penguatan infrastruktur, dilakukan pada kawasan-kawasan yang sudah memiliki pusat-pusat ekonomi terbangun, yang dapat ditingkatkan kontribusinya melalui penambahan infrastruktur. Pendekatan ini diterapkan untuk:

a. Kawasan Prioritas Gerbangkertosusila, meliputi Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Jombang, Kabupaten Bojonegoro, dan Kabupaten Tuban dengan fokus pada bidang industri, khususnya yang bersifat *capital-intensive* serta memerlukan Sumber Daya Manusia (SDM) terdidik dan terlatih, dan *hub* arus barang dan orang. Kawasan Prioritas Gerbangkertosusila didorong dengan pengembangan kawasan pendukung yaitu Kawasan Pendukung Madura dan Kepulauan. Kawasan Pendukung Madura dan Kepulauan, meliputi Kabupaten Sampang, Pamekasan, dan Sumenep dengan fokus pengembangan pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan, pengelolaan energi, dan pariwisata;

b. Kawasan Prioritas Bromo-Tengger-Semeru, meliputi Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Malang, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Probolinggo, Kota Pasuruan, Kota Batu, Kota Malang, dan Kota Probolinggo dengan fokus utama pada sektor pariwisata, dan agroproduksi dan agroindustri. Kawasan Prioritas Bromo-Tengger-Semeru didorong dengan pengembangan Kawasan Pendukung Selingkar Ijen. Kawasan Pendukung Selingkar Ijen, meliputi Kabupaten Jember, Banyuwangi, Bondowoso, dan Situbondo dengan fokus pengembangan pada sektor pariwisata, pertanian, dan perkebunan; dan

c. Kawasan Prioritas Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan, meliputi Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Kabupaten Nganjuk, Kota Blitar, Kabupaten Blitar, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Madiun, Kota Madiun, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Trenggalek, dan Kabupaten Pacitan dengan fokus utama agroproduksi dan agroindustri, serta sektor pariwisata.

Gambar 4. 1 Peta Kawasan Prioritas dan Kawasan Pendukung Provinsi Jawa Timur

Sumber: BAPPEDA Provinsi Jawa Timur, diolah Sekretariat Kebijakan Satu Peta, 2019

IV.2. Kawasan Prioritas Gerbangkertosusila dan Kawasan Pendukung Madura dan Kepulauan

IV.2.1 Kawasan Prioritas Gerbangkertosusila

IV.2.1.1 Gambaran Umum Kawasan Prioritas Gerbangkertosusila

A. Geografi Wilayah

Kawasan Prioritas Gerbangkertosusila merupakan bentuk wilayah dari segi nodalitas (titik) dimana wilayah yang secara fungsional mempunyai ketergantungan antara kawasan pusat (inti) dan kawasan penyangganya (*hinterland*). Kawasan Prioritas Gerbangkertosusila terdiri dari 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kota Mojokerto dan Kota Surabaya. Luas Kawasan Prioritas Gerbangkertosusila yang terdiri dari 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota adalah sekitar 10.841,99 km^2 dengan luas Kabupaten/Kota yang tertinggi berada di Kabupaten Bojonegoro, dan terendah di Kota Mojokerto.

Gambar 4. 2 Peta Kawasan Prioritas Gerbangkertosusila

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Timur, 2019 dan Sekretariat Kebijakan Satu Peta, 2018

Tabel 4. 1 Luas Wilayah Menurut Kabupaten/Kota di Kawasan Prioritas Gerbangkertosusila

No	Kota/Kabupaten	Ibukota Kabupaten/Kota	Luas (km²)
1	Kabupaten Sidoarjo	Sidoarjo	634,38
2	Kabupaten Mojokerto	Mojosari	717,83
3	Kabupaten Jombang	Jombang	1.115,09
4	Kabupaten Bojonegoro	Bojonegoro	2.198,79
5	Kabupaten Tuban	Tuban	1.834,15
6	Kabupaten Lamongan	Lamongan	1.782,05
7	Kabupaten Gresik	Gresik	1.191,25

No	Kota/Kabupaten	Ibukota Kabupaten/Kota	Luas (km²)
8	Kabupaten Bangkalan	Bangkalan	1.001,44
9	Kota Mojokerto	Mojokerto	16,47
10	Kota Surabaya	Surabaya	350,54
Gerbangkertosusila			1.0841,99

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019

Berdasarkan hasil analisis, rata-rata untuk kondisi ketinggian tanah/topografi Kawasan Prioritas Gerbangkertosusila berkisar kurang dari 50 meter diatas permukaan laut sehingga topografinya masuk ke dalam kategori datar.

Gambar 4. 3 Peta Topografi Kawasan Gerbangkertosusilo

Sumber: Sekretariat Kebijakan Satu Peta, 2018

Bencana alam yang mungkin terjadi di Kawasan Prioritas Gerbangkertosusila adalah bencana gempa bumi dengan tingkat kerawanan bencana sangat rendah hingga menengah, serta di sekitar Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Mojokerto terdapat potensi rawan bencana gunung api.

Gambar 4. 4 Peta Kebencanaan Kawasan Prioritas Gerbangkertosusila

Sumber: Sekretariat Kebijakan Satu Peta, 2018

B. Kependudukan dan Sosial Budaya

Jumlah penduduk total di Kawasan Prioritas Gerbangkertosusila pada tahun 2018 adalah sekitar 13.481.000 jiwa, dengan jumlah penduduk dan kepadatan penduduk tertinggi berada di Kota Surabaya, yaitu 2.886.000 jiwa yang kemudian disusul dengan Kabupaten Sidoarjo sekitar 2.217.000 jiwa. Namun untuk laju pertumbuhan penduduk per tahun tertinggi berada di Kabupaten Sidoarjo dengan nilai 1,65. Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi di Kabupaten Sidoarjo merupakan dampak dari fungsi Kabupaten Sidoarjo yang menjadi penyangga Kota Surabaya, yaitu selain menjadi ibukota Provinsi Jawa Timur juga mempunyai fungsi kawasan sebagai pusat bisnis, perdagangan dan jasa. Hal tersebut menjadikan Kota Surabaya memiliki jumlah penduduk tertinggi dan kepadatan penduduk tertinggi di Kawasan Prioritas Gerbangkertosusila, sedangkan untuk jumlah penduduk terendah di Kawasan Prioritas Gerbangkertosusila adalah di Kota Mojokerto dengan jumlah penduduk sekitar 128.000 jiwa.

Tabel 4. 2 Kondisi Kependudukan di Kawasan Prioritas Gerbangkertosusila

Wilayah	Jumlah Penduduk Tahun 2018 (ribu)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun (2010-2018)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km²)	Kelas Penduduk Miskin	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Sidoarjo	2.217	1,65	3.494,75	Tinggi	Tinggi
Kabupaten Mojokerto	1.109	0,98	1.544,93	Sedang	Tinggi
Kabupaten Jombang	1.259	0,57	1.129,06	Sedang	Tinggi
Kabupaten Bojonegoro	1.247	0,38	567,13	Sedang	Sedang
Kabupaten Tuban	1.168	0,54	636,81	Rendah	Sedang
Kabupaten Lamongan	1.189	0,10	667,21	Rendah	Tinggi
Kabupaten Gresik	1.299	1,23	1.090,45	Rendah	Tinggi
Kabupaten Bangkalan	979	0,95	977,59	Sedang	Sedang
Kota Mojokerto	128	0,80	7.771,71	Tinggi	Tinggi
Kota Surabaya	2.886	0,53	8.233,01	Tinggi	Tinggi
Gerbangkertosusila	13.481	0,78	2.611,27	Sedang	Tinggi

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019

Gambar 4. 5 Peta Kepadatan Penduduk (kiri) dan Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2010-2018 (kanan) di Kawasan Prioritas Gerbangkertosusila

Sumber: Sekretariat Kebijakan Satu Peta, 2018

Apabila dilihat dari tingkat kemiskinan, Kawasan Prioritas Gerbangkertosusila termasuk dalam kategori kelas penduduk miskin yang sedang. Berdasarkan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pembangunan manusia di Kawasan Prioritas Gerbangkertosusila terus mengalami kemajuan dengan rata-rata nilai IPM di Kawasan Prioritas Gerbangkertosusila yang masuk dalam kategori tinggi, kecuali untuk Kabupaten Tuban, Bojonegoro, dan Bangkalan yang masuk dalam kategori sedang. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk).

Gambar 4. 6 Peta Sebaran Kemiskinan (kiri) dan Indeks Pembangunan Manusia (kanan) di Kawasan Prioritas Gerbangkertosusila

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, diolah Sekretariat Kebijakan Satu Peta, 2019

Kondisi sosial budaya penduduk yang berada di Kawasan Prioritas Gerbangkertosusila rata-rata didominasi dengan karakteristik masyarakat kota di wilayah Surabaya dan sekitarnya. Kualitas sumber daya manusia di Kawasan Prioritas Gerbangkertosusila sudah terfasilitasi dengan adanya sarana pendidikan yang cukup memadai berupa pendidikan secara formal di tingkat pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Tetapi hal tersebut belum sepenuhnya mencukupi upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia apabila dibandingkan dengan laju pertumbuhan industri di Kawasan Prioritas Gerbangkertosusila. Hal ini tergambarkan melalui Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), 7 (tujuh) Kabupaten/Kota di kawasan ini termasuk 10 (sepuluh) daerah dengan nilai persentase TPT tertinggi di Provinsi Jawa Timur. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia agar terserap oleh industri yang ada dan dapat menjawab tantangan Revolusi Industri 4.0 serta peningkatan kewirausahaan, dibutuhkan upaya peningkatan kualitas sarana pendidikan berupa SMK dan politeknik untuk mendukung penyiapan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh industri di Kawasan Prioritas Gerbangkertosusila. Pada kawasan ini Program dan kegiatan yang mementingkan peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia lebih diutamakan daripada program dan kegiatan yang bersifat peningkatan materi. Hal itu dikarenakan masyarakat di wilayah ini cenderung mempunyai sifat yang mandiri dan tidak ada ketergantungan dengan pihak manapun sehingga beberapa Industri Kecil Menengah atau Usaha Mikro Kecil Menengah tumbuh di wilayah ini.

C. Sektor dan Komoditas Unggulan

Kawasan Prioritas Gerbangkertosusila menjadi kontributor lebih dari 50 persen ekonomi di Provinsi Jawa Timur. Sektor potensial di Kawasan Prioritas Gerbangkertosusila adalah sektor industri manufaktur, makanan minuman, dan industri lainnya. Sektor industri di Kawasan Prioritas Gerbangkertosusila termasuk cepat tumbuh dikarenakan adanya akses kemudahan alur logistik barang yang didukung oleh transportasi darat, laut dan udara. Transportasi udara di Kawasan Prioritas Gerbangkertosusila diantaranya adanya Bandara Internasional Juanda, untuk transportasi laut yaitu Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Kamal (Kabupaten Bangkalan), Pelabuhan Gresik (Kabupaten Gresik), dan lain-lain. Sedangkan untuk transportasi darat didukung oleh jalur kereta api dan beberapa stasiun besar, jalan tol, jalan *bypass*, dan jalan lingkar. Selain sektor industri, adanya potensi sektor pariwisata di Kabupaten Mojokerto serta agropolitan di Kabupaten Tuban juga perlu mendapat perhatian. Komoditas unggulan yang berada di Kawasan Prioritas Gerbangkertosusila cukup beragam, diantaranya dari sektor pertanian, perkebunan maupun peternakan dan perikanan.

Gambar 4. 7 Peta Komoditas Unggulan di Kawasan Prioritas Gerbangkertosusila

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Timur, diolah Sekretariat Kebijakan Satu Peta, 2019

IV.2.1.2 Potensi dan Tantangan

Pengembangan potensi di Kawasan Prioritas Gerbangkertosusila yang utama adalah berbasis industri. Kawasan industri yang besar dan berkembang di Kawasan Prioritas Gerbangkertosusila diantaranya adalah *Java Integrated Industrial and Port Estate* (JIIPE). Dukungan infrastuktur yang sudah ada di Kawasan Prioritas Gerbangkertosusila diantaranya dukungan Bandara, Pelabuhan, Stasiun Kereta Api, Terminal. Selain itu terdapat investasi Proyek Strategis Nasional (PSN) yaitu ekspansi Kilang Minyak Tuban senilai Rp. 200 Triliun. Potensi untuk pembangkit listrik energi terbarukan juga ada di Kawasan Prioritas Gerbangkertosusila. Selain dari segi infrastruktur dan kondisi ekonomi saat ini, dalam mendukung kegiatan industri yaitu kemudahan dari aspek ketenagakerjaan yaitu tersedianya Sumber Daya Manusia yang cukup dan berkompeten.

Namun tantangan dalam mencapai tujuan pengembangan Kawasan Prioritas Gerbangkertosusila adalah penyediaan air bersih, pengolahan limbah industri, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan sistem logistik barang dan jasa. Selain itu persentase penduduk miskin di Kawasan Prioritas Gerbangkertosusila perlu diatasi.

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Bangkalan sebesar 19,6 persen, Kabupaten Tuban 15,3 persen, dan Kabupaten Lamongan 13,8 persen (BPS Provinsi Jawa Timur, 2019) sehingga perlu ditingkatkan untuk kesejahteraan masyarakat miskin pada wilayah tersebut perlu peningkatan kualitas maupun kuantitas kawasan perumahan dan permukiman baik pembangunan secara swadaya maupun oleh pengembang. Secara umum tantangan yang dihadapi adalah kurang optimalnya pengembangan industri pengolahan untuk meningkatkan input sektor agropolitan dan memberikan nilai tambah pada transaksi di sektor perdagangan serta belum optimalnya *supply* energi ketenagalistrikan di Gerbangkertosusila.

IV.2.1.3 Penguatan Konektivitas

Penguatan konektivitas dan aksesibilitas diarahkan untuk pengembangan infrastruktur meliputi pembangunan transportasi publik Kawasan Prioritas Gerbangkertosusila (*Surabaya Regional Railway Line* dan LRT Surabaya), pengembangan Bandara Internasional Juanda, pembangunan jalan tol ruas Waru (Aloha) – Wonokromo – Tanjung Perak, ruas Ngawi – Bojonegoro – Tuban – Lamongan – Manyar, ruas Gempol - Mojokerto, dan rehabilitasi dan peningkatan Jalan Nasional Arteri Primer.

Gambar 4. 8 Peta Konektivitas dan Keterkaitan antar Pusat Kegiatan di Kawasan Prioritas Gerbangkertosusila

Sumber: Sekretariat Kebijakan Satu Peta, 2019

Selain itu pembangunan dermaga, fasilitas *break water*, jalur akses utama dan jalur akses terminal pada pelabuhan-pelabuhan maupun kawasan yang dimanfaatkan untuk kegiatan industri diantaranya adalah Pembangunan Pelabuhan Tanjung Bulupandan, pembangunan *flyover* dan jalur KA menuju Pelabuhan Teluk Lamong, pembangunan jalan tol Bandara Juanda – Pelabuhan Tanjung Perak, pembangunan jalan tol menuju Pelabuhan Tanjung Bulupandan, dll. Penyediaan pembangkit listrik energi terbarukan berupa PLTG (Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap) di JIIPE, dan pembangunan PLTSa (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah) di Kabupaten Sidoarjo. Penyediaan air bersih dengan pembangunan SPAM dan pembangunan Bendung Gerak Karangnongko di Kabupaten Bojonegoro. Selain itu untuk pengendalian banjir diantaranya adalah pengendalian banjir Kali Lamong, dan Sungai Buntung, serta peningkatan kapasitas tampungan *floodway* Lamongan.

Dari sisi sistem perkotaan, Kawasan Prioritas Gerbangkertosusila yang mempunyai peran sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang meliputi kawasan Perkotaan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan. Selain itu untuk Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) berada di Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban, serta Pusat Kegiatan Lokal (PKL) berada di Kabupaten Jombang.

IV.2.1.4 Tema Pembangunan Kawasan Prioritas

Pengembangan Kawasan Prioritas Gerbangkertosusila mempunyai tema sebagai Pendorong Industri dan Jasa Nasional. Tema yang digunakan untuk pembangunan kawasan prioritas Gerbangkertosusila tersebut dilihat dari kondisi ekonomi saat ini yang memberikan kontribusi paling tinggi di Provinsi Jawa Timur.

Kawasan Prioritas Gerbangkertosusila merupakan Pusat Pertumbuhan Ekonomi yang berbasis Industri Manufaktur, Perdagangan dan Jasa. Percepatan Pembangunan Ekonomi di kawasan ini difokuskan pada upaya mendorong investasi ke industri yang menghasilkan produk-produk berteknologi menengah-atas agar dapat menambahkan nilai tambah produk ekspor. Industri dengan teknologi ini merupakan industri yang bersifat capital intensif, yang didukung Sumber Daya Manusia Unggul, Infrastruktur Handal, dan Ramah Lingkungan.

IV.2.1.5 Strategi Percepatan Pembangunan Kawasan Prioritas Gerbangkertosusila

Percepatan pembangunan kawasan prioritas Gerbangkertosusila perlu dilihat dari sektor industri, khususnya yang bersifat *capital-intensive*, dan untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) terdidik dan terlatih, serta *hub* arus barang dan orang demi mewujudkan tema pembangunan kawasan prioritas Gerbangkertosusila sebagai pendorong industri dan jasa nasional, diperlukan strategi dengan pendekatan melalui aspek sosial, ekonomi dan infrastruktur, yang meliputi:

a. Aspek Sosial, meliputi Pembentukan kerjasama antar dinas terkait dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan peningkatan pemahaman pola hidup sehat di masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga; Peningkatan sarana dan prasarana serta kurikulum pendidikan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan peningkatan akses layanan pendidikan terhadap masyarakat di daerah terpencil; Pengembangan program penanggulangan kemiskinan yang terpadu lintas dan antarsektor; dan Perluasan lapangan pekerjaan yang mampu menyerap tenaga kerja lokal secara optimal;

b. Aspek Ekonomi, meliputi Pengembangan Kawasan Industri yang telah ada serta pembangunan Kawasan Industri baru sehingga meningkatkan input sektor agro serta memberikan nilai tambah pada transaksi di sektor perdagangan serta pemenuhan suplay energi ketenaga listrikan terutama sebagai akibat peningkatan produski produktifitas industri di Gerbangkertosusila; dan

c. Aspek Infratruktur, meliputi Pengembangan sistem jaringan transportasi massal non-jalan yang handal, nyaman, aman dan murah, terutama untuk aktivitas ulang-alik dari wilayah pinggiran; Pengembangan pola intermoda jaringan transportasi masal yang mudah diakses untuk seluruh aktivitas di sekitar pusat-pusat bisnis dan pemerintahan; Pengembangan jaringan logistik yang efisien dari pusat-pusat produksi di dalam kawasan maupun dengan pusat-pusat produksi yang memiliki hubungan erat; Pengembangan sistem jaringan air limbah dan drainase yang dapat mengatasi masalah kualitas lingkungan (penumpukan sampah, kumuh dan banjir); Peningkatan kualitas lingkungan permukiman melalui penyediaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman; Pengendalian perubahan penggunaan lahan khususnya pada kawasan lindung; dan Peningkatan konektivitas ekonomi melalui penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang memadai dan handal.

IV.2.1.6 Kebijakan, Program/Kegiatan yang Dibutuhkan dalam Rangka Percepatan Kawasan Prioritas Gerbangkertosusila

Kebijakan, program/kegiatan yang dibutuhkan dalam rangka percepatan Kawasan Prioritas Gerbangkertosusila dalam kegiatan pengembangan infrastruktur yang dapat dilakukan seperti Transportasi Publik di Gerbangkertosusila, Pembangunan Jalan Tol Ngawi – Bojonegoro – Tuban – Lamongan – Manyar – Bunder, Pengembangan jalan tol Bandara Juanda – Tanjung Perak (SERR), Pengendalian Banjir Kali Lamong, Pengembangan Bandara Internasional Juanda (Terminal 3), Pembangunan PLTSa di Kabupaten Sidoarjo.

Gambar 4. 9 Peta Lokasi Program/Proyek di Kawasan Prioritas Gerbangkertosusila

Sumber: Sekretariat Kebijakan Satu Peta, 2019

Prioritas utama pemicu percepatan pertumbuhan ekonomi di Kawasan Prioritas Gerbangkertosusila adalah terbangunanya Klaster Migas dan Kondensat terutama dengan berdirinya *Refinery* Kilang Minyak dan Petrochemical di Tuban. Sebelumnya telah berdiri *Oil Tank Terminal* di Kabupaten Lamongan dan TTPI di Kabupaten Tuban. Dengan terbangunnya Industrialisasi Migas dan kondensat serta petrokimia tersebut, akan memicu berdirinya Kawasan-Kawasan Industri baik yang sudah dalam bentuk kawasan (dikelola oleh Pengembang *Industrial Estate*), maupun rencana-rencana kawasan industri baru yang terdaftar di Kementerian Perindustrian. Sedangkan kegiatan ekonomi lain yang dikemas dalam Program Agropolitan/Minapolitan meliputi:

a. Pengembangan Agropolitan dan Penataan Pasar Lamongan – Kabupaten Lamongan;

b. Pengembangan Minapolitan Lamongan – Kabupaten Lamongan; dan

c. Pengembangan Agropolitan Bojonegoro – Kabupaten Bojonegoro.

Untuk mempercepat pembangunan Kawasan Prioritas Gerbangkertosusila sebagai pusat pertumbuhan ekonomi wilayah, Kawasan Pendukung Madura dan Kepulauan didorong sebagai kawasan pendukung untuk pengembangan kawasan prioritas tersebut. Kawasan Madura dan Kepulauan memiliki karakteristik yang dinilai sesuai dengan arah pengembangan Gerbangkertosusila.

IV.2.2 Kawasan Pendukung Madura dan Kepulauan

IV.2.2.1 Gambaran Umum Kawasan Pendukung Madura dan Kepulauan

A. Geografi Wilayah

Kawasan pendukung Madura dan Kepulauan terletak antara 113°08' BT - 116°16' BT dan 4°55' LS – 7°31' LS. Sebagian besar kawasan ini termasuk dalam wilayah Pegunungan Kapur Utara berbatasan langsung dengan Laut Jawa di sebelah utara, Laut Flores di sebelah timur, Selat Madura dan Laut Bali di sebelah selatan, serta Kabupaten Bangkalan di sebelah Barat. Kawasan pendukung Madura dan Kepulauan terdiri dari 3 kabupaten yaitu Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten Sumenep yang memiliki 126 pulau-pulau kecil disekitarnya dengan luas area total mencapai 4.023,86 km^2. Sebagian besar Kawasan Madura dan Kepulauan didominasi oleh topografi berbukit dan bergelombang di wilayah tengah dan utara, sedangkan di wilayah selatan di tiga kabupaten bertopografi relatif datar. Ditinjau keseluruhan kawasan pendukung Madura dan Kepulauan didominasi oleh lahan garapan berupa pertanian lahan kering. Adapun lahan yang tidak memiliki kesuburan tanah yang cukup khususnya di wilayah pesisir didominasi oleh pemanfaatan ladang garam. Wilayah Madura yang dikenal dengan kondisi tanah yang gersang dan tandus lebih disebabkan oleh kombinasi kondisi tanah dan batuan berkapur yang memiliki keterbatasan mineral pendukung untuk intensifikasi budidaya pertanian.

Gambar 4. 10 Peta Kawasan pendukung Madura dan Kepulauan

Sumber: Sekretariat Kebijakan Satu Peta, 2019

Tabel 4. 3 Luas Wilayah per Kabupaten/Kota di Kawasan Madura dan Kepulauan

No	Kabupaten/Kota	Ibukota Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (km^2)
1	Sampang	Sampang	1.233,08
2	Pamekasan	Pamekasan	792,24
3	Sumenep	Sumenep	1.998,54
TOTAL			4.023,86

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2019

B. Kependudukan dan Sosial Budaya

Pada tahun 2017, jumlah akumulasi penduduk di Kawasan Pendukung Madura dan Kepulauan mencapai 2.910.983 jiwa (Kabupaten Sampang 919.473 jiwa, Kabupaten Pamekasan 862.914 jiwa, dan Kabupaten Sumenep 1.128.596 jiwa). Kepadatan penduduk di Kabupaten Sampang 746 jiwa/km^2, Kabupaten Pamekasan 1089 jiwa/km2, dan Kabupaten Sumenep mencapai 593 jiwa/km^2. Laju pertumbuhan penduduk per tahun untuk Sampang 1,58 persen, Pamekasan 1,45 persen, dan Sumenep 0.44 persen. Tingkat pendidikan di Kawasan Madura dan Kepulauan dinilai dari tingkat partisipasi sekolah hingga level sekolah menengah atas kurang dari 75 persen, bahkan Kabupaten Sampang rata-rata tingkat partisipasi sekolah hanya sekitar 55 persen. Mata pencaharian dominan masyarakat setempat adalah pertanian diikuti dengan profesi di bidang industri pengolahan dan perdagangan. Dari sisi jumlah pengangguran, Kawasan Madura dan Kepulauan tergolong memiliki tingkat pengangguran yang cukup tinggi. Jumlah pengangguran di Kabupaten Sampang sejumlah 17.325 orang, Kabupaten Pamekasan 18.133 orang, dan Kabupaten Sumenep mencapai 19.732 orang.

Tabel 4. 4 Kondisi Kependudukan Menurut Kabupaten/Kota di Kawasan Madura dan Kepulauan

No	Kota / Kabupaten	Penduduk (ribu)			Laju Pertumbuhan Penduduk (%)		Kepadatan Penduduk (jiwa/km^2)	
		2000	2010	2018	2000 - 2010	2010-2018	2010	2018
1	Sampang	750	878	969	1,60	1,22	637,30	785,84
2	Pamekasan	689	796	871	1,46	1,13	1.387,73	1.099,41
3	Sumenep	986	1.042	1.085	0,56	0,50	271,65	542,90

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2019

Tingkat kemiskinan tiga kabupaten di Kawasan Madura dan Kepulauan tergolong sangat tinggi, bahkan menurut data BPS Provinsi Jawa Timur tahun 2018 tingkat kemiskinan di Kabupaten Sampang (21,21 persen) dan Kabupaten Sumenep (20,16 persen) merupakan yang tertinggi di Provinsi Jawa Timur. Khusus untuk data Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Kabupaten Sampang memiliki IPM terendah yaitu 59,90. Adapun IPM untuk Kabupaten Pamekasan 64,93 dan Kabupaten Sumenep mencapai 64,28. IPM dari ketiga kabupaten di kawasan Madura tergolong di bawah rata-rata IPM Provinsi Jawa Timur. Sebagian besar masyarakat Kawasan Madura dan Kepulauan adalah masyarakat bersuku Madura dan berbahasa Madura.

C. Sektor dan Komoditas Unggulan

Pertanian dan perikanan menjadi sektor andalan di Kawasan Madura dan Kepulauan. Komoditas pertanian unggulan dari kawasan ini diantaranya adalah jagung, bawang merah, tebu, dan Sapi Madura sedangkan garam dan rumput laut menjadi komoditas andalan untuk perikanan. Adapun sektor pendukung meliputi industri pengolahan dan pariwisata. Industri pengolahan berkisar pada pabrik pengolahan tebu, pengolahan garam dan industri mikro kecil rumput laut, sedangkan sektor pariwisata menyumbangkan komoditas wisata alam pantai dan bahari sebagai sub sektor andalan. Kawasan Madura dan Kepulauan menjadi pemasok garam terbesar nasional, salah satu pemasok terbesar kebutuhan gula nasional, pemasok rumput laut dan sapi potong terbesar di Provinsi Jawa Timur.

Tabel 4. 5 Produktivitas Komoditas Unggulan di Kawasan Madura dan Kepulauan

Kabupaten	Komoditas Unggulan
Kabupaten Sampang	Jambu mente (1.309,16 ton) Cabai jamu (589,6 ton) Semangka (349,5 ton
Kabupaten Pamekasan	Pisang (3.271 ton) Bawang merah (15.228,6 ton) Sapi potong (59.415 ekor) Jagung (5.498,6 ton) Tembakau (4.136 ton)
Kabupaten Sumenep	Rumput laut (624.026,32 ton) Garam (232.000 ton) Jagung (17.481,43 ton) Cabai rawit (6.529,7 ton) Bawang merah (4.300,9 ton) Jambu mente (1.092,93 ton)

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2017

IV.2.2.2 Potensi dan Tantangan

Kawasan pendukung Madura dan Kepulauan memiliki aneka potensi sumber daya alam dan lingkungan yang mampu mendorong pengembangan ekonomi masyarakat setempat. Beberapa potensi sumber daya alam dan lingkungan berasal dari sektor pertanian, perkebunan, perikanan, pengelolaan energi, dan pariwisata. Dari sektor pertanian potensi wilayah Pulau Madura didominasi oleh pertanian sawah tadah hujan dan ladang dengan komoditas andalan jagung dan bawang merah. Kombinasi antara kondisi tanah dan geologi di kawasan ini kurang mendukung pengadaan lahan pertanian irigasi atau pertanian lahan basah sehingga intensifikasi pertanian lahan kering berjalan lebih optimal.

Adapun lahan pertanian irigasi terdapat di sebagian kecil Kawasan Madura dan Kepulauan seperti di sekitar wilayah perkotaan Kabupaten Sumenep, bagian selatan Kabupaten Pamekasan, dan sebagian kecil Kabupaten Sampang bagian barat daya. Komoditas jambu mente juga menjadi komoditas andalan khususnya di Kabupaten Sampang karena di wilayah wilayah bagian utara Kabupaten Sampang memiliki kondisi lahan yang sangat sesuai untuk menghasilkan buah jambu mente dengan kualitas terbaik.

Gambar 4. 11 Peta Persebaran Ladang dan Kebun Kawasan Madura dan Kepulauan

Sumber: Sekretariat Kebijakan Satu Peta, 2018

Selain itu, sapi Madura menjadi komoditas unggulan di sektor peternakan. Ditinjau dari aspek iklim dan ketersediaan pangan ternak, sebagian besar Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep menjadi wilayah paling optimal untuk pengembangan ternak Sapi Madura, terlebih di Pulau Sapudi yang menjadi wilayah permurnian populasi sapi Madura. Ditinjau dari bentuk kawasan yang merupakan kawasan kepulauan dan memiliki garis pantai terpanjang diantara kawasan ekonomi lain di Provinsi Jawa Timur tentu menyimpan kemelimpahan potensi perikanan. Rumput laut merupakan komoditas unggulan yang potensial mampu mendongkrak perekonomian masyarakat pesisir. Komoditas rumput laut Kawasan Madura dan Kepulauan telah mampu menembus pasar luar negeri dan menjadikan Kawasan Madura dan Kepulauan sebagai pemasok rumput laut terbesar di Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan data BPS Provinsi Jawa Timur, khusus Kabupaten Sumenep mampu memproduksi 624.026,32 ton rumput laut pada tahun 2017. Di lain sisi komoditas garam menjadi komoditas perikanan yang fenomenal hingga Pulau Madura dikenal sebagai pemasok garam terbesar nasional. Kondisi pesisir yang kering dengan kombinasi suhu tinggi dan kelembaban udara rendah menjadikan garam memiliki potensi pengembangan yang sangat baik di kawasan ini.

Secara umum, persebaran kawasan hutan di Madura dan Kepulauan sangat minim. Kondisi ini menyebabkan masih banyaknya lahan-lahan budidaya yang potensial untuk dikembangkan sebagai sentra produksi pertanian. Potensi ini perlu dimanfaatkan dengan optimal untuk meningkatkan produktivitas komoditas unggulan maupun memunculkan komoditas-komoditas unggulan yang baru melalui pengembangan lahan-lahan yang masih potensial.

Gambar 4. 12 Peta Kawasan Hutan Kawasan Madura dan Kepulauan

Sumber: Sekretariat Kebijakan Satu Peta, 2018

Potensi pariwisata di Kawasan Madura dan Kepulauan memiliki peluang besar dalam rangka pengembangan kawasan. Wisata budaya yang bersinergi dengan wisata alam daratan, pulau kecil, dan bahari menjadi keunggulan pariwisata di wilayah kepulauan ini yang tentu tidak kalah dengan wisata sejenis di Pulau Bali maupun Pulau Lombok. Beberapa obyek wisata unggulan di Kawasan Madura dan Kepulauan diantaranya adalah Kraton Sumenep, Kota Tua Kalianget, Taman Adipura Sumenep, Vihara Avalokitesvara, Gili Labak, Gili Genting, Gili Iyang, Gili Pandan, Telaga Kermata, Pantai Lombang, Pantai Sembilan, Air Terjun Toroan, Bukit Tinggi Dramista, wisata pantai dan bahari di gugusan kepulauan Kangean dan Masalembu. Penguatan konektivitas antar wilayah khususnya kepulauan dipastikan membuka peluang besar dalam peningkatan pengembangan wisata di Kawasan Madura dan Kepulauan yang akan berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat.

Pulau Madura yang didominasi oleh wilayah dengan tanah dan batuan berkapur menyebabkan terbatasnya budidaya pertanian mengingat tanah berkapur kurang memiliki kandungan unsur mineral pendukung tanaman pertanian maupun perkebunan pada umumnya. Kondisi ini membuat masyarakat setempat harus mampu mengoptimalkan budidaya tanaman yang memiliki kesesuaian lahan di wilayah berkapur seperti pengembangan komoditas pertanian jagung, tebu, singkong, kacang tanah, kedelai, maupun komoditas perkebunan jambu mente. Di sisi lain, kondisi geologi berkapur identik dengan lapisan tanah yang relatif tipis sehingga tidak mampu mendukung keberadaan sistem air tanah yang mumpuni. Hal ini mengakibatkan sering munculnya fenomena kekeringan hidrologis pada saat musim kemarau di sebagian besar kawasan pendukung Madura dan Kepulauan yang berdampak pada sulitnya akses air bersih. Pengembangan SPAM dirasa perlu dilakukan guna memenuhi kebutuhan jaringan air bersih dan sanitasi. Peran strategis SPAM maupun waduk berpotensi memenuhi kebutuhan air baku rumah tangga, industri, dan pertanian sehingga bisa memicu optimalisasi pemenuhan air bersih masyarakat.

Kurang optimalnya produktivitas dan nilai tambah sektor primer terutama melalui hilirisasi produk unggulan di kawasan agropolitan dan minapolitan dan melalui pemanfaatan teknologi pertanian dan industri pengolahan hasil laut. Pengembangan teknologi pertanian, industri pertanian, dan perikanan perlu dicanangkan guna meningkatkan efektivitas produksi pertanian dan meningkatkan kualitas produk pertanian.

Hal vital tidak kalah penting dan sangat perlu diperhatikan adalah konektivitas antara Pulau Madura dan pulau lain di sekitarnya. Pengembangan pelabuhan dan optimalisasi fungsi pelabuhan dengan pemberdayaan masyarakat setempat didukung pembiayaan operasional dari daerah dapat menjadi langkah strategis pengembangan konektivitas antar wilayah pulau, termasuk keberlanjutan penyaluran logistik. Adapun pembangunan bandara di pulau yang sulit dijangkau dengan potensi pariwisata yang unggul seperti di gugusan Kepulauan Kangean dapat meningkatkan pengembangan kawasan pariwisata kepulauan.

Lemahnya sumber daya manusia di kawasan Madura membuat pergerakan ekonomi di kawasan ini masih belum bisa dioptimalkan. Keterampilan kerja dan kemapanan mental bagi para masyarakat yang siap kerja belum sepenuhnya terbina dengan baik. Kondisi tersebut dicerminkan dengan banyaknya jumlah pengangguran di Kawasan Madura dan Kepulauan. Selain itu, indikator penentu kuat lemahnya sumber daya manusia dapat dinilai dari investasi, daya beli masyarakat, dan Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM). Ditinjau dari skala provinsi, kabupaten di kawasan Madura memiliki kualitas Sumber Daya Manusia di bawah rata-rata Provinsi Jawa Timur. Di sisi lain, kawasan andalan agropolitan dan minapolitan Madura dan Kepulauan masih memerlukan tenaga kerja yang terampil mengelola produksi, distribusi, maupun pengolahan hasil produksi pertanian dan perikanan. Adapun Sumber Daya Manusia untuk sektor pengelolaan pariwisata masih sangat terbatas sehingga aset wisata yang potensial belum bisa berkembang.

Di wilayah kepulauan Indonesia, ancaman bencana sangat besar mengingat posisi Indonesia yang strategis tepat dilalui beberapa pertumbukan lempeng yang identik dengan ancaman gempa bumi dan potensi erupsi gunung berapi. Khusus di Kawasan Madura dan Kepulauan ancaman bencana lebih kepada ancaman gempa bumi. Kondisi tersebut disebabkan oleh adanya kompleks patahan lokal di Pulau Madura. Adapun indikasi potensi gempa bumi di Kawasan Madura dan Kepulauan dapat teridentifikasi melalui bentukan-bentukan perbukitan dan pegunungan patahan yang terdapat di region tengah Pulau Madura. Di Kawasan Madura dan Kepulauan potensi gempa bumi terbagi menjadi 3 (tiga) level, yaitu kawasan rawan bencana gempabumi menengah, rendah, dan sangat rendah. Bahaya banjir juga menyentuh beberapa lokasi di Kawasan Madura dan Kepulauan setiap tahunnya sehingga kewaspadaan dan upaya mitigasi banjir perlu ditingkatkan.

IV.2.2.3 Penguatan Konektivitas

Masih belum optimalnya keterkaitan antar pusat ekonomi kawasan membuat urgensi pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur penghubung antar wilayah sangat besar. Beberapa program prioritas penguatan infrastruktur wilayah direncanakan pemerintah untuk mengupayakan penguatan konektivitas antar wilayah dalam kawasan pendukung Madura dan Kepulauan (PKL Sampang – PKW Pamekasan – PKL Sumenep) serta penguatan konektivitas antar kawasan ekonomi di level provinsi dan nasional.

Gambar 4. 14 Peta Keterkaitan Antar Pusat Ekonomi Kawasan Madura dan Kepulauan

Sumber: Sekretariat Kebijakan Satu Peta, 2019

Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di Kawasan Madura dan Kepulauan menjadi upaya awal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebutuhan dasar khususnya sumber daya air terus diupayakan pemerintah dengan pembangunan SPAM Regional Lintas Madura didukung normalisasi Waduk Klampis. Adanya rencana program tersebut menjadi solusi efektif terhadap permasalahan sumber daya air yang sering dialami masyarakat Madura, yaitu keterbatasan perolehan air bersih di Pulau Madura akibat kekeringan saat musim kemarau. Konektivitas sumber daya air antar wilayah dalam kawasan Madura diharapkan tercapai dengan diupayakannya pembangunan SPAM yang rencananya dapat mengalirkan air ke seluruh penjuru Pulau Madura. Eksistensi Waduk Klampis juga diharapkan mampu mengatasi keterbatasan perolehan air saat musim kemarau, khususnya untuk pengairan pada lahan pertanian.

Infrastruktur pendukung transportasi seperti jalan, pelabuhan, dan bandara dikembangkan guna meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah. Pembangunan Jalan Lintas Selatan (Pansela) Madura dan peningkatan kapasitas Jalan Raya Sumenep – Pamekasan merupakan salah satu upaya strategis untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah. Dampak pembangunan Pansela diharap mampu membangun efisiensi aliran produk dari komoditas unggulan Kawasan Madura dan Kepulauan menuju kawasan Gerbangkertosusila. Dibangunnya jalan tersebut akan memicu pertumbuhan

ekonomi Kawasan Madura dan Kepulauan mengingat konektivitas dengan kawasan metropolitan Gerbangkertosusila akan menguat. Program pengembangan kapasitas Jalan Raya Sumenep – Pamekasan juga ditujukan untuk efektivitas aliran logistik dan meningkatkan konektivitas antara Kabupaten Sumenep dan Kabupaten Pamekasan.

Gambar 4. 15 Peta Infrastruktur Sumber Daya Air Eksisting Kawasan Pendukung Madura dan Kepulauan

Sumber: Sekretariat Kebijakan Satu Peta, 2018

Mengembangkan prasarana dan aktivitas di Pelabuhan Kalianget, Pelabuhan Pasean, Pelabuhan Branta, Pelabuhan Trunojoyo, Pelabuhan Pagerungan, Pelabuhan Raas, Pelabuhan Kangean, dan Pelabuhan Masalembu juga dilakukan guna meningkatkan pelayanan logistik maupun perpindahan masyarakat antar pulau di Kawasan Madura dan Kepulauan. Pengembangan beberapa pelabuhan bongkar muat maupun pelabuhan penumpang menjadi salah satu upaya vital dalam peningkatan konektivitas Kawasan Madura dan Kepulauan dengan wilayah lain. Pengembangan yang optimal pada pelabuhan akan mengoptimalkan peran sebagai simpul aliran logistik di Kawasan Madura dan Kepulauan. Pengembangan pelabuhan bongkar muat diharapkan juga akan meningkatkan kapasitas dan percepatan *transfer* logistik ke luar kawasan maupun ke dalam kawasan sehingga percepatan aliran logistik ke masyarakat dan aliran komoditas produk pertanian dan perikanan unggulan kawasan dapat berjalan lebih efektif. Pengembangan beberapa pelabuhan sekaligus pembangunan Jalan Lintas Selatan Madura dan Jalan Raya Sumenep – Pamekasan sebagai jalur logistik utama Pulau Madura yang secara strategis mampu memperbesar konektivitas Kawasan Madura dan Kepulauan ke segala arah.

Simpul konektivitas (pelabuhan) dan jalur utama (Jalan Lintas Selatan Madura dan Jalan Raya Sumenep - Pamekasan) aliran logistik diharapkan mampu bersinergi sebagai gerbang aliran logistik ke luar dan ke dalam kawasan sehingga percepatan pemerataan dan pembangunan ekonomi masyarakat Kawasan Madura dan Kepulauan dapat tercapai.

Gambar 4. 16 Peta Transportasi Eksisting Provinsi Jawa Timur

Sumber: Sekretariat Kebijakan Satu Peta, 2018

Pengembangan sektor pariwisata juga memiliki andil besar dalam upaya peningkatan konektivitas antar wilayah, terlebih pada kawasan berbentuk kepulauan. Kawasan Madura dan Kepulauan memiliki Pulau Kangean, Gili Mandangin, maupun Pulau Masalembu sebagai wilayah dengan potensi pariwisata yang unggul. Wilayah dengan potensi wisata dituntut memiliki kemudahan akses baik dari sisi kenyamanan maupun dari sisi waktu tempuh. Kondisi ini membuat perlunya pengembangan bandara di Kangean, pengembangan pelabuhan di Kangean dan Masalembu, dan pengadaan sarana transportasi laut kapal perintis dan kapal cepat antar pulau. Sarana dan prasarana transportasi laut dan udara pada wilayah dengan peluang pariwisata yang potensial mampu meningkatkan konektivitas sekaligus mempercepat pengembangan sektor wisata di Kawasan Madura dan Kepulauan. Peningkatan aksesibilitas terhadap wilayah pariwisata yang potensial diharapkan mampu menjadikan sektor pariwisata menjadi sektor unggulan kawasan Madura selain sektor agropolitan dan minapolitan.

Selain dari segi penyediaan infrastruktur transportasi, konektivitas antar wilayah dapat dibangun melalui tata kelola ekonomi lokal yang berorientasi pada keterkaitan desa – kota, perluasan aliran distribusi produk unggulan di setiap wilayah, maupun peningkatan fungsi dari setiap pusat-pusat kegiatan sehingga aliran barang maupun jasa antar wilayah dapat berjalan lebih intensif. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengelolaan sumber daya lingkungan dan manajemen pemasaran produk pertanian dan kelautan menjadi langkah awal pembangunan konsepsi dan persepsi keterkaitan desa – kota dalam pembangunan kawasan yang berkelanjutan. Balai Latihan Kerja (BLK) menjadi wadah yang tepat dalam mengakomodir upaya peningkatan sumberdaya manusia di sektor unggulan di Kawasan Madura dan Kepulauan. Kemudahan akses antar wilayah dapat meningkatkan intensitas interaksi antar wilayah. Interaksi antar wilayah yang intensif akan menghadirkan ketergantungan antar wilayah sehingga intensifikasi hubungan yang saling menguntungkan antar wilayah mampu mempercepat pengembangan wilayah.

IV.2.2.4 Tema Pembangunan Kawasan Pendukung

Pembangunan ekonomi Madura difokuskan pada peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor primer melalui hilirisasi produk unggulan pertanian, perikanan, dan pengembangan pariwisata. Peningkatan sumber daya manusia, peningkatan aksesibilitas dan infrastruktur pendukung lainnya serta peningkatan akses masyarakat terhadap sumber-sumber pendanaan untuk meningkatkan akses terhadap produksi, teknologi, informasi, pemasaran maupun akses permodalan juga ditekankan dalam upaya pengembangan kawasan. Sejauh ini pengembangan peternakan sapi Madura di Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep mampu menghasilkan produk yang mampu bersaing di pasar dagang. Produk sektor perikanan berupa garam dan rumput laut di Kawasan Madura dan Kepulauan menjadi komoditas unggulan yang mengambil peran penting di perdagangan sektor perikanan nasional. Potensi wisata yang baru-baru ini diprediksi mampu mengangkat perekonomian Kawasan Madura dan Kepulauan mendadak menjadi sektor yang diperbincangkan dalam diskusi di ranah pengembangan kawasan. Kombinasi eksistensi wisata alam dan budaya diproyeksikan mampu menarik minat banyak wisatawan lokal maupun asing untuk berkunjung ke Kawasan Madura dan Kepulauan berpotensi meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat setempat.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menetapkan tiga kabupaten di Kawasan Madura dan Kepulauan sebagai kawasan agropolitan. Penetapan kawasan agropolitan Kabupaten Pamekasan dilaksanakan tahun 2006 dengan luas kawasan 23.920 hektar, Kabupaten Sumenep ditetapkan tahun 2011 dengan luas kawasan 84,46 hektar, dan Kabupaten Sampang ditetapkan tahun 2012 dengan luas kawasan 356,28 hektar. Sumber daya yang ada dan integrasi produk pertanian dan peternakan disertai pengelolaan sistem perniagaan yang optimal memicu perkembangan kawasan agropolitan. Potensi pertanian dengan komoditas unggulan jagung dan bawang merah sebagai primadona di sektor pertanian mampu menjadi pelopor pengembangan kawasan agropolitan Madura dan Kepulauan. Bahkan bawang merah varietas

Manjung telah ditetapkan Kementerian pertanian sebagai varietas unggul pada tahun 2007. Komoditas tebu yang menjadi komoditas sekunder diprediksi dapat memberikan sumbangsih dalam peningkatan perekonomian kawasan agropolitan. Karakteristik sebagian lahan di Lawasan Madura dan Kepulauan sangat berkesesuaian dengan syarat hidup tanaman tebu. Di sisi lain, potensi lahan tebu yang mencapai ribuan hektar di Pulau Madura belum termanfaatkan secara optimal sehingga masih perlu optimalisasi penggunaan lahan tebu. Pengembangan lahan tebu menjadi gagasan yang sedang digalakkan dalam rangka mendorong tanaman tebu menjadi komoditas unggulan baru selain jagung, bawang merah, dan sapi Madura.

Dilihat dari sudut pandang morfologi kawasan, ketiga kawasan agropolitan pada tiga kabupaten tersebut memiliki potensi pengembangan agrobisnis yang besar. Keberadaan kawasan pertanian yang terintegrasi dengan permukiman dan pusat perniagaan memunculkan peluang bisnis pertanian yang potensial. Kondisi geografis yang mendukung disertai eksistensi struktur pembangun kawasan agropolitan menjadikan kawasan pendukung Madura dan Kepulauan sebagai pionir mega-agropolitan di wilayah timur Pulau Jawa. Optimalisasi kawasan agropolitan Madura dan Kepulauan dapat ditekankan dengan keterlibatan teknologi pertanian dalam proses produksi sehingga dapat meningkatkan efisiensi kegiatan pertanian dan peningkatan produktivitas pertanian. Salah satu bentuk dari pengembangan teknologi bidang agropolitan adalah dengan melalui tahap industrialisasi produk pertanian dan perikanan dengan pengembangan pabrik gula pengolah tebu. Data tahun 2018 menunjukan kebutuhan gula nasional mencapai 5.700.000 ton sedangkan produksi gula lokal tidak mampu memenuhi kebutuhan gula nasional. Kebutuhan gula yang semakin meningkat seiring pertumbuhan penduduk nasional membuat produksi tebu di Kawasan Madura dan Kepulauan diprediksi dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan gula nasional. Pelaksanaan pengembangan kawasan agropolitan di Kawasan Madura dan Kepulauan perlu dicanangkan melalui sinergi antar sumber daya yang ada untuk mendukung perkembangan sistem dan usaha agrobisnis berbasis kerakyatan, sehingga masyarakat dapat berperan aktif dalam memperluas cakupan kawasan agropolitan serta peningkatan daya saing produk pertanian yang berkelanjutan.

Predikat Pulau Madura sebagai pemasok garam terbesar di Indonesia dan produsen rumput laut terbesar di Jawa masih menjadi kebanggaan masyarakat Madura. Potensi yang sangat besar dari komoditas garam dan rumput laut sangat mempengaruhi perekonomian masyarakat di Kawasan Madura dan Kepulauan khususnya masyarakat pesisir. Menyadari potensi perikanan yang di miliki Kawasan Madura dan Kepulauan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menobatkan kawasan perairan Pulau Madura khususnya di pesisir Kabupaten Sumenep bagian tenggara sebagai kawasan minapolitan jenis minapolitan budidaya. Keunggulan budidaya perikanan di Kawasan Madura dan Kepulauan dibuktikan dengan produksi rumput laut mencapai 624.026,32 ton di tahun 2017 menjadikan Pulau Madura memiliki peran penting dalam pemenuhan kebutuhan bahan dasar rumput laut di Provinsi Jawa Timur. Mempertahankan kualitas olahan dan menjaga tingkat produktivitas garam dicanangkan guna mempertahankan predikat Pulau Madura sebagai produsen garam terbesar dan terbaik nasional. Adanya 3 (tiga) pelabuhan bongkar muat logistik di Pulau Madura mampu meningkatkan

fungsi dan karakter Kawasan Madura dan Kepulauan sebagai kawasan agropolitan dan menigkatkan potensi agrobisnis. Terdapatnya 3 (tiga) simpul aliran logistik di Pulau Madura sangat potensial menjadikan Kawasan Madura dan Kepulauan memiliki peranan penting dalam roda perdagangan komoditas-komoditas unggulannya ke kawasan lain atau ke pulau lain di Indonesia. Kapasitas dan kecepatan pasokan komoditas unggulan dapat meningkat pesat melalui beberapa pelabuhan yang beroperasi secara optimal.

Potensi wisata di Kawasan Madura dan Kepulauan sedang banyak diulas karena potensi pariwisata tersembunyi di kawasan ini tidak kalah saing dengan sektor pariwisata di Pulau Bali dan Pulau Lombok yang notabene berlabel kawasan pariwisata unggulan nasional. Kombinasi eksistensi wisata alam dan budaya yang dikelola dengan baik berpeluang menjadi *masterpiece* pembangunan ekonomi di Kawasan Madura dan Kepulauan di masa depan. Peningkatan konektivitas antar obyek wisata serta penyediaan sarana prasarana pendukung yang optimal berpeluang meningkatkan kemajuan kawasan dan kemajuan ekonomi daerah dan masyarakat setempat. Wisata unggulan di Kawasan Madura dan Kepulauan beberapa diantaranya terletak di Pulau Kangean, Pulau Masalembu, maupun di beberapa pulau kecil seperti Gili Mandangin.

IV.2.2.5 Strategi Percepatan Pembangunan Kawasan Pendukung

Kawasan pendukung di Kawasan Madura dan Kepulauan dengan segala potensi sumber daya yang ada memungkinkan percepatan pembangunan kawasan khusus sektor agropolitan, minapolitan, dan pariwisata. Strategi percepatan pengembangan Kawasan Madura dan Kepulauan dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan, yang meliputi aspek sosial, ekonomi, dan infrastruktur. Berikut beberapa hal yang dapat dilakukan yang terbagi menjadi beberapa aspek:

1. Sosial
   a. Peningkatan pemahaman pola hidup sehat di masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga;
   b. Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan fasilitas kesehatan;
   c. Peningkatan akses layanan pendidikan terhadap masyarakat;
2. Ekonomi
   a. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor primer melalui hilirisasi produk unggulan (pertanian, perikanan, dan pariwisata) dengan pemanfaatan teknologi pertanian dan industri pengolahan;
   b. Pengidentifikasian komoditas-komoditas non unggulan yang potensial untuk dikembangkan;
   c. Perluasan pemasaran produk dengan upaya mewujudkan keterkaitan pasar lokal dengan pasar regional;
   d. Peningkatan konektivitas pasar lokal dengan pasar regional dan penguatan kearifan budaya lokal sebagai upaya mengoptimalkan sektor pariwisata yang berdaya saing;

3. Infrastruktur
   a. Peningkatan layanan prasarana transportasi dalam rangka mendukung sistem aliran logistik dan aksesibilitas area pariwisata;
   b. Peningkatan kualitas lingkungan permukiman melalui penyediaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman; dan
   c. Pemerataan ekonomi melalui penyediaan prasarana transportasi yang memadai.

IV.2.2.6 Kebijakan, Program/Kegiatan yang dibutuhkan dalam Rangka Pemerataan Pembangunan

Kawasan pendukung Madura dan Kepulauan dengan segala potensi sumber daya yang ada memungkinkan percepatan pembangunan kawasan khusus sektor agropolitan, minapolitan, dan pariwisata. Beberapa program dan kegiatan prioritas pengembangan kawasan dicanangkan untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada guna penguatan daya saing kawasan dan pembangunan ekonomi masyarakat. Program prioritas yang segera dijalankan mencakup sektor Sumber Daya Manusia, pendidikan, agropolitan, minapolitan, industri, infrastruktur dasar dan infrastruktur transportasi. Upaya peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dicanangkan melalui program prioritas peningkatan kualitas pendidikan sumber daya manusia melalui pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Balai Latihan Kerja (BLK). Program pengembangan SMK dan BLK menyasar masyarakat usia sekolah menengah di Kabupaten Sampang. Output dari program yang rencana dilaksanakan di tahun 2020 ini yakni meningkatkan kesiapan siswa SMK maupun masyarakat secara umum di Kabupaten Sampang untuk memiliki kesiapan mental dan keterampilan yang mumpuni di masa mendatang hingga menjadi individu yang berdaya saing dalam dunia kerja. Peningkatan kualitas pendidikan SMK juga akan diikuti rencana pembangunan infrastruktur pendidikan SMK di Kabupaten Sampang.

Gambar 4. 17 Peta Program/Kegiatan Kawasan Madura dan Kepulauan

Sumber: Sekretariat Kebijakan Satu Peta, 2019

Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang salah satunya adalah air bersih terus dioptimalkan pemerintah mengingat keterbatasan air bersih di saat musim kemarau dan pencegahan banjir di musim penghujan. Pembangunan SPAM Regional Lintas Madura dengan kapasitas 1.500 liter per detik dan pengembangan Waduk Klampis diharapkan mampu menguatkan konektivitas sumber daya air antar wilayah sehingga mengatasi permasalahan kekeringan di Kawasan Madura dan Kepulauan di musim kemarau. SPAM yang akan dibangun memanfaatkan sumber daya air baku dari mata air Klebetan, Sungai Budur, Waduk Nipah, Waduk Klampis, Waduk Blega, Sungai Pasean, Sungai Pasongsongan, Sungai Semajid dan Sungai Pragaan. Rencana pembangunan SPAM ini dijalankan pada tahun 2020 di Kabupaten Sumenep. Mitigasi banjir juga menjadi isu strategis di Kawasan Madura dan Kepulauan. Program pembangunan floodway di Kali Kemuning juga telah direncanakan pemerintah untuk menekan luapan air penyebab banjir di beberapa titik rawan banjir di Kabupaten Sampang. Program lain untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di Kawasan Madura dan Kepulauan berupa pengembangan RSUD Ketapang di Kabupaten Sampang dan RSUD Moch. Noer di Kabupaten Pamekasan juga diupayakan untuk meningkatkan kapasitas pelayanan kesehatan terhadap masyarakat.

Program pengembangan lahan budidaya tebu direncanakan berjalan pada tahun 2020 dengan luasan area pengembangan 6.000 hektar yang tersebar di Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten Sumenep. Bentuk adaptasi yang cukup baik tanaman tebu terhadap iklim ekstrim dan tanah kering berkapur berpotensi memunculkan komoditas tebu sebagai komoditas pendamping jagung dan bawang merah sebagai komoditas utama di Kawasan Madura dan Kepulauan. Seiring dengan rencana program pengembangan lahan tebu, pengadaan pabrik gula menjadi program yang potensial dikembangkan di kawasan ini mengingat tebu merupakan bahan pokok industri gula. Program industri garam di Kabupaten Sumenep juga dikembangkan guna meningkatkan daya saing produk garam di Kawasan Madura dan Kepulauan. Pengembangan industri di wilayah lain khususnya garam rakyat dan garam di kepulauan juga telah direncanakan pemerintah. Potensi peningkatan ekonomi di Kawasan Madura dan Kepulauan akan terasa signifikan dengan beberapa program yang diperkirakan akan menyerap banyak tenaga kerja. Minimalisasi tingkat pengangguran akan berjalan serta peningkatan nilai jual produk akan terjadi akibat pengembangan industri pengolahan gula di setiap kabupaten di kawasan ini. Program yang dijalankan mulai 2020 ini dianggap mampu menguatkan peran agropolitan di Kawasan Madura dan Kepulauan sebagai pengendali perekonomian masyarakat di Kawasan Madura dan Kepulauan. Dampak langsung dari adanya kedua program tersebut adalah meningkatnya kebutuhan tenaga kerja secara drastis dalam sistem agropolitan di Kawasan Madura dan Kepulauan. Adanya kebutuhan tenaga kerja yang besar membuat permasalahan pengangguran di Kawasan Madura dan Kepulauan dapat diminimalisasi. Upaya menekan tingkat kemiskinan secara linier dapat teratasi dengan terstruktur dengan bertambahnya lapangan kerja yang potensial.

Program pembangunan Jalan Lintas Selatan Madura (Ruas Sreseh – Pangarengan) yang direncanakan mulai agropolitan, serta pembangunan infrastruktur wilayah diprediksi mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menguatkan daya saing ekonomi kawasan pendukung Madura dan Kepulauan terhadap kawasan lain disekitarnya. Program peningkatan kapasitas Jalan Raya Sumenep – Pamekasan juga menjadi program strategis demi meningkatkan konektivitas antara Kabupaten Sumenep dan Kabupaten Pamekasan. Konektivitas antara Kawasan Madura dan Kepulauan dengan kawasan lainnya di skala nasional juga dicanangkan dengan rencana pengembangan bandara di Kabupaten Sumenep tepatnya di Pulau Kangean. Adanya bandara tersebut berpotensi meningkatkan pengembangan sektor pariwisata di Kawasan Madura dan Kepulauan mengingat Pulau Kangean dikenal memiliki potensi wisata pantai dan bahari yang unggul. Khusus wilayah wisata Gili Mandangin, program pengembangan pariwisata menjadi prioritas tersendiri. Keunggulan potensi wisata pantai dan bahari serta akses dari daratan Madura yang sangat terjangkau memicu banyaknya wisatawan yang telah berkunjung ke Gili Mandangin.

Penyediaan sarana transportasi laut berupa kapal perintis dan kapal cepat antar pulau menjadi rencana program prioritas pemerintah untuk turut serta meningkatkan konektivitas antar pulau. Revitalisasi dan optimalisasi fungsi Pelabuhan Kalianget, Pelabuhan Pasean, Pelabuhan Branta, Pelabuhan Trunojoyo, Pelabuhan Pagerungan, Pelabuhan Raas, Pelabuhan Kangean, dan Pelabuhan Masalembu diupayakan untuk meningkatkan akses dan aliran logistik produk perikanan maupun produk pertanian ke kawasan lain dan juga aliran logistik ke kawasan Kepulauan Madura. Meningkatnya eksistensi beberapa pelabuhan di Kawasan Madura dan Kepulauan diharapkan meningkatkan perannya sebagai gerbang dalam memfasilitasi aktivitas bongkar muat yang cukup besar di Madura yang sangat berkontribusi bagi pendapatan daerah. Adanya pengembangan beberapa pelabuhan ini mampu mengurai kepadatan bongkar muat logistik yang selama ini bersimpul di Pelabuhan Kalianget. Adanya potensi penguraian kepadatan bongkar muat logistik mampu meningkatkan pemerataan dan kecepatan aliran pasokan logistik ke masyarakat di Kawasan Madura dan Kepulauan sekaligus meningkatkan efektivitas angkutan penumpang yang juga akan terurai. Pengembangan bandara dan pelabuhan di Kawasan Madura dan Kepulauan berpotensi menimbulkan *multiple effect* yang salah satunya akan menyerap banyak lapangan kerja sehingga secara tidak langsung tekanan kemiskinan di Kawasan Madura dan Kepulauan akan menurun. Integrasi pengembangan sumber daya manusia, penguatan fungsi agropolitan, serta pembangunan infrastruktur wilayah diprediksi mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menguatkan daya saing ekonomi kawasan pendukung Madura dan Kepulauan terhadap kawasan-kawasan lain disekitarnya.

IV.3. Kawasan Prioritas Bromo-Tengger-Semeru dan Kawasan Pendukung Selingkar Ijen

IV.3.1 Kawasan Prioritas Bromo-Tengger-Semeru

IV.3.1.1 Gambaran Umum Kawasan Prioritas Bromo-Tengger-Semeru

A. Geografi Wilayah

Kawasan Prioritas Bromo-Tengger-Semeru (BTS) merupakan kawasan yang terdiri atas wilayah inti dan kawasan pendukung yang ada di sekitarnya, dimana secara administrasi terdiri atas 3 (tiga) kota dan 4 (empat) kabupaten, yaitu Kota Malang, Kota Batu, Kota Pasuruan, Kabupaten Malang, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Probolinggo, dan Kabupaten Pasuruan.

Gambar 4. 18 Peta Delineasi Kawasan Prioritas Bromo-Tengger-Semeru (BTS)

Sumber : Bappeda Provinsi Jawa Timur, diolah Sekretariat Kebjiakan Satu Peta 2019

Wilayah inti Kawasan BTS adalah Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TN BTS) yang didasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 178/Menhut-II/2005 tanggal 29 Juni 2005 seluas 50.276,2 hektar. Wilayah TN BTS terletak di dataran tinggi dengan karakter wilayah pegunungan yang terdiri dari kompleks Pegunungan Tengger di utara dan kompleks Gunung Jambangan di sebelah selatan. Secara geografis wilayah TN BTS terletak antara 7'54' – 8'13' LS dan 112"51' – 113"04' BT. Wilayah ini memiliki karakter khas berupa padang pasir, serta ekologi alam pegunungan dan budaya masyarakat setempat (Suku Tengger). Oleh sebab itu kawasan ini merupakan destinasi wisata yang khas dan menarik untuk ditingkatkan pengembangan destinasi wisatanya.

Kawasan BTS beriklim tropis, dengan suhu udara rata-rata 21 – 31 derajat Celcius. Wilayah Kabupaten Malang mempunyai suhu udara relatif lebih sejuk, sedangkan untuk Kabupaten Probolinggo memiliki usaha paling tinggi. Curah hujan rata-rata kurang lebih 1.700 mm/tahun. Potensi ketersediaan air di Kawasan BTS saat ini bergantung pada air permukaan berupa sungai yang merupakan bagian dari Wilayah Sungai Brantas, Wilayah Sungai Welang Rejoso, Wilayah Sungai Pekalen Sampean dan Wilayah Sungai Bondoyudo Bedadung. Kawasan BTS dikelilingi oleh beberapa aktif sehingga termasuk dalam kawasan rawan bencana gunung api.

Gambar 4. 19 Peta Kebencanaan Kawasan BTS

Sumber : Sekretariat Kebijakan Satu Peta, 2018

Luas Kawasan BTS yang terdiri dari 7 (tujuh) Kabupaten/Kota adalah sekitar 8.809,09 km2 dengan luas kabupaten tertinggi berada di Kabupaten Malang dan luas terendah di Kota Pasuruan.

Tabel 4. 6 Luas Wilayah Menurut Kabupaten/Kota di Kawasan BTS

No	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah Menurut Kabupaten/Kota (km^2)
1	Kabupaten Malang	3.530,65
2	Kabupaten Lumajang	1.790,90
3	Kabupaten Probolinggo	1.696,21
4	Kabupaten Pasuruan	1.474,02
5	Kota Malang	145,28
6	Kota Pasuruan	35,29
7	Kota Batu	136,74
Luas Kawasan BTS		8.809,09

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2019

Berdasarkan hasil analisis, rata-rata Kawasan BTS untuk kondisi elevasi beragam dengan topografinya topografi datar hingga bergunung.

Gambar 4. 20 Peta Topografi Kawasan BTS

Sumber: Sekretariat Kebijakan Satu Peta, 2018

B. Kependudukan dan Sosial Budaya

Jumlah penduduk tertinggi terletak di Kabupaten Malang dan terendah di Kota Batu. Namun, untuk laju pertumbuhan penduduk tertinggi terletak di Kota Batu. Kawasan BTS memiliki rata-rata laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,70 persen.

Tabel 4. 7 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk di Kawasan Prioritas Bromo-Tengger-Semeru

No	Kota / Kabupaten	Penduduk (ribu)			Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun	
		2010	2014	2015	2010 – 2015	2014 – 2015
1	Kabupaten Malang	2.451	2.527	2.544	0,74	0,68
2	Kabupaten Lumajang	1.008	1.026	1.030	0,43	0,37
3	Kabupaten Probolinggo	1.099	1.132	1.140	0,74	0,69

No	Kota / Kabupaten	Penduduk (ribu)			Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun	
		2010	2014	2015	2010 – 2015	2014 – 2015
4	Kabupaten Pasuruan	1.516	1.569	1.581	0,85	0,78
5	Kota Malang	822	845	851	0,70	0,63
6	Kota Pasuruan	186	193	194	0,84	0,77
7	Kota Batu	190	198	200	0,99	0,95
Kawasan BTS		**7.725**	**7.493**	**7.543**	**0,76**	**0,70**

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur,2019

Pembangunan manusia di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2018 terus mengalami kemajuan. Pada tahun 2017 IPM Provinsi Jawa Timur mencapai 70,27 dan selanjutnya pada tahun 2018 mencapai 70,77 atau tumbuh 0,72 persen. Kota Batu, Kota Malang, Kota Pasuruan dan Kota Probolinggo, termasuk kedalam kategori IPM tinggi yaitu (70 < IPM < 80) sedangkan, Kabupaten Malang, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Pasuruan termasuk dalam kategori IPM sedang (60 < IPM < 70).

Gambar 4. 21 Peta Indeks Pembangunan Manusia Kawasan BTS

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, diolah Sekretariat Kebijakan Satu Peta, 2018

Karakteristik masyarakat secara umum di Kawasan BTS didominasi dengan karakteristik masyarakat kota di wilayah Kota Malang. Fasilitas pendidikan sudah terpenuhi dengan tersedianya fasilitas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pusat kegiatan jasa terutama jasa pendukung pariwsata baik itu wisata alam dan wisata budaya turut mengikuti perkembangan. Sebagian besar penduduk bermata pencaharian di bidang pertanian dan industri pariwisata.

C. Sektor dan Komoditas Unggulan

Sektor unggulan di Kawasan BTS adalah potensi-potensi wisata yang beragam dan menyebar, baik wisata alam dan wisata budaya misalnya, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TN BTS) memiliki potensi sumber daya alam yang menonjol, seperti keberadaan flora langka yang menarik dan endemic, ekosistem yang khasm gunung berapi yang aktif, habitat satwa migran, fenomena/gejala alam yang unik dan menakjubkan seperti kaldera di dalam kaldera, ranu/danau yang. sangat luas dan indah di atas pegunungan, keunikan Kaldera Tengger dengan laut pasirnya, budaya dan adat istiadat khas masyarakat Suku Tengger. Pemandangan kawah Bromo yang indah dan mempesona disaksikan secara dekat maupun dari titik penanjakan, kemudian adanya lautan pasir dan padang savanna yang mempesona.

Di bidang Agropolitan memiliki panorama alam yang unik, seperti lahan pertanian di Tosari, Argosari, dan lain-lain. Sektor budaya memiliki event tradisi budaya yang melembaga di masyarakata (terutama masyarakat Tengger), seperti: Karo, Yadnya Kasodo, Entas-entas, Unan-unan, Pujan Mubeng, dan lain-lain. Permukiman Suku Tengger yang memiliki ciri khas khusus sehingga bisa dijadikan sebagai objek tujuan wisata yang memuliki arsitektur *vernacular*. Selain itu fasilitas rekreasi yang beraneka ragam seperti taman rekreasi, kolam renangm tempat berkemah, lapangan golf, dan lain-lain yang dapat dinikmati oleh berbagai kalangan dan dapat membantu mengurangi kelebihan pengunjung di TN BTS, dimana di beberapat tempat telah melebihi kapasitas daya dukung lahan.

Gambar 4. 22 Peta Komoditas Unggulan Kawasan BTS

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Timur, diolah Sekretariat Kebijakan Satu Peta, 2018

Terdapat banyak obyek wisata yang mengandung nilai sejarah peninggalan Kerajaan Singosari sampai Kerajaan Majapahit, seperti candi-candi maupun situs yang tersebar di Malang, Pasuruan, dan Lumajang; tempat semedi/singgah tokoh-tokoh kerajaan jaman dulu seperti Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada di Air Terjun Madakaripura di Probolinggo, Goa Bima di Pasirian Lumajang; makam/tempat abu raja-raja di masa lalu. Terdapat pula industri pariwisata rintisan di masing-masing kabupaten, misalnya apel bertato dan batik apel di Gubugklakah, batik pisang Lumajang, kerajinan rotan Malang, lampion Lumajang.

Komoditas unggulan yang berada di Kawasan BTS cukup beragam yang tersebar masing-masing kabupaten, diantaranya pada sektor pertanian, perkebunan dan peternakan.

IV.3.1.2 Potensi dan Tantangan

Kawasan Prioritas Bromo-Tengger-Semeru ditetapkan sebagai salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang berdampak pada diprioritaskannya program-program pembangunan di wilayah tersebut. Pembangunan infrastruktur maupun program peningkatan kegiatan ekonomi yang mendukung kegiatan pariwisata telah menjadi prioritas dalam perencanaan K/L.

Pengembangan ekonomi berbasis pengembangan kawasan ekonomi tematik berupa Agropolitan (termasuk agrowisata) dan Minapolitan, serta pengembangan Koridor dan Gugus Wisata, merupakan konsep yang tepat terutama terkait upaya pemerataan ekonomi di Provinsi Jawa Timur. Pengembangan Agropolitan dan Minapolitan dapat menjangkau wilayah-wilayah yang menjadi kantong-kantong kemiskinan.

Sebagai destinasi wisata alam, wilayah TN BTS harus dijaga keberlanjutannya agar tidak terjadi degradasi lingkungan yang tentunya mempengaruhi kualitas obyek wisata tersebut. Dengan demikian daya dukung lingkungan menjadi salah satu parameter untuk membatasi kegiatan yang dilakukan di wilayah TN BTS. Di sisi lain, obyek wisata lainnya seperti wisata agro maupun budaya menjadi potensi untuk lebih ditingkatkan. Keberagaman jenis obyek wisata tersebut menjadi potensi untuk lebih mengembangkan kegiatan pariwisata di Kawasan BTS;

Keberagaman potensi wisata dan produk perkebunan belum dioptimalkan, selain itu juga belum diintegrasikannya antar potensi wisata menjadi tantangan tersendiri sehingga diperlukan pengembangan potensi-potensi tersebut agar dapat meningkatkan perekonomian khususnya bagi masyarakat sekitar maupun kontribusi PDRB sektor pariwisata terhadap perekonomian Provinsi Jawa Timur. Sebagai contoh pengembangan paket-paket wisata yang terintegrasi diantara kawasan dikarenakan saat ini para wisatawan masih terfokus pada wisata kawasan kawah Bromo. Dengan adanya integrated tourism tour diharapkan destinasi wisata yang terdapat di Batu-Malang-Bromo dapat terintegrasi dan menarik wisatawan dalam meningkatkan waktu tinggal. Selain itu, tantangan terbesar di Kawasan BTS yaitu kurang optimalnya pengembangan Pariwisata Bromo-Tengger-Semeru dan sekitarnya serta kurangnya dukungan pengembangan Agropolitan dan Minapolitan untuk memberikan nilai tambah ekonomi.

IV.3.1.3 Penguatan Konektivitas

Aksesibilitas menuju Kawasan destinasi wisata TN BTS dapat ditempuh dengan transportasi udara dan/atau laut, kemudian berganti dengan transportasi darat, antara lain: (a) akses udara melalui Bandara Internasional Juanda di Surabaya dan Bandara Domestik Abdurrahman Saleh di Malang, (b) akses laut melalui Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dan Pelabuhan Tanjung Tembaga Probolinggo, (c) akses darat melalui jaringan kereta api maupun jaringan jalan. Jaringan Rel Kereta Api menuju BTS menghubungkan stasiun Kereta Api Malang, Surabaya, Pasuruan, dan Probolinggo dengan *hub* utama yang menjadi pintu masuk menuju BTS adalah Probolinggo (Kota dan Pertigaan Tongas) dan Pasuruan. Sedangkan yang melalui Malang dan

Lumajang masih terbatas jumlahnya, terbatas kepada wisata minat khusus (pendakian ke Semeru, perkemahan di Ranu Pane – Ranu Kumbolo, dan ibadah umat Hindu di Pura Mandhara Giri Semeru Agung.

Secara keseluruhan aksesibilitas menuju destinasi wisata BTS cukup mudah, terutama untuk Kawasan Bromo. Namun, aksesbilitas menuju kawasan wisata masih kurang nyaman, khususnya dari Kabupaten Malang, seperti masih banyak jalan yang sempit dan berlubang dan kurangnya kapasitas kendaraan yang dapat melalui jalur tersebut. Hal ini menyebabkan wisatawan cenderung memilih jalur dari Kabupaten Probolinggo karena lebih nyaman walaupun jarak tempuhnya lebih lama.

Selain itu untuk jalur melalui laut yaitu Pelabuhan Tanjung Tembaga Probolinggo tidak memiliki dermaga khusus untuk kapal Cruise, padahal potensi wisatawan mancanegara paling besar berasal dari kapal Cruise tersebut. Sehingga perlu adanya pengembangan pelabuhan Tanjung Tembaga dan pelabuhan Probolinggo serta akses menuju ke pelabuhan.

Gambar 4. 23 Peta Konektivitas dan Keterkaitan antar Pusat Kegiatan Kawasan BTS

Sumber: Sekretariat Kebijakan Satu Peta, 2019

Kawasan BTS yang mempunyai peran sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang terletak di Kota Malang dan pada Sistem Perkotaan meliputi kawasan Kota Malang – Kota Sidoarjo – Kota Mojokerto. Selain itu untuk Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) berada di Kota Probolinggo. Serta Pusat Kegiatan Lokal berada di Kabupaten Malang, Kabupaten Lumajang, Kabupayen Probolinggo, Pasuruan dan Kota Batu.

IV.3.1.4 Tema Pembangunan Kawasan Prioritas

Berdasarkan kondisi saat ini dan arah perkembangan ekonomi di Kawasan BTS, pembangunan Kawasan BTS akan diprioritaskan pada kegiatan pariwisata baik di wilayah inti TN BTS maupun kawasan sekitarnya. Selain itu, dengan memanfaatkan potensi perkebunan di sekitarnya, pembangunan di Kawasan BTS juga akan diprioritaskan pada kegiatan agroproduksi dan agroindustri dengan memanfaatkan pusat kegiatan pariwisata sebagai pusat distribusi hasil dari agroproduksi dan agroindustri.

IV.3.1.5 Strategi Percepatan Pembangunan Kawasan Prioritas

Strategi percepatan pembangunan ekonomi di Kawasan BTS akan difokuskan dengan menguatkan infrastruktur pada pusat pertumbuhan yang telah ada, yaitu destinasi wisata TN BTS. Selain itu juga akan diberikan penguatan berupa insentif bagi pembangunan pusat-pusat pertumbuhan baru seperti KEK Singhasari, pembangunan *Bromo Vulcanic Park*, maupun desa-desa wisata dan pusat-pusat produksi perkebunan dan industri berbasis hasil perkebunan. Selain itu perlu ditambahkan penyediaan infrastruktur yang memperkuat kelancaran di pusat-pusat pertumbuhan tersebut sehingga diperlukan strategi dengan pendekatan melalui aspek sosial, ekonomi dan infrastruktur.

Pada aspek sosial diperlukan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat; peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan dan latihan kerja sesuai dengan kebutuhan dunia kerja; dan perluasan lapangan pekerjaan yang mampu menyerap tenaga kerja lokal secara optimal melalui pengembangan kegiatan ekonomi wilayah berbasis komoditas unggulan. Pada aspek ekonomi diperlukan pengembangan pariwisata Bromo-Tengger-Semeru dan sekitarnya termasuk KEK Singhasari yang didukung pengembangan Agropolitan dan Minapolitan yang memberikan nilai tambah ekonomi. Pada aspek infratruktur diperlukan pengembangan jaringan logistik yang efisien dari pusat-pusat produksi di dalam kawasan maupun dengan pusat-pusat produksi yang memiliki hubungan erat; pengembangan bandara dan pelabuhan; pengembangan sarana dan prasarana pendukung perumahan dan permukiman; pengembangan jaringan drainase dan persampahan; penyediaan air bersih; Keseluruhan strategi ini ditujukan untuk mendukung perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di wilayah Bromo-Tengger-Semeru.

IV.3.1.6 Kebijakan, Program/Kegiatan yang Dibutuhkan dalam Rangka Percepatan Kawasan BTS

Kegiatan ekonomi yang layak menjadi pemicu pertumbuhan di Kawasan BTS adalah Pariwisata, baik melalui Pengembangan area inti dan *hinterland* KSPN BTS, maupun pengembangannya di wilayah terpilih BOP BTS, Juga pada Pembangunan *Bromo Vulcanic Park*, *Tengger Culture Centre*, Ranu-Ranu Pane & Gumbolo serta banyaknya air terjun seperti Madakaripura atau Kampung Sewu. Area hinterland BTS juga sampai kepada wilayah Batu yang juga kuat dalam pengembangan Agrowisata dan termasuk KEK Singhasari untuk mendukung kegiatan ekonomi.

Gambar 4.24 Peta *Masterlist Project* Kawasan BTS

Sumber: Sekretariat Kebijakan Satu Peta, 2019

Program agropolitan/minapolitan yang mendukung percepatan Kawasan BTS memiliki berapa sasaran kegiatan diantaranya: Pengembangan Agropolitan Poncokusumo-Tirtoyudo – Ampelgading, Pengembangan Agropolitan Wajak-Tumpang-Jabon – Kabupaten Malang, Sub Terminal Agrobis – Kabupaten Malang, Minapolitan Sendangbiru – Kabupaten Malang, Pengembangan Agropolitan Senduro-Candipuro- Pasrujambe-Gucialit – Kabupaten Lumajang, Pengembangan Agropolitan Sukapura-Lumbang-Sumber – Kabupaten Probolinggo, Pengembangan Agropolitan Krucil – Kabupaten Probolinggo, Pengembangan Agropolitan Tosari-Tutur-Puspo – Purwosari – Kabupaten Pasuruan, Pengembangan Agropolitan Wonosari – Andonosari – Kabupaten Pasuruan, Penataan dan Pengembangan kawasan minapolitan – Kabupaten Pasuruan, Penataan dan pengembangan wisata edukasi peternakan Purwosari dan Penataan Kawasan Pusat Pelayanan Peternakan (UPA) – Kabupaten Pasuruan, Pengembangan Agropolitan Kota Probolinggo – Kota Probolinggo,

Pembangunan Pasar Agro dan Pasar Tradisional Triwung Kidul – Kota Probolinggo, Revitalisasi/Pembangunan Rumah Khusus Nelayan – Kota Pasuruan, Pembangunan Gudang dan Cold Storage Pertanian – Kota Batu, Pengembangan Pertanian Organik Berbasis Potensi Unggulan Desa – Kota Batu, Pengembangan Integrated Farming – Kota Batu serta Agrowisata Batu – Kota Batu.

IV.3.2 Kawasan Pendukung Selingkar Ijen

IV.3.2.1 Gambaran Umum Kawasan Pendukung Selingkar Ijen

A. Geografi WIlayah

Kawasan Pendukung Selingkar Ijen berada di wilayah paling timur Provinsi Jawa Timur, dimana kawasan ini meliputi 4 Kabupaten yang mengelilingi Gunung Ijen dan Gunung Raung, yakni Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Jember. Secara khusus Kawasan Pendukung Selingkar Ijen memiliki *relief* yang beraneka ragam, terdiri dari dataran tinggi Pegunungan atau Gunungapi dan Perbukitan (Gunung Ijen dan Gunung Raung), dataran rendah, dan daerah pantai.

Gambar 4. 25 Peta Delineasi Kawasan Pendukung Selingkar Ijen

Sumber : Sekretariat Kebijakan Satu Peta, 2019

Gunung Ijen yang merupakan potensi unggulan di Kawasan Pendukung Selingkar Ijen berada dalam wilayah Cagar Alam dengan ketinggian sebesar 2.386 mdpl dan luas kawah sebesar 5.466 hektar, sedangkan Gunung Raung memiliki ketinggian sebesar 3.260 mdpl. Berdasarkan fungsinya, Kabupaten Banyuwangi dan Jember diperuntukan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah dengan fungsi pertanian tanaman pangan, holtikultura, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan pertambangan, pendidikan, kesehatan dan pariwisata. Sedangkan Kabupaten Situbondo dan Bondowoso diperuntukkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal.

Secara geografis, Kawasan Pendukung Selingkar Ijen berbatasan dengan Selat Madura di sebelah Utara, Selat Bali di sebelah Timur, Samudera Hindia di sebelah selatan serta Kabupaten Lumajang dan Probolinggo disebelah Barat. Total luas Kabupaten yang berada di Kawasan Pendukung Selingkar Ijen sebesar 12.274,44 km^2. Berdasarkan zona lokasinya, Kawasan Pendukung Selingkar Ijen termasuk kedalam zona pegunungan dan gunung berapi, sehingga Kawasan Pendukung Selingkar Ijen memiliki potensi tambang yang cukup besar dan dikategorikan sebagai daerah yang relatif subur. Seiring dengan potensi wilayah Kawasan Pendukung Selingkar Ijen yang berada di kawasan pegunungan dan gunung berapi, Kawasan Pendukung Selingkar Ijen mayoritas berada di Kawasan Rawan Bencana Gunung Api Tingkat II dan Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Menengah-Tinggi.

Gambar 4. 26 Kondisi Topografi dan Rawan Bencana Kawasan Pendukung Selingkar Ijen

Sumber: Sekretariat Kebijakan Satu Peta, 2018

B. Kependudukan dan Sosial Budaya

Secara demografis, jumlah penduduk yang berada di Kawasan Pendukung Selingkar Ijen sebesar 5.503.000 jiwa, dengan jumlah penduduk tertinggi berada di Kabupaten Jember sebesar 2.441.000 jiwa dan jumlah penduduk terendah berada di Kabupaten Situbondo sebesar 680.000 jiwa. Dari keempat Kabupaten, wilayah yang memiliki kepadatan paling tinggi di Kawasan Pendukung Selingkar Ijen berada di Kabupaten Jember sebesar 789 jiwa/km^2. Meskipun pertumbuhan penduduk di Kawasan Pendukung Selingkar Ijen memiliki kecenderungan pertumbuhan menurun, namun secara umum laju pertumbuhan penduduk di Kawasan Pendukung Selingkar Ijen masuk dalam kategori sedang. Apabila dilihat dari tingkat kemiskinan, Kawasan Pendukung Selingkar Ijen termasuk dalam kategori kelas penduduk miskin yang cukup rendah. Berdasarkan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pembangunan manusia di Kawasan Pendukung Selingkar Ijen terus mengalami kemajuan dengan rata-rata nilai IPM di Kawasan Pendukung Selingkar Ijen yang masuk dalam kategori Sedang, kecuali untuk Kabupaten Banyuwangi yang masuk dalam kategori tinggi. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk).

Tabel 4. 8 Kondisi Kependudukan di Kawasan Pendukung Selingkar Ijen

No	Wilayah	Jumlah Penduduk Tahun 2018 (ribu)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun (2010-2018)	Tren Pertumbuhan	Kelas Penduduk Miskin	IPM
1.	Banyuwangi	1.610	0,42	Turun	Rendah	Tinggi
2.	Situbondo	680	0,60	Turun	Rendah	Sedang
3.	Bondowoso	772	0,58	Turun	Rendah	Sedang
4.	Jember	2.441	0,56	Turun	Sedang	Sedang

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2019

Gambar 4. 27 Peta Kepadatan Penduduk (kiri) dan Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2010-2018 (kanan) di Kawasan Pendukung Selingkar Ijen

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, diolah Sekretariat Kebijakan Satu Peta 2019

Gambar 4. 28 Peta Sebaran Kemiskinan (kiri) dan Indeks Pembangunan Manusia (kanan) di Kawasan Pendukung Selingkar Ijen

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, diolah Sekretariat Kebijakan Satu Peta 2019

C. Sektor dan Komoditas Unggulan

Kabupaten di Kawasan Pendukung Selingkar Ijen memiliki keunggulan di bidang agropolitan dan minapolitan. Berdasarkan data Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2019, luas kawasan agropolitan dan minapolitan di Kabupaten Banyuwangi sebesar 12.936,59 km^2 dengan komoditas unggulannya yaitu Jeruk Siam. Tingginya jumlah produksi jeruk siam ini membuat Kabupaten Banyuwangi ditetapkan sebagai *pilot project* kawasan sentra jeruk nasional oleh Kementerian Pertanian pada Tahun 2016. Hasil produksi komoditas tertinggi Kabupaten Banyuwangi di Sektor Agropolitan berturut-turut yakni

jeruk siam, buah naga, jagung, kedelai, kopi, dan padi ladang. Sedangkan untuk Sektor Minapolitan, komoditas unggulan di Kabupaten Banyuwangi berturut-turut yakni Lemuru dan Cangkalang. Kabupaten Bondowoso memiliki luas kawasan agropolitan sebesar 47.923,7 hektar dengan komoditas unggulan berupa Kopi baik Robusta maupun Arabika. Saat ini, sepertiga dari Produksi Kopi Arabika jenis *Java Ijen-Raung* sudah mendapat sertifikat Indikasi Geografis dan telah menembus pasar Eropa.

Pendukung utama pertumbuhan perekonomian Kabupaten Bondowoso adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Komoditas tanaman pangan di Kabupaten Situbondo yang memiliki kontribusi penting antara lain padi, jagung, kedelai, kacang tanah, ketela pohon, ubi jalar, bayam, kangkung, buncis, kacang panjang, tomat, ketimun, terung, cabe rawit, bawang merah, sawi, dan kubis. Sedangkan, komoditas perkebunan yang memiliki kontribusi penting antara lain tembakau, kelapa, dan kopi. Komoditas tanaman pangan yang menjadi komoditas tanaman pangan basis di sebagian besar kecamatan adalah padi dan jagung. Sebagian besar wilayah Kabupaten Jember merupakan dataran rendah, dengan ketinggian tanah rata-rata 83 meter diatas permukaan laut dan merupakan daerah yang cukup subur dan sangat cocok untuk pengembangan komoditi pertanian dan perkebunan. Potensi geografis Kabupaten Jember mempengaruhi tingginya produksi komoditas pertanian. Hal ini menjadikan Kabupaten Jember dikenal sebagai daerah atau lumbung pangan dan penghasil devisa negara sektor perkebunan di Provinsi Jawa Timur.

Gambar 4. 29 Sektor Produksi Komoditas Unggulan di Kawasan Pendukung Selingkar Ijen

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Timur, diolah Sekretariat Kebijakan Satu Peta 2019

Melihat dari komoditas unggulan yang ada di Kawasan Pendukung Selingkar Ijen di bidang pertanian dan perkebunan, seperti kopi dan tanaman holtikultura serta di bidang perikanan, dalam pengembangannya Kawasan Pendukung Selingkar Ijen difokuskan menjadi kawasan unggulan agrowisata (sektor pariwisata, perkebunan dan perikanan). Sektor pariwisata yang terdapat di Kawasan Pendukung Selingkar Ijen didominasi oleh Wisata Alam, salah satunya ialah Wisata Gunung. Obyek wisata Gunung Ijen yang paling terkenal adalah Wisata Kawah Ijen. Dalam beberapa tahun terakhir, potensi wisata Kawah Ijen cukup tinggi serta berkembang sangat pesat. Hal ini seiring dengan banyaknya beberapa atraksi tambahan yang dikembangkan, salah satunya ialah atraksi pertunjukan musik *International Tour de Banyuwangi Ijen* dan *Jazz Ijen Banyuwangi.* Inovasi terhadap atraksi wisata yang sudah ada serta kolaborasi terhadap sektor lainnya ini dapat mempengaruhi perkembangan pariwisata dan mempertahankan keberlanjutan wisata tersebut.

IV.3.2.2 Potensi dan Tantangan

Pada bidang pariwisata, Kawasan Pendukung Selingkar Ijen memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk dapat meningkatkan PDRB dan pertumbuhan ekonomi, salah satunya ialah keanekaragaman potensi sumber daya alam dan lingkungan yang akan memberikan dorongan terhadap pengembangan perekonomian. Dukungan potensi agropolitan, baik di bidang pertanian dan perkebunan, seperti kopi dan tanaman holtikultura lainnya serta di bidang perikanan juga didukung oleh kondisi geografis dan iklim Kawasan Pendukung Selingkar Ijen yang berupa pegunungan dan kawasan pesisir pantai. Seiring dengan potensi tersebut, pengembangan di sektor Pariwisata, khususnya agrowisata, menjadi salah satu sektor unggulan Kawasan Pendukung Selingkar Ijen yang layak untuk dikembangkan. Selain itu, Kawasan Pendukung Selingkar Ijen juga dikenal sebagai "Segitiga Berlian" yaitu gugus wisata yang indah yang secara geografis berbentuk segitiga yang meliputi Kawah Ijen, Pantai Sukamade, dan Pantai Plengkung (G-land). Sebagian dari potensi wisata Kawasan Pendukung Selingkar Ijen tersebut berada di dalam kawasan hutan produksi maupun konservasi. Tingginya potensi Sektor Agropolitan di Kawasan Pendukung Selingkar Ijen saat ini didukung dengan penyediaan infrastruktur sumber daya air, berupa lokasi sistem penyediaan air minum (SPAM), bendungan dan sabo DAM.

Gambar 4. 30 Peta Infrastruktur Sumberdaya Air di Kawasan Pendukung Selingkar Ijen

Sumber: Sekretariat Kebijakan Satu Peta, 2018

Kawasan Pendukung Selingkar Ijen memendam potensi *geopark* yang dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata baru berbasis geologi. Kawasan Pendukung Selingkar Ijen juga memiliki potensi *geothermal* (panas bumi), sehingga dapat dikembangkan sebagai pembangkit listrik tenaga geothermal yang lokasinya berada sekitar Pegunungan Ijen (Gunung Ijen dan Gunung Argopuro).

Gambar 4. 31Peta Daya Tarik Wisata Kawasan Pendukung Selingkar Ijen

Sumber: Sekretariat Kebijakan Satu Peta, 2019

Lebih lanjut, mengingat lokasi yang juga cukup dekat dengan Bali yang telah menjadi sentra wisata kunjungan wisatawan mancanegara, Kawasan Pendukung Selingkar Ijen memiliki potensi pengembangan wisata dan pendukung wisata berskala internasional, misalnya berupa pengembangan *marina bay* yang dapat menampung *cruise ship* wisata.

Potensi perikanan tangkap juga melimpah di sekitar Kawasan Pendukung Selingkar Ijen, bahkan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Muncar merupakan salah satu tempat pendaratan ikan komoditas ekspor (tuna, sarden, makarel) terbesar di Indonesia. Potensi yang juga sangat menarik di Kawasan Pendukung Selingkar Ijen adalah pengembangan industri pengolahan, salah satunya yakni pengembangan Kawasan Industri (KI) baru yang diharapkan setelah beroperasi dapat menjadi pusat pengolahan penambahan nilai komoditas produksi dari wilayah Kawasan Pendukung Selingkar Ijen dan sekitarnya. Potensi aksesibilitas dan konektifitas antar wilayah dalam rangka mengembangkan dan mengoptimalkan potensi Kawasan Pendukung Selingkar Ijen saat ini sudah didukung dengan adanya akses bandara dan pelabuhan. Hal ini dapat dilihat dari adanya dua Bandara yang terletak di sekitar Kawasan Pendukung Selingkar Ijen, yakni Bandar Udara Internasional Banyuwangi di Kabupaten Banyuwangi dan Bandar Udara Notohadinegoro di Kabupaten Jember. Selain itu terdapat pula jaringan rel Kereta Api serta beberapa pelabuhan yang tersebar di sepanjang garis pantai keempat Kabupaten. Hal ini memberikan potensi terhadap terhubungnya konektivitas serta pergerakan orang dan barang, baik dari dan menuju Kawasan Pendukung Selingkar Ijen, maupun dari dan menuju kawasan di sekitarnya.

Gambar 4. 32 Infrastruktur di Kawasan Pendukung Selingkar Ijen

(a) Bandara Internasional Banyuwangi

(b) Pelabuhan Ketapang

Sejalan dengan potensi yang dimiliki Kawasan Pendukung Selingkar Ijen, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019, Kabupaten Situbondo dan Bondowoso merupakan 2 (dua) dari 4 (empat) Kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang diindentifikasi perkembangannya relatif kurang dan mengalami ketertinggalan dibandingkan dengan wilayah lainnya secara nasional. Daerah Tertinggal rata-rata mempunyai keterbatasan infrastruktur & komunikasi, rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan, serta banyaknya sumberdaya yang belum dikelola secara optimal.

Tantangan lainnya yang dihadapi oleh Kawasan Pendukung Selingkar Ijen yaitu isu terkait keberlanjutan lingkungan, dimana pengembangan ekonomi Kawasan Pendukung Selingkar Ijen perlu mempertimbangkan daya dukung lingkungan (*environmental carrying capacity*), termasuk keberlanjutan kawasan hutan yang berada di Kawasan Pendukung Selingkar Ijen. Empat kabupaten yang berada pada Kawasan Pendukung Selingkar Ijen memainkan peran penting dalam siklus air sebagai daerah resapan dan tangkapan air. Seiring dengan pembangunan yang menjaga kelestarian hutan dan lingkungan, hal ini juga memberikan kesempatan kesejahteraan masyarakat pedesaan di wilayah hutan itu sendiri, dimana masyarakat menjadi titik utama dari pembangunan berkelanjutan. Pendekatan ini juga bersinergi dengan upaya mitigasi risiko bencana longsor dan banjir, dimana konservasi daerah aliran sungai memainkan peranan utama. Kelestarian hutan turut berkontribusi kepada terjaganya keanekaragaman hayati, termasuk peran kawasan bakau untuk ekosistem pesisir. Di sisi lain, potensi bencana dan mitigasi risiko juga perlu menjadi perhatian, karena masih ditemukan permasalahan seperti sungai yang justru menyempit dari hulu ke hilir, manajemen air yang tumpang tindih antara drainase dan pengairan pertanian, serta pengembangan kawasan di lokasi yang rawan longsor tanpa mitigasi yang memadai. Ketimpangan akses menyebabkan Provinsi Jawa Timur belum dapat mengoptimalkan potensinya. Sebagai ilustrasi, potensi pariwisata dan industri berbasis agro dan maritim di pesisir selatan terkendala jaringan listrik dan energi yang minim. Konektivitas di pesisir selatan Tapal Kuda juga belum terwujud sehingga mendorong potensi kesenjangan dengan pesisir utara. Dengan demikian, pembangunan kawasan pendukung Selingkar Ijen perlu difokuskan kepada sektor pariwisata,

khususnya agrowisata, dengan memperhatikan keberlanjutan di sektor ekonomi, lingkungannya serta penyediaan infrastruktur pendukungnya.

Dengan demikian, secara umum tantangan yang dihadapi di Kawasan Pendukung Selingkar Ijen adalah kurang optimalnya pengembangan agrobisnis (agropolitan dan minapolitan) dan pariwisata untuk memberikan nilai tambah ekonomi serta belum tergarapnya energi alternatif.

IV.3.2.3 Penguatan Konektivitas

Penguatan konektivitas Kawasan Pendukung Selingkar Ijen di sektor pariwisata, khususnya agrowisata, perlu didukung dengan penyediaan dan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Pemenuhan infrastruktur pendukung yang layak melalui pengembangan dan pengelolaan infrastruktur, termasuk infrastruktur sumber daya air dapat dilakukan secara partisipatif dan turut melibatkan berbagai stakeholder serta masyarakat. Hal ini dikarenakan, infrastruktur pendukung tersebut, khususnya infrastruktur sumberdaya air merupakan bagian penting dalam upaya mendukung pengembangan dan pengelolaan kawasan agropolitan secara umum dan ketahanan pangan di kawasan tersebut secara khusus. Dengan demikian, diperlukan integrasi pengelolaan sumber air permukaan dari hulu sampai dengan dengan hilir yang meliputi jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier pada semua kewenangan Daerah Irigasi (DI). Seiring dengan pemenuhan infrastruktur ini, daya saing dan peningkatan produktivitas kawasan agro, termasuk agroindustri dan agrowisata, dapat diperkuat pengembangannya.

Gambar 4. 33 Peta Konektivitas dan Keterkaitan antar Pusat Kegiatan Kawasan Pendukung Selingkar Ijen

Sumber: Sekretariat Kebijakan Satu Peta, 2019

Selain itu, adanya kendala terhadap keterbatasan sumber pendanaan pemerintah dalam memenuhi cakupan pelayanan infrastruktur dalam rangka mengurangi kemiskinan dan ketimpangan wilayah dapat dilakukan melalui upaya alternatif penyediaan sumber pendanaan non-APBD. Pelibatan berbagai sektor dalam mengembangkan Kawasan Pendukung Selingkar Ijen dapat memperkuat peran dan fungsi Kawasan Pendukung Selingkar Ijen terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur secara umum dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten di kawasan itu secara khusus.

IV.3.2.4 Tema Pembangunan Kawasan Pendukung

Kawasan Pendukung Selingkar Ijen memiliki kesamaan sektor unggulan berupa pariwisata, khususnya dibidang agrowisata, yang didukung pula oleh sektor perkebunan dan perikanan. Pengembangan ekonomi berbasis pengembangan kawasan ekonomi tematik berupa Koridor dan Gugus Wisata, Agropolitan dan Minapolitan, serta Kawasan Industri merupakan konsep yang tepat terutama terkait upaya pemerataan ekonomi di Provinsi Jawa Timur. Pengembangan Koridor dan Gugus Wisata salah satunya dapat difokuskan pada penataan dan promosi linkage (koridor dan gugus) wisata Kawah Ijen (blue fire) yang sudah terkenal di mancanegara dengan daya tarik wisata sekitarnya. Pengembangan Agropolitan dan Minapolitan dapat menjangkau wilayah-wilayah yang menjadi kantong-kantong kemiskinan. Sedangkan pengembangan Kawasan Industri baru yang menjadi pusat pengolahan dapat meningkatkan nilai tambah dari produksi komoditas sekitar Kawasan Pendukung Selingkar Ijen.

Salah satu tantangan yang dihadapi oleh Kawasan Pendukung Selingkar Ijen yaitu isu terkait keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, pengembangan ekonomi Kawasan Pendukung Selingkar Ijen perlu mempertimbangkan daya dukung lingkungan (environmental carrying capacity), termasuk keberlanjutan kawasan hutan yang berada di Kawasan Pendukung Selingkar Ijen. Keempat kabupaten yang berada pada Kawasan Pendukung Selingkar Ijen memainkan peran penting dalam siklus air sebagai daerah resapan dan tangkapan air. Seiring dengan pembangunan yang menjaga kelestarian hutan dan lingkungan, hal ini juga memberikan kesempatan kesejahteraan masyarakat pedesaan di wilayah hutan itu sendiri, dimana masyarakat menjadi titik utama dari pembangunan berkelanjutan. Pendekatan ini juga bersinergi dengan upaya mitigasi risiko bencana longsor dan banjir, dimana konservasi daerah aliran sungai memainkan peranan utama. Kelestarian hutan turut berkontribusi kepada terjaganya keanekaragaman hayati, termasuk peran kawasan bakau untuk ekosistem pesisir.

Potensi bencana dan mitigasi risiko juga perlu menjadi perhatian, karena masih ditemukan permasalahan seperti sungai yang justru menyempit dari hulu ke hilir, manajemen air yang tumpang tindih antara drainase dan pengairan pertanian, dan pengembangan kawasan di lokasi yang rawan longsor tanpa mitigasi yang memadai. Ketimpangan akses menyebabkan Provinsi Jawa Timur belum dapat mengoptimalkan potensinya. Sebagai ilustrasi, potensi pariwisata dan industri berbasis agro dan maritim di pesisir selatan terkendala jaringan listrik dan energi yang minim. Konektivitas di pesisir selatan Tapal Kuda juga belum terwujud sehingga mendorong potensi kesenjangan dengan pesisir utara. Dengan demikian, pembangunan kawasan

pendukung Selingkar Ijen perlu difokuskan kepada sektor pariwisata, khususnya agrowisata, dengan memperhatikan keberlanjutan di sektor ekonomi dan lingkungannya.

IV.3.2.5 Strategi Percepatan Pembangunan Kawasan Pendukung

Kawasan pendukung di Selingkar Ijen akan dioptimalkan pengembangannya pada sektor pariwisata. Strategi percepatan pengembangan Kawasan Pendukung Selingkar Ijen dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan, yang meliputi aspek sosial, ekonomi, dan infrastruktur. Berikut beberapa hal yang dapat dilakukan yang terbagi menjadi beberapa aspek, yang meliputi:

a. Aspek Sosial, meliputi Peningkatan pemahaman pola hidup sehat di masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga; Peningkatan akses layanan pendidikan terhadap masyarakat di daerah terpencil; dan Perluasan lapangan pekerjaan yang mampu menyerap tenaga kerja lokal secara optimal melalui pengembangan kegiatan ekonomi wilayah berbasis komoditas unggulan;.
b. Aspek Ekonomi, meliputi Peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor primer melalui hilirisasi produk unggulan; Peningkatan KAD dalam pengembangan kawasan yang mampu mendorong pembangunan sektor unggulan; Perluasan pemasaran produk dengan upaya mewujudkan keterkaitan pasar lokal dengan pasar regional; dan Pengembangan Pariwisata Ijen dan sekitarnya yang didukung pengembangan Agropolitan dan Minapolitan yang memberikan nilai tambah ekonomi; dan
c. Aspek Infrastruktur, meliputi peningkatan layanan prasarana transportasi dalam rangka mendukung sistem logistik dan pariwisata; peningkatan kualitas lingkungan permukiman melalui penyediaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman; Pengembangan sarana dan prasarana pendukung pariwisata; Pengendalian perubahan penggunaan lahan khususnya pada kawasan lindung; dan Peningkatan konektivitas ekonomi melalui penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang memadai dan handal.

IV.3.2.6 Kebijakan, Program/Kegiatan yang dibutuhkan dalam Rangka Percepatan Kawasan Pendukung Selingkar Ijen

Melihat dari tingginya potensi di bidang pariwisata, pertanian dan perkebunan di Kawasan Pendukung Selingkar Ijen, serta tantangan yang akan dihadapi dalam mengoptimalkan pengembangan sektor tersebut, sehingga diperlukan peningkatan fasilitas pendukung pariwisata dan pertanian, baik berupa sarana pendukung maupun utilitas listrik, jaringan jalan, maupun sumber daya air. Adapun beberapa kegiatan pengembangan infrastruktur yang dapat dilakukan seperti, pembangunan dan pengembangan di sektor ketenagalistrikan, peningkatan kapasitas jalan nasional penghubung kawasan dan jalan akses menuju kawasan strategis (terminal, pelabuhan, dan bandara) serta pembangunan Jalan Pantai Selatan (Pansela) yang akan memberikan dampak langsung terhadap perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di sisi selatan Provinsi Jawa Timur secara khusus dan Pulau Jawa secara umum. Pada sektor pariwisata, potensi *geopark* yang sudah ada di Kabupaten Bondowoso dan Banyuwangi dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata baru berbasis

geologi dengan didukung oleh berbagai sarana dan prasarana. Selain itu, pembangunan dan pengembangan kawasan pendukung sektor perekonomian di bidang infrastruktur dan industri di Kabupaten Banyuwangi berpotensi untuk dikembangkan sebagai program pemerataan pembangunan di Kawasan Pendukung Selingkar Ijen.

Gambar 4. 34 Peta *Masterlist Project* Kawasan Pendukung Selingkar Ijen

Sumber: Sekretariat Kebijakan Satu Peta, 2019

Perwujudan dari prioritas kegiatan ekonomi yang dikemas dalam Program Agropolitan/Minapolitan tersebut diorientasikan pada sasaran sebagai berikut:

a. Pengembangan Kopi Arabika (7.420 hektar) serta Sarana Pengolahan kopi di Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Jember;

b. Pembangunan Industri Pupuk Organik di Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Situbondo serta Mesin Pengolahan Mokav di Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Situbondo;

c. Agrowisata Gunung Gambir Sumberbaru di Kabupaten Jember;

d. Agropolitan Jember (Garahan Silo-Ledokombo-Sukowono-Jember) di Kabupaten Jember;

e. Agropolitan Jenggawah (Tembakau) di Kabupaten Jember;

f. Minapolitan Pesanggrahan-Bangorejo di Kabupaten Jember;

g. Agropolitan Banyuwangi (Glagah, Giri, Bagorejo, Kalibaru, Kalipuro) di Kabupaten Banyuwangi;

h. Minapolitan Muncar-Srono di Kabupaten Banyuwangi;

i. Agropolitan Bondowoso (Sempol, Sumberwringin, Sukosari, Maesan, Tamanan) di Kabupaten Bondowoso;

j. Pengembangan Kawasan Peternakan Modern di Kabupaten Bondowoso;

k. Pengembangan Pertanian Organik Bondowoso di Kabupaten Bondowoso;

l. Pengembangan Cluster Kopi Bondowoso di Kabupaten Bondowoso;

m. Pengembangan Industri Gula Bondowoso di Kabupaten Bondowoso;

n. Agropolitan Situbondo (Asembagus, Arjasa) di Kabupaten Situbondo;

o. Revitalisasi Rumah Potong Hewan (RPH) dan menjadi skala internasional; dan

p. Revitalisasi industri rumput laut (kebutuhan kebun bibit rumput laut) dan Kabupaten Situbondo.

IV.4. Kawasan Prioritas Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan

IV.4.1 Gambaran Umum Kawasan Prioritas Selingkar Wilis dan Lintas Selatan

IV.4.1.1 Geografi Wilayah

Kawasan Prioritas Selingkar Wilis dan Lintas Selatan terletak di lingkar Gunung Wilis dengan ketinggian sebesar 2.563 meter diatas permukaan laut. Kawasan tersebut meliputi 13 (tiga belas) kabupaten yaitu Kabupaten Tulungagung, Trenggalek, Ponorogo, Madiun, Nganjuk, Kediri, Magetan, Ngawi, Blitar, Pacitan, Kota Madiun, Kota Blitar, dan Kota Kediri. Jarak antara pusat Kota Surabaya sebagai ibukota Provinsi Jawa Timur menuju ke Gunung Wilis adalah 160 kilometer. Berdasarkan fungsinya, Kabupaten Madiun, Blitar, dan Pacitan diperuntukan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah Provinsi Jawa Timur dengan fungsi pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan, pertambangan, pendidikan, kesehatan dan pariwisata.

Secara geografis, Kawasan Prioritas Selingkar Wilis dan Lintas Selatan berbatasan langsung dengan Kabupaten Bojonegoro di sebelah utara, Kabupaten Jombang di sebelah timur, Samudera Hindia di sebelah selatan. Luas Kawasan Prioritas Selingkar Wilis dan Lintas Selatan adalah seluas 11.955 km2 dengan kabupaten/kota yang terluas adalah Kabupaten Pacitan. Kawasan Prioritas Selingkar Wilis dan Lintas Selatan memiliki 2 (dua) karakteristik relief geografis yaitu Kawasan Prioritas Selingkar Wilis dan Lintas Selatan yang berada di topografi pegunungan (lebih dari 1.000 meter) dan bergelombang (151-500 meter).

Gambar 4. 35 Peta Kawasan Prioritas Selingkar Wilis dan Lintas Selatan

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Timur, 2019

Kondisi geografis tersebut berdampak terhadap pengembangan Kawasan Agropolitan, Minapolitan, dan Agrowisata. Kawasan Prioritas Selingkar Wilis dan Lintas Selatan berada di Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Menengah, Gempa Bumi Tinggi, oleh karena itu, pengembangan Kawasan Prioritas Selingkar Wilis dan Lintas Selatan sangat penting untuk memperhatikan kondisi geografis tersebut.

Gambar 4. 36 Peta Kondisi Topografi dan Rawan Bencana Kawasan Prioritas Selingkar Wilis dan Lintas Selatan

Sumber: Sekretariat Kebijakan Satu Peta, 2018

IV.4.1.2 Kependudukan dan Sosial Budaya

Secara demografis, jumlah penduduk total di Kawasan Prioritas Selingkar Wilis dan Lintas Selatan pada tahun 2017 sekitar 9.649.663 jiwa, dengan jumlah penduduk tertinggi berada di Kabupaten Kediri yaitu 1.561.392 jiwa dan jumlah penduduk terendah di Kabupaten Blitar yaitu Kota Blitar 139.995 jiwa. Disisi lain laju pertumbuhan per tahun tertinggi berada di Kota Kediri sebesar 0,72 persen per tahun diatas rata-rata pertumbuhan penduduk di Kawasan Prioritas Selingkar Wilis dan Lintas Selatan sebesar 0,33 persen pada tahun 2016-2017. Laju pertumbuhan penduduk di Kawasan Prioritas Selingkar Wilis dan Lintas Selatan mengalami kecenderungan penurunan dengan laju pertumbuhan yang relatif rendah. Kawasan Prioritas Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan cenderung memiliki kelas penduduk miskin yang rendah, beberapa kabupaten termasuk kategori kelas penduduk miskin tinggi di Kabupaten Tulungagung, Blitar, Kota Madiun, Kota Blitar, dan Kota Kediri. Kawasan Prioritas Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan ini juga dinilai memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masuk dalam kategori tingggi di 8 (delapan) kabupaten/kota, dan kategori sedang di 5 (lima) kabupaten. Berikut ini merupakan kondisi kependudukan di Kawasan Prioritas Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan.

Gambar 4. 37 Peta Kondisi Kependudukan dan Sosial Budaya di Kawasan Prioritas Selingkar Wilis dan Lintas Selatan

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, diolah Sekretariat Kebijakan Satu Peta, 2019

Tabel 4. 9 Kondisi Kependudukan di Kawasan Prioritas Selingkar Wilis dan Lintas Selatan

No	Wilayah	Jumlah Penduduk Tahun 2017 (ribu)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun (2016-2017)	Tren Pertumbuhan	Kelas Penduduk Miskin	IPM
1	Tulungagung	1.030	0,46	Turun	Tinggi	Tinggi
2	Trenggalek	693	0,26	Turun	Rendah	Sedang
3	Ponorogo	869	0,12	Turun	Rendah	Sedang
4	Madiun	679	0,28	Turun	Rendah	Tinggi
5	Nganjuk	1.048	0,33	Turun	Rendah	Tinggi
6	Kediri	1.561	0,45	Turun	Sedang	Tinggi
7	Magetan	628	0,10	Turun	Sedang	Tinggi
8	Ngawi	829	0,05	Turun	Rendah	Sedang
9	Blitar	1.153	0,36	Turun	Tinggi	Sedang
10	Pacitan	553	0,20	Turun	Rendah	Sedang
11	Kota Madiun	176	0,28	Turun	Tinggi	Tinggi
12	Kota Blitar	139	0,63	Turun	Tinggi	Tinggi
13	Kota Kediri	284	0,72	Turun	Tinggi	Tinggi

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2019

Kondisi sosial budaya yang berada di Kawasan Prioritas Selingkar Wilis dan Lintas Selatan didominasi oleh masyarakat yang bekerja di sektor primer seperti pertanian dan peternakan yang dikembangkan menjadi Kawasan Agropolitan di Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Magetan. Selain itu, potensi pariwisata yang dimiliki berpengaruh terhadap pola perekonomian yang bergerak di sektor agrowisata seperti Agrowisata Cokelat Punung di Kabupaten Pacitan, Agrowisata Bendungan di Kabupaten Trenggalek. Dukungan pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat di Kawasan Prioritas Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan sangat bergantung terhadap komoditas unggulan.

IV.4.1.3 Sektor dan Komoditas Unggulan

Kawasan Prioritas Selingkar Wilis dan Lintas Selatan memiliki komoditi unggulan karakteristik yang berbeda di masing-masing kabupaten. Mayoritas komoditas unggulan dikembangkan menjadi kawasan agropolitan dan minapolitan. Pengembangan kawasan minapolitan salah satunya dikembangkan di Kabupaten Tulungagung, Blitar, Trenggalek, Pacitan, dan Kabupaten Ponorogo. Penetapan pengembangan Kawasan Agropolitan di Provinsi Jawa Timur salah satunya ada di Kabupaten Ngawi serta terdapat 1 (satu) kabupaten yang yang masih dalam proses penetapan yaitu berada di Kabupaten Magetan.

Gambar 4. 38 Sektor Produksi Komoditas Unggulan di Kawasan Prioritas Selingkar Wilis dan Lintas Selatan

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Timur, diolah Sekretariat Kebijakan Satu Peta, 2019

Potensi komoditas unggulan di Kabupaten Tulungagung adalah bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan. Kemudian, kmoditas utama Kabupaten Trenggalek beragam, karena kondisi kewilayahan yang kurang mendukung untuk pertanian, sebagian besar adalah hasil perkebunan seperti cengkeh, kopi, ketela pohon, umbi-umbian, jagung, kakao, sayuran, serta aneka macam buah-buahan. Sementara itu, komoditas unggulan Kabupaten Ponorogo yaitu sektor perkebunan dan pertanian. Sektor perkebunan komoditas unggulannya adalah kakao, tebu, kopi, kelapa, cengkeh, dan jambu mete. Sektor Pertanian komoditas yang diunggulkan adalah tembakau. Kawasan yang potensial dalam bidang perkebunan dan pertanian di Kabupaten Ponorogo yaitu daerah timur yang merupakan daerah di kaki Gunung Wilis.

Secara umum potensi yang menonjol saat ini adalah bidang agro seperti tanaman pertanian (padi, kedelai, palawija), perkebunan (kakao, kopi, mangga, durian, rambutan), dan produk hasil hutan serta produk olahan lainnya seperti kerajinan kayu jati dan lain sebagainya. Tanaman durian dan kakao banyak di budidayakan di Kecamatan Dagangan, dan Kecamatan Kare. Perkebunan kopi dengan skala besar terdapat di Kecamatan Kare, yang merupakan peninggalan Belanda. Kabupaten Nganjuk memiliki kondisi dan struktur tanah yang cukup produktif untuk berbagai jenis tanaman, baik tanaman pangan maupun tanaman perkebunan sehingga sangat menunjang pertumbuhan ekonomi dibidang pertanian. Kabupaten Kediri memiliki berbagai macam potensi yang dapat menopang perekonomian di daerah tersebut, diantaranya pertanian, kehutanan, perikanan darat, potensi sumber daya air, dan masih ada lainnya. Di sisi lain potensi bentang alam di Kabupaten Kediri yang mempunyai kawasan pegungungan dapat dikembangkan menjadi potensi kawasan wisata.

Kawasan Agropolitan dan Minapolitan salah satunya di Kabupaten Pacitan. Kawasan Agropolitan berada di Kecamatan Bandar dan Kecamatan Nawangan, sementara pengembangan Kawasan Minapolitan di Kecamatan Pacitan. Komoditas unggulan dan produk olahan di Kabupaten Pacitan terdiri dari jahe, cengkeh, kopi, jagung, ubi kayu, dan kambing.

IV.4.1.4 Potensi dan Tantangan

Kawasan Prioritas Selingkar Wilis dan Lintas Selatan di Provinsi Jawa Timur, memiliki banyak potensi yang perlu dikembangkan seperti agrobisnis dan pariwisata. Kawasan Prioritas Selingkar Wilis dan Lintas Selatan memiliki potensi agropolitan, seperti Bunga Krisan, sayur dan hortikultura. Selain itu juga ada potensi pariwisata yang ada di kawasan tersebut seperti Air Terjun Lawean, Air Terjun Jurang Senggani, dan Wisata Alam Jurang Senggani. Pengembangan konektivitas di wilayah selatan, dapat mendukung potensi yang termasuk dalam Kawasan Prioritas Selingkar Wilis dan Lintas Selatan.

Rata-rata mata pencaharian penduduk di kawasan ini sebagai petani. Hasil produk pertanian di Kawasan Prioritas Selingkar Wilis dan Lintas Selatan dihadapkan pada beberapa tantangan seperti distribusi komoditas unggulan belum didukung oleh akses yang memadai, sehingga kebutuhan akan aksesibilitas sangat penting dalam rangka meningkatkan produktivitas dan

distribusi komoditas unggulan daerah. Di sisi lain, kebutuhan akan permukiman sesuai dengan ketentuan persyaratan teknis yang berlaku masih dinilai sangat kurang, sehingga diperlukan upaya dari pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas permukiman.

Secara umum tantangan yang ada di Kawasan Prioritas Selingkar Wilis dan Lintas Selatan adalah kurang optimalnya pergerakan agrobisnis (agropolitan dan minapolitan) dan pengembangan pariwisata untuk memberikan nilai tambah ekonomi serta kurangnya pengembangan energi alternatif.

IV.4.1.5 Penguatan Konektivitas

Pengembangan pariwisata terus dilakukan oleh Kabupaten/Kota di Kawasan Prioritas Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan, baik melalui pemanfaatan dana daerah maupun melalui dana dari pusat, dimana dalam pengembangannya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah. Kondisi kewilayahan mempengaruhi arah pengembangan, perumusan arah pengembangan didasarkan pada kesamaan dalam pengembangannya, diantaranya:

a. Infrastruktur Jalan
   Jalan dalam hal ini menjadi titik pusat dalam rangka pengembangan Kawasan Prioritas Selingkar Wilis dan Lintas Selatan, dalam pengamatan yang telah dilakukan jalan yang menjadi penghubung diantara keenam kabupaten (ring satu) pada kawasan tersebut masih belum maksimal, banyak jalan yang rusak, dan tidak sesuai standar. Pemerintah daerah telah berupaya untuk melakukan perbaikan terutama akses menuju lokasi wisata;

Gambar 4. 39 Peta Konektivitas dan Keterkaitan antar Pusat Kegiatan Kawasan Prioritas Selingkar Wilis dan Lintas Selatan

Sumber:Sekretariat Kebijakan Satu Peta, 2019

b. Transportasi
Keberadaan transportasi menjadi salah satu faktor pendukung dalam pengembangan pariwisata, yang telah terjadi saat ini adalah dibukanya trayek perintis dari Kabupaten Ponorogo menuju Kabupaten Tulungagung melalui Kecamatan Sooko, dan Kecamatan Pagerwojo oleh Perum Damri. Dengan adanya angkutan penghubung tersebut tentunya juga membuka akses seluas-luasnya kepada masyarakat yang akan memanfaatkan transportasi tersebut menuju lokasi wisata dan pastinya juga berimplikasi pada peningkatan ekonomi masyarakat lokal; dan

c. Akomodasi
Banyak diantaranya lokasi wisata yang disebutkan di atas adalah wisata yang baru saja dibuka, artinya banyak tempat wisata yang sebelumnya belum dikelola secara maksimal atau memang tempat wisata tersebut baru saja ditemukan, keberadaan akomodasi menjadi bagian penting dari tempat wisata, Pendit (1990) mengatakan bahwa pariwisata merupakan suatu sektor yang kompleks, yang juga melibatkan banyak industri, termasuk dalam pengadaan akomodasi.

IV.4.2 Tema Pembangunan Kawasan Prioritas

Pengembangan Kawasan Prioritas Selingkar Wilis dan Lintas Selatan mempunyai tema peningkatan nilai tambah agroindustri dan pengembangan agropolitan. Tema yang digunakan untuk pembangunan kawasan prioritas Selingkar Wilis dan Lintas Selatan tersebut melihat dari kondisi ekonomi saat ini yang memberikan kontribusi ekonomi yang paling tinggi di Provinsi Jawa Timur

Pengembangan Kawasan Prioritas Selingkar Wilis dan Lintas Selatan difokuskan pada peningkatan produksi dan produktivitas pertanian hortikultura, perkebunan dan nilai tambah Agroindustri utamanya pada komoditas perkebunan dan hortikultura, serta biofarmaka dan Pengembangan Kawasan Agropolitan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di perdesaan. Selain itu Pengembangan Pariwisata berbasis agro dan sumberdaya alam lainnya (*geopark* dan lainnya) diharapkan dapat mengungkit perkembangan sektor ekonomi lainnya, didukung peningkatan Sumber Daya Manusia, peningkatan aksesibilitas dan infrastruktur pendukung lainnya dengan tetap menjamin kelestarian lingkungan.

IV.4.3 Strategi Percepatan Pembangunan Kawasan Prioritas

Strategi percepatan pembangunan Kawasan Prioritas Selingkar Wilis dan Lintas Selatan difokuskan pada peningkatan nilai tambah hasil agroindustri dan agrowisata melalui penyediaan infrastruktur pendukung yang menghubungkan dengan pusat pertumbuhan, diperlukan strategi dengan pendekatan melalui aspek sosial, ekonomi dan infrastruktur, yang meliputi:

a. Aspek Sosial, meliputi Peningkatan pemahaman pola hidup sehat di masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga; Peningkatan akses layanan pendidikan terhadap masyarakat di daerah terpencil; dan Perluasan lapangan pekerjaan yang mampu menyerap tenaga kerja lokal secara optimal melalui pengembangan kegiatan ekonomi wilayah berbasis komoditas unggulan;

b. Aspek Ekonomi, meliputi Pengembangan Agrobisnis dalam konsep Agropolitan dan Minapolitan dan pengembangan Pariwisata yang memberikan nilai tambah ekonomi serta pembangunan penguatan energi alternatif; dan

c. Aspek Infrastruktur: Peningkatan layanan prasarana transportasi dalam rangka mendukung sistem logistik; Peningkatan kualitas lingkungan permukiman melalui penyediaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman; Pengendalian perubahan penggunaan lahan khususnya pada kawasan lindung; dan Peningkatan konektivitas ekonomi melalui penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang memadai dan handal. Adapun beberapa kegiatan pengembangan infrastruktur yang dapat dilakukan seperti, pembangunan di sektor ketenagalistrikan serta jalur lintas selatan (Pansela) yang akan memberikan dampak langsung terhadap perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di sisi selatan Provinsi Jawa Timur secara khusus dan Pulau Jawa secara umum.

IV.4.4 Kebijakan, Program/Kegiatan yang Dibutuhkan dalam Rangka Percepatan Kawasan Prioritas Selingkar Wilis dan Lintas Selatan

Kebijakan, program/kegiatan yang dibutuhkan dalam rangka percepatan Kawasan Prioritas Selingkar Wilis dan Lintas Selatan untuk menunjang kegiatan ekonomi utama yang menunjang percepatan pembangunan ekonomi di Kawasan Prioritas Selingkar Wilis dan Lintas Selatan.

Gambar 4. 40 Peta *Masterlist Project* Kawasan Prioritas Selingkar Wilis dan Lintas Selatan

Sumber: Sekretariat Kebijakan Satu Peta, 2019

Perwujudan dari prioritas kegiatan ekonomi yang dikemas dalam Program Agropolitan/Minapolitan tersebut diorientasikan pada sasaran sebagai berikut:

1. Pengembangan Kakao (5.800 hektar); Sarana Pengolahan Kakao dan Kopi Arabika (500 hektar); Sarana Pengolahan kopi - Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Madiun, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Trenggalek;
2. Pengembangan Agropolitan dan *Agroforrestry* Sendang – Kabupaten Tulungagung;
3. Pengembangan Minapolitan Gondosuli-Klatak – Kabupaten Tulungagung;
4. Agro Perkebunan Mojo – Kabupaten Kediri;
5. Pengembangan Agropolitan Watulimo – Kabupaten Trenggalek;
6. Pengembangan Agrowisata Berbasis Kopi dan Sapi Perah (Rumah Susu) Trenggalek;
7. Agropark sebagai Rest Area di Pansela – Kabupaten Trenggalek;
8. Pengembangan Minapolitan Panggul-Ngadipuro-Prigi – Kabupaten Trenggalek;
9. Revitalisasi Sentra Industri Perikanan Bengkorok – Kabupaten Trenggalek;
10. Rehabilitasi TPI, Tambat labuh (*jetty*) dan Sentra Kuliner Kabupaten Trenggalek Perikanan – Kabupaten Trenggalek;
11. Pengembangan Agrowisata Bendungan – Kabupaten Trenggalek;
12. Pengembangan Agropolitan Gedangsari – Kabupaten Madiun;
13. Pengembangan Agropolitan Karangdangu – Kabupaten Madiun;
14. Agroforrestry Saradan-Mejayan – Kabupaten Madiun;
15. Agropolitan Pilangsaba – Kabupaten Madiun;
16. Agropolitan Blitar – Kabupaten Blitar;
17. Pembangunan Pasar Agro – Kota Blitar;
18. Pembangunan & Refitalisasi Kawasan Tradisional Kepatihan Ngawi, Pasar Besar, dan Pasar Beran; dan Pembangunan Taman Teknologi Pertanian / *Agrotechnopark* Ngrambe – Kabupaten Ngawi;
19. Pengembangan Agropolitan Arjosari-Nawangan – Kabupaten Ngawi; dan
20. Pengembangan Agrokultur Ngebel-Pudak – Kabupaten Ponorogo.

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

BAB V

PELAKSANAAN DAN TATA KELOLA RENCANA INDUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI DI KAWASAN GRESIK - BANGKALAN - MOJOKERTO - SURABAYA – SIDOARJO – LAMONGAN, KAWASAN BROMO – TENGGER – SEMERU, SERTA KAWASAN SELINGKAR WILIS DAN LINTAS SELATAN

V.1 Tahapan Pelaksanaan

Rencana Induk Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya – Sidoarjo – Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger – Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan merupakan rencana jangka menengah dengan jangka waktu pelaksanaan 5 (lima) tahun yaitu mulai tahun 2020 – 2024. Tahapan pelaksanaan dokumen ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) berdasarkan sumber pembiayaan dari tiap program/proyek yang terdapat dalam daftar program/proyek pada lampiran dokumen ini, yaitu tahapan pelaksanaan program/proyek yang bersumber dari APBN/APBD, dan tahapan pelaksanaan program/proyek yang bersumber dari pendanaan lainnya seperti KPBU dan PINA.

Untuk tahapan pelaksanaan program/proyek yang sumber pembiayaannya berasal dari APBN/APBD dilakukan melalui tahap penyiapan dokumen program/proyek seperti *Outline Bussines Case* (OBC) dan *Final Bussines Case* (FBC) sebagai dasar usulan pengajuan program/proyek dan penganggaran kepada Kementerian PPN/Bappenas untuk dimasukkan dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional. Usulan tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan APBN untuk kemudian dianggarkan dalam periode tahun berjalan, untuk dilanjutkan ke dalam tahap transaksi untuk pelelangan (*bidding*), pembangunan, operasional, dan monitoring evaluasi.

Gambar 5.1. Tahap pelaksanaan proyek yang bersumber dari APBN

Sumber: Analisis Kedeputian Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah 2019

Untuk program/proyek yang bersumber dari KPBU dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan, antara lain:

a. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;

b. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastrukur;

c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Ketersediaan Layanan Pada Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2016 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan Dalam Rangka Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur di Daerah; dan

e. Peraturan Kepala LKPP Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur jo. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan Infrastruktur melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha atas Prakarsa Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah.

Tahapan pelaksanaan program/proyek yang bersumber dari KPBU/PINA dibagi menjadi 2 fase, yaitu tahap penyiapan proyek dan tahap transaksi. Dalam tahap penyiapan proyek, dilakukan penyiapan OBC dan finalisasi FBC. Dimana didalamnya terdapat dokumen seperti LARAP, KA-ANDAL, dokumen lelang, dan kontrak. Dalam tahap penyiapan proyek juga dilaksanakan evaluasi dan keputusan tentang finalisasi bentuk KPBU/PINA, jenis dukungan pemerintah, keputusan kebutuhan penjaminan, dan keputusan untuk melanjutkan ke tahap pelelangan KPBU/PINA. Kemudian apabila sudah *clean and clear* akan masuk ke dalam tahap transaksi untuk pengadaan dan eksekusi.

Gambar 5.2. Tahap pelaksanaan proyek yang bersumber dari KPBU/PINA

Sumber: Peraturan Presiden No.72/2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah tahun 2019

V.2 Sumber Pembiayaan

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas penyiapan proyek/program dalam Rencana Induk Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya – Sidoarjo – Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger – Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan sumber pembiayaan direncanakan bersumber dari beberapa skema antara lain:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur;

c. Badan Usaha Milik Negara;

d. Badan Usaha Milik Daerah;

e. Skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha;

f. Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah (PINA);

g. Swasta; dan

h. Sumber pembiayaan lain yang sah.

Hasil rekapitulasi sumber pembiayaan dalam Rencana Induk Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gerbangkertosusila, Kawasan Bromo – Tengger – Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan untuk 218 program/proyek membutuhkan investasi dengan total Rp. 292,453 Triliun dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1. Rekapitulasi Sumber Pembiayaan Seluruh Program/Proyek

No.	Sumber Pembiayaan	Jumlah Program/Proyek	Nilai Investasi	
			(Rp Miliar)	(Persentase)
1.	APBD	1	40	0,01 %
2.	APBN	108	41.845,45	14,31 %
3.	APBN/APBD	1	45,80	0,02 %
4.	BUMN/BUMD	19	67.640,89	23,13 %
5.	KPBU	72	136.112,93	46,54 %
6.	SWASTA/BUMN	17	46.768	15,99 %
	Total	218	292.453,07	100,00 %

Sumber: Analisis Kedeputian Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah 2019

Gap kebutuhan pendanaan investasi dalam program/proyek dengan keterbatasan dukungan pendanaan yang dimiliki pemerintah dengan APBN maupun APBD akan dipenuhi dengan sumber non anggaran pemerintah antara lain melalui KPBU dan PINA. Kerangka pendanaan tersebut diperkuat dengan penetapan PP Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Di dalam PP tersebut, alokasi pada prioritas akan dibiayai melalui pengintegrasian sumber- sumber pendanaan, baik sumber pendanaan pemerintah maupun non pemerintah.

KPBU dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dilaksanakan dengan ketentuan yang mengacu pada spesifikasi khusus yang telah ditetapkan sebelumnya oleh menteri/kepala lembaga/kepala daerah/ BUMN/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan tetap memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak terkait. Manfaat penggunaan skema KPBU dalam penyediaan infrastruktur adalah penyediaan infrastruktur yang berkualitas, efektif, efisien, tepat sasaran, dan tepat waktu; kesinambungan dalam proses perencanaan, konstruksi, operasi, dan pemeliharaan; serta mengatasi keterbatasan kapasitas pendanaan pemerintah melalui pengerahan dana swasta, sehingga penyediaan infrastruktur dapat lebih dioptimalisasi.

Saat ini, penyelenggaraan skema KPBU dapat diterapkan ke dalam 19 sektor infrastruktur, baik infrastruktur ekonomi, yaitu: transportasi, jalan, ketenagalistrikan, minyak, gas, dan energi baru terbarukan, konservasi energi, serta telekomunikasi dan informatika, maupun infrastruktur sosial, yaitu air minum, pengelolaan limbah setempat, pengelolaan limbah terpusat, pengelolaan sampah, sumber daya air dan irigasi, fasilitas perkotaan, perumahan rakyat, pariwisata, fasilitas pendidikan, lembaga pemasyarakatan, sarana olahraga, kesenian dan budaya, kawasan, dan kesehatan, dengan landasan hukumnya yang telah dimuat dalam Perpres Nomor 38 Tahun 2015. Dalam peraturan tersebut, disebutkan bahwa bentuk pengembalian investasi kepada pihak swasta (badan usaha) atas penyediaan infrastruktur dapat bersumber dari pembayaran oleh pengguna infrastruktur dalam bentuk tarif (*user fee*), pembayaran oleh Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) melalui skema ketersediaan layanan (*availability payment*), ataupun pembayaran dalam bentuk lainnya selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Proyek infrastruktur dengan skema KPBU dapat diprakarsai oleh menteri/kepala lembaga/kepala daerah yang disebut dengan *solicited project* maupun KPBU yang diprakarsai oleh pihak swasta/Badan Usaha/BUMN/BUMD disebut sebagai *unsolicited project*. Proses pelaksanaan skema KPBU *solicited* dan *unsolicited project* memiliki tahapan yang sama, yaitu tahap perencanaan, penyiapan, dan transaksi. Pada skema KPBU *unsolicited project*, terdapat persyaratan utama dalam pengusulannya, yaitu terintegrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan; layak secara ekonomi dan finansial; dan badan usaha yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk membiayai pelaksanaan penyediaan infrastruktur.

PINA merupakan mekanisme pembiayaan untuk proyek investasi yang bersifat prioritas, dengan pendanaannya yang bersumber selain dari anggaran pemerintah dan pelaksanaannya didorong dan difasilitasi oleh pemerintah. Penyediaan infrastruktur yang menggunakan skema PINA harus memenuhi minimal empat kriteria utama, yaitu memiliki manfaat ekonomi dan sosial yang tinggi, memiliki kelayakan komersial, memenuhi kriteria kesiapan (*readiness criteria*), serta mendukung pencapaian target prioritas pembangunan nasional. Dengan nilai investasi dan imbal hasil yang relatif menarik, umumnya pemerintah hanya berperan sebagai regulator dan promotor.

Saat ini skema PINA berfokus pada penyediaan infrastuktur dalam sektor konektivitas, energi, manufaktur dan industri, serta perumahan, dengan 13 subsektor bagiannya. Landasan hukum terkait penyelenggaran skema PINA dalam proyek infrastruktur adalah Perpres Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Perpres Nomor 20 Tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 66 tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Terdapat 3 skema PINA yang dapat diimplementasikan ke dalam proyek penyediaan infrastruktur sesuai dengan kondisi proyeknya, yaitu *greenfield, brownfield,* dan *operational.*

Pada tahun 2020, Pemerintah berkomitmen untuk melanjutkan proyek yang telah disiapkan dengan skema KPBU dan PINA pada tahun sebelumnya serta menambah proyek-proyek baru sebagai upaya dalam mendukung percepatan penyediaan infrastruktur. Dalam memenuhi komitmen pemerintah untuk mempercepat dan memprioritaskan proyek-proyek KPBU, sesuai dengan Perpres Nomor 38 Tahun 2015 dan Permen PPN Nomor 4 Tahun 2015, Menteri PPN/BAPPENAS menerbitkan *PPP Book* setiap tahun yang memuat informasi mengenai proyek-proyek KPBU baik yang sedang disiapkan, yang siap ditawarkan, yang sudah lelang, maupun yang sedang konstruksi:

a. Sebagai bentuk komitmen pemerintah, tindak lanjut dalam prioritas dan percepatan pelaksanaan proyek-proyek KPBU, Pemerintah membentuk Kantor Bersama KPBU Republik Indonesia yang berperan sebagai koordinator dan fasilitator penyiapan dan pengevaluasian proyek-proyek yang akan menggunakan skema KPBU. Dalam upaya mendorong pelaksanaan proyek KPBU dan PINA, arah kebijakan yang perlu dilakukan pemerintah antara lain: memperkuat penggunaan skema *value for money* (*VfM*) dalam menentukan prioritas dan memilih mekanisme pelaksanaan (*delivery mechanism*) yang paling efektif dan efisien dalam keseluruhan siklus proyek;

b. Meningkatkan komitmen yang kuat pada menteri/kepala lembaga/kepala daerah dalam melaksanakan KPBU dengan penyediaan anggaran melalui APBN dan/atau APBD bagi pelaksanaan tahapan proses KPBU;

c. Menyempurnakan mekanisme pemberian fasilitas penyiapan proyek dan fasilitas peningkatan kelayakan dan *bankability* proyek KPBU; dan

d. Menyiapkan, menyediakan informasi dan mempromosikan proyek PINA, serta mendorong ekosistem bisnis untuk mempermudah investasi di Indonesia dalam rangka percepatan realisasi investasi proyek-proyek infrastruktur.

V.3 Kemudahan dalam Perizinan dan Fasilitas Insentif

Pemerintah berkomitmen untuk mempercepat pembangunan ekonomi dengan memberikan fasilitas khusus pada program/proyek yang termasuk dalam daftar program/proyek yang terdapat pada lampiran dokumen ini. Fasilitas yang diberikan keistimewaan dalam perizinan dan non-perizinan, pengadaan barang/jasa pemerintah, pengadaan tanah, kandungan lokal, *debottlenecking,* tata ruang, dan jaminan pemerintah. Kemudahan dan fasilitas tersebut antara lain:

a. Aspek Perizinan, yakni dukungan percepatan penerbitan izin-izin berusaha yang menjadi kewenangan Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah.

b. Aspek Non-Perizinan, yakni percepatan penyediaan kebutuhan non-perizinan serta arahan bagi Kementerian/Lembaga terkait untuk memberikan dukungan terhadap penyediaan kebutuhan non-perizinan.

c. Aspek Tata Ruang, yakni penyesuaian tata ruang untuk proyek yang tidak dapat dipindahkan ke lokasi lain dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan.

d. Aspek Pengadaan Tanah, yakni kemudahan penyediaan tanah untuk pelaksanaan proyek, antara lain pembekuan transaksi tanah pada lokasi program/proyek yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah; pemberian prioritas atas penyediaan tanah; serta opsi penggunaan tanah milik Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

e. Aspek Jaminan Pemerintah, yakni opsi pemberian jaminan pemerintah terhadap proyek/program yang dilaksanakan oleh badan usaha atau Pemerintah Daerah atau Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur.

f. Aspek Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yakni kekhususan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah terkait nilai pengadaan dan pemanfaatan panel konsultan.

g. Aspek Penyelesaian Masalah, yakni melakukan penyelesaian masalah dan hambatan dalam pelaksanaan program/proyek atau untuk memberikan dukungan dalam percepatan pelaksanaan program/proyek dengan melibatkan unsur aparat penegak hukum dan APIP antara lain melalui pendampingan pengambilan diskresi dalam rangka mengatasi persoalan yang konkret dan mendesak, dan pengambilan langkah-langkah mitigasi dampak sosial yang timbul dalam percepatan pelaksanaan program/proyek.

V.4 Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi

Fungsi koordinasi, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi merupakan kunci sukses terlaksananya Rencana Induk Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gerbangkertosusila, Kawasan Bromo – Tengger – Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan. Untuk itu, dirumuskan mekanisme serta struktur dari unit strategis yang diserahi tanggung jawab untuk melaksanakan fungsi tersebut.

Dalam rangka mengawal implementasi berbagai langkah percepatan pembangunan ekonomi di Kawasan Gerbangkertosusila, Kawasan Bromo – Tengger – Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan, agar dapat lebih efektif di dalam mempercepat pengambilan keputusan yang diperlukan untuk menangani berbagai permasalahan yang muncul dalam tahap pelaksanaannya perlu dibentuk Tim Pelaksana yang dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk melakukan pengendalian, koordinasi, dan evaluasi. Tim beranggotakan seluruh pemangku

kepentingan yang terdiri dari unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dunia usaha.

Adapun hasil dari pengendalian, monitoring, dan evaluasi memungkinkan untuk mengurangi atau menambah program/proyek yang ada di Rencana Induk Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya – Sidoarjo – Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger – Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan sesuai dengan kriteria yang disusun oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Kriteria-kriteria pemilihan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Peranan terhadap Pembangunan Nasional dan Regional

   Kriteria ini melihat sejauh mana proyek tersebut berkontribusi terhadap target pembangunan nasional, termasuk Prioritas Nasional, Target RPJMN, dan Target RPJMD. Kesesuaian terhadap visi pembangunan nasional dan pembangunan regional merupakan prasyarat mutlak.

b. Kontribusi terhadap Pertumbuhan Ekonomi

   Kriteria ini diukur dari seberapa jauh proyek dapat memacu pertumbuhan, diukur berdasar analisis tim ahli.

c. Peranan dalam Pemerataan Pembangunan

   Kriteria ini dilihat dari sejauh mana proyek tersebut berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan secara merata dari sisi lintas wilayah dan lintas kelompok pendapatan.

d. Aspek *Feasibility* dan Implementasi

   Kriteria ini meliputi pertimbangan atas; Kesesuaian dengan RTRW; Keterkaitan dengan PKN, PKW, atau KSPN, Kesiapan lahan; Kemudahan perizinan; dan Kelayakan secara ekonomi dan/atau finansial (BCR/IRR/NPV/BEP).

e. Aspek Pendanaan

   Kriteria ini menghitung kewajaran nilai investasi yang dibutuhkan dan diukur berdasar telaah tim ahli.

f. Aspek Kewenangan

   Kriteria ini melihat kesesuaian wewenang Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Program/proyek yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dapat diakomodasi dalam Perpres, sepanjang ruang lingkup, pelaksanaan, dan sumber pendanaannya tetap sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.

Gambar 5.3 Kriteria pemilihan program/proyek
Sumber: Analisis Kedeputian Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah 2019

Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) pada masing-masing tingkatan (BPKP, Inspektur Kementerian/Lembaga, Inspektur Pemerintah Provinsi, Inspektur Pemerintah Kabupaten/Kota) melakukan pengawasan atas tata kelola dalam pelaksanaan percepatan pembangunan ekonomi di Kawasan Gerbangkertosusila, Kawasan Bromo – Tengger – Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Untuk itu APIP pada masing-masing tingkatan menyusun Standar Operasioanal Prosedur (SOP) sebagai acuan dalam melakukan pengawasan atas tata kelola (*governance*) percepatan pelaksanaan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Ekonomi Rencana Induk Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya – Sidoarjo – Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger – Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan yang dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KEBUTUHAN PROGRAM/PROYEK PRIORITAS DALAM RANGKA PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI DI KAWASAN GERBANGKERTOSUSILA, KAWASAN BROMO-TENGGER-SEMERU, SERTA KAWASAN SELINGKAR WILIS DAN LINTAS SELATAN

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang menjadi sentral aktivitas ekonomi Indonesia. Peran strategis dari Provinsi Jawa Timur sebagai pusat pelayanan kegiatan Indonesia Timur dan menjadi simpul transportasi (darat, udara dan laut) nasional dan internasional, maka secara kewilayahan Provinsi Jawa Timur diarahkan untuk mewujudkan ruang wilayah yang berdaya saing global dalam pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan potensi dan tantangan serta arah kebijakan pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa Timur, maka pengembangan wilayah di Provinsi Jawa Timur terdiri dari 3 (tiga) kawasan prioritas, yaitu Kawasan Prioritas Gerbangkertosusila yang didukung oleh Kawasan Madura dan Kepulauan, Kawasan Prioritas Bromo Tengger Semeru yang didukung oleh Kawasan Selingkar Ijen, dan yang terakhir adalah Kawasan Prioritas Selingkar Wilis dan Lintas Selatan.

Pengembangan kawasan prioritas dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa Timur untuk menjawab potensi dan tantangan yang dihadapi, diantaranya adalah:

a) Pengembangan kawasan ekonomi berbasis industri pengolahan dan manufaktur, pariwisata, agropolitan, dan minapolitan;
b) Pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas antar kawasan, seperti pembangunan jalan tol dan jalan nasional, revitalisasi jalur kereta api, pelebaran jalan, pembangunan pelabuhan, pembangunan transportasi perkotaan;
c) Pembangunan infrastruktur lainnya yang menunjang kegiatan perekonomian di Provinsi Jawa Timur seperti pembangunan SPAM, Bendungan, dan IPAL; dan
d) Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang menunjang kegiatan perekonomian di Provinsi Jawa Timur seperti pengembangan SMK dan Balai Latihan Kerja (BLK).

Dalam implementasinya, kebutuhan pengembangan tersebut dijabarkan dalam bentuk program/proyek yang tersebar di masing-masing kawasan prioritas serta kawasan pendukungnya sesuai dengan potensi dan tantangan yang dihadapi oleh setiap kawasan.

Gambar 6. 1 Lokasi Program/Proyek di Provinsi Jawa Timur

Sumber: Sekretariat Kebijakan Satu Peta, 2019

VI.1 Kawasan Prioritas Gerbangkertosusila

No	Kabupaten/Kota	Program/Proyek	Estimasi Nilai Investasi (Rp Miliar)	Sumber Dana
1	Kab. Lamongan, Kab. Gresik, Kota Surabaya, Kab. Sidoarjo, Kab. Mojokerto, Kota Mojokerto	Transportasi Publik di Gerbangkertosusila (Surabaya Regional Railways Line)	8.304,00	KPBU
2	Kota Surabaya, Kab. Gresik	Pendalaman Alur Pelayaran Barat Surabaya	4.500,00	BUMN
3	Kab. Ngawi, Kab. Bojonegoro, Kab. Tuban, Kab. Lamongan, Kab. Gresik	Pembangunan Jalan Tol Ngawi - Bojonegoro - Tuban - Lamongan - Manyar - Bunder	23.797,00	KPBU
4	Kab. Mojokerto, Kab. Pasuruan	Pembangunan Jalan Tol Gempol - Mojokerto	4.851,00	KPBU
5	Kab. Gresik, Kab. Lamongan	Peningkatan Jalan Raya Gresik	101,00	APBN
6	Kab. Paciran, Kab. Mojokerto	Jalan radial menuju Pelabuhan Paciran	814,00	APBN
7	Kab. Sidoarjo, Kota Surabaya	Pengembangan Jalan Tol Waru(Aloha) - Wonokromo - Tanjung Perak	6.491,00	KPBU
8	Kab. Sidoarjo, Kota Surabaya	Pengembangan Jalan Tol Bandara Juanda - Tanjung Perak (SERR)	6.740,00	KPBU
9	Kota Surabaya, Kab. Sidoarjo	Rencana Akses Kereta Api Menuju Bandara Juanda	1.000,00	KPBU
10	Kab. Lamongan, Kab. Tuban	Reaktivasi Jalur Kereta Api Tuban (dengan jalur Babat, Tuban, Merakurak, Jenu),	1.000,00	BUMN

No	Kabupaten/Kota	Program/Proyek	Estimasi Nilai Investasi (Rp Miliar)	Sumber Dana
		dengan jalur double track		
11	Kota Surabaya	Double track Pasar Turi Surabaya Kota - Wonokromo	330,00	KPBU
12	Kota Surabaya, Kab. Sidoarjo, Kab. Gresik	Pembangunan sistem distribusi SPAM Regional Umbulan	40,00	APBD
13	Kab. Tuban, Kab. Bojonegoro, Kab. Lamongan	Pengembangan SPAM Regional Pantura Kab. Tuban, Kab. Bojonegoro, Kab. Lamongan (Sumber air baku dari Sungai Bengawan Solo)	875,00	KPBU
14	Kab. Lamongan, Kab. Gresik, Kota Surabaya	Pengendalian Banjir Kali Lamong	1.040,00	APBN
15	Kab. Lamongan, Kab. Tuban	Percepatan Penyelesaian Pembangunan Jabung Ring Dike	200,00	APBN
16	Kab. Lamongan	Pengembangan KI Brondong - Paciran	6.550,00	SWASTA
17	Kab. Sidoarjo	Pengembangan KI Sidoarjo Timur (SIERIE dan safe and lock)	4.000,00	SWASTA
18	Kab. Jombang	Pengembangan RKI Jombang	4.000,00	SWASTA
19	Kab. Tuban	Pengembangan KI Tuban (pengembangan KIG)	4.000,00	SWASTA
20	Kab. Mojokerto, Kota Mojokerto	Pengembangan sarana prasarana situs sejarah Trowulan dan	55,00	APBN

No	Kabupaten/Kota	Program/Proyek	Estimasi Nilai Investasi (Rp Miliar)	Sumber Dana
		pengembangan wisata Perahu Majapahit		
21	Kab. Sidoarjo	Pengembangan Bandara Internasional Juanda (Terminal 3)	9.140,00	BUMN
22	Kab. Sidoarjo	Pembangunan Fly Over Aloha	438,00	APBN
23	Kab. Sidoarjo	Pembangunan Frontage Road (FR) Waru - Gedangan	278,00	APBN
24	Kab. Sidoarjo	Peningkatan Lingkar Timur Sidoarjo	108,00	APBN
25	Kab. Sidoarjo	Pembangunan Frontage JL. Akses Bandara Juanda (Sidoarjo)	83,00	APBN
26	Kab. Sidoarjo	Pembangunan PLTSa di Kab. Sidoarjo	1.300,00	KPBU
27	Kab. Sidoarjo	Pembangunan Dam (muara laut) Sungai Sidokare & Pucang	170,00	APBN
28	Kab. Sidoarjo	Pembangunan Dam (muara laut) Sungai Buntung	140,00	APBN
29	Kab. Sidoarjo	Fly Over Gedangan	480,00	APBN
30	Kab. Sidoarjo	Pembukaan Akses Tol ke Pasar Induk Puspa Agro	200,00	KPBU
31	Kab. Mojokerto	Pembangunan TPA Regional dan PLTSa di Kab. Mojokerto	15,00	KPBU
32	Kab. Mojokerto	Pembangunan Limbah B3 di Kab. Mojokerto	250,00	KPBU

No	Kabupaten/Kota	Program/Proyek	Estimasi Nilai Investasi (Rp Miliar)	Sumber Dana
33	Kab. Lamongan	Pengembangan Pelabuhan Paciran	240,00	BUMN/BUMD
34	Kab. Lamongan	Percepatan pembangunan Jalan Lingkar Utara Lamongan	493,00	KPBU
35	Kab. Lamongan	Pembangunan Fly Over Simpang Sebidang Kereta Api di Tambakboyo Kabupaten Lamongan (SYC)	153,00	BUMN
36	Kab. Lamongan	Pembangunan drainase Jalan Nasional Arteri Primer (Widang Batas Kota Lamongan, JL. Jagung Suprapto, Batas Kota Lamongan Batas Kab. Gresik, JL. P.B. Sudirman)	120,00	APBN
37	Kab. Lamongan	Rehabilitasi Daerah Irigasi Gondang (Kec. Sugio, Kec. Sukodadi, Kec. Kembangbahu, Kec. Lamongan, Kec. Tikung)	200,00	APBN
38	Kab. Lamongan	Pembangunan SPAM Karangbinangun	170,00	APBN
39	Kab. Lamongan	Percepatan penuntasan Saluran primer Daerah Irigasi Bengawan Jero (Lanjutan saluran primer Intake Babat Barrage)	150,00	APBN
40	Kab. Lamongan	Rehabilitasi Daerah Irigasi Bengawan Jero (Kec. Pucuk, Kec.	100,00	APBN

No	Kabupaten/Kota	Program/Proyek	Estimasi Nilai Investasi (Rp Miliar)	Sumber Dana
		Maduran, Kec. Karanggeneng, Kec. Kalitengah, Kec. Turi, Kec. Karangbinangun, Kec. Glagah)		
41	Kab. Lamongan	Peningkatan SPAM Brondong	90,00	APBN
42	Kab. Lamongan	Pembangunan Waduk Pedes Kec. Sambeng dalam rangka ketahanan pangan dan pengendalian banjir Kali Lamong	847,00	APBN
43	Kab. Gresik, Kab. Lamongan, Kab. Tuban	Peningkatan Jalan Nasional Kolektor Primer / Daendels (Lohgung (KM 93,175) - BTS. Kota Gresik	511,50	KPBU
44	Kab. Lamongan	Peningkatan kapasitas tampungan floodway di Lamongan	250,00	APBN
45	Kab. Lamongan	Pengembangan Minapolitan Lamongan (Pemberdayaan Kelompok Nelayan)	244,00	APBN
46	Kab. Bangkalan, Kota Surabaya	Pembangunan ART (Autonomous Railrapid Transit) rute Pelabuhan Kamal - Sta Bangkalan - Sta Surabaya Pasarturi	3.592,89	BUMN
47	Kab. Bangkalan, Kab. Sampang, Kab. Pamekasan, Kab. Sumenep	Reaktivasi Jalur KA Kamal Sumenep	3.375,00	BUMN
48	Kab. Gresik	Pembangunan Jalur Kereta Api STA Duduk	700,00	BUMN

No	Kabupaten/Kota	Program/Proyek	Estimasi Nilai Investasi (Rp Miliar)	Sumber Dana
		- Pelabuhan JIIPE Manyar Gresik		
49	Kab. Bangkalan	Pembangunan Pelabuhan Tj. Bulupandan	20.899,00	KPBU
50	Kab. Bangkalan	Pembangunan Jalan Tol Menuju Pelabuhan Tj. Bulupandan	2.600,00	KPBU
51	Kab. Bangkalan	Pembangunan Jalan Modung - Sreseh	300,00	APBN
52	Kab. Bangkalan	Pembangunan Indonesia Islamic Science Park (IISP)	3.000,00	KPBU
53	Kab. Bangkalan	Madura Industrial Seaport City	3.000,00	SWASTA
54	Kab. Bangkalan	Pembangunan Industri Terpadu dengan Pelabuhan Tj. Bulupandan	1.500,00	SWASTA
55	Kota Surabaya	Pembangunan Jalur Kereta Api menuju Tanjung Perak	400,00	BUMN
56	Kota Surabaya	Rencana Pembangunan Akses Kereta Api Menuju Pelabuhan Teluk Lamong	3.625,00	BUMN
57	Kota Surabaya	LRT Surabaya	15.366,00	KPBU
58	Kota Surabaya	Pembangunan Fly Over Terminal Teluk Lamong yang terhubung dengan Jalur Lingkar Luar Barat (JLLB) Surabaya	1.300,00	APBN

No	Kabupaten/Kota	Program/Proyek	Estimasi Nilai Investasi (Rp Miliar)	Sumber Dana
59	Kota Surabaya	Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya MBR di Kota Surabaya	213,00	APBN
60	Kota Surabaya	Revitalisasi Peralatan BLK Surabaya	100,90	APBN
61	Kab. Tuban	Pembangunan Jalan Lingkar Tuban	566,28	APBN
62	Kab. Tuban	Pembangunan Pelabuhan Tuban	150,00	KPBU
63	Kab. Tuban	Pengendalian banjir sungai Bengawan Solo hilir (Kab. Tuban)	845,00	APBN
64	Kab. Tuban	Pembangunan tembok penahan gelombang laut di wilayah Tuban - Jenu	1.100,00	APBN
65	Kab. Tuban	Pembangunan waduk Jadi untuk antisipasi banjir kawasan Jenu dan Tuban kota	230,00	APBN
66	Kab. Tuban	Revitalisasi Peralatan BLK Tuban	100,90	APBN
67	Kab. Tuban	Peningkatan Jumlah kelas di jurusan migas di SMK 1 Tuban dan jurusan pendukung lainnya serta pengadaan alat latih dan infrastruktur	120,00	APBN
68	Kab. Bojonegoro	Pembangunan Bendung Gerak Karangnongko	2.550,00	APBN
69	Kab. Bojonegoro	Pengendalian Banjir Sungai Bengawan Solo di Kanor	60,00	APBN

No	Kabupaten/Kota	Program/Proyek	Estimasi Nilai Investasi (Rp Miliar)	Sumber Dana
70	Kab. Bojonegoro	Pengembangan SMK Negeri 5 (Migas) Bojonegoro	65,50	APBN
71	Kab. Jombang	Pembangunan Jembatan Ploso	215,00	APBN
72	Kota Surabaya	Pembangunan Jalan Lingkar Luar Barat Surabaya (OWRR)	192,60	APBN
73	Se-Kawasan Prioritas Gerbangkertosusila	Program Dewi Cemara	100,00	APBN, APBD dan KPBU
74	Se-Kawasan Prioritas Gerbangkertosusila	Program Agropolitan Gerbangkertosusila	66,50	APBN, APBD dan KPBU
75	Se-Kawasan Prioritas Gerbangkertosusila	Program Pengembangan Minapolitan Gerbangkertosusila	218,50	APBN, APBD dan KPBU
76	Kab. Gresik	Pengembangan KI JIIPE Gresik	5.000,00	SWASTA
77	Kab. Mojokerto	Pembangunan Kawasan Ekonomi untuk Pendidikan dan Kesehatan	5.000,00	KPBU

VI.2 Kawasan Madura dan Kepulauan Sebagai Pendukung Kawasan Gerbangkertosusila

No	Kabupaten/Kota	Program/Proyek	Estimasi Nilai Investasi (Rp Miliar)	Sumber Dana
1	Kab. Pamekasan, Kab. Sumenep	Peningkatan dan Pelebaran Jalan Raya Sumenep - Pamekasan	238,10	APBN
2	Kab. Sumenep	Pengadaan Kapal Perintis	150,00	APBN

No	Kabupaten/Kota	Program/Proyek	Estimasi Nilai Investasi (Rp Miliar)	Sumber Dana
3	Kab. Sampang, Kab. Pamekasan	Pengembangan Kawasan Ekonomi Garam	550,00	SWASTA/ BUMN
4	Kab. Pamekasan	Pembangunan Pabrik Gula beserta Pengembangan Budidaya Tebu	210,00	KPBU
5	Kab. Sampang	Pembangunan Jalan Lintas Selatan Madura (Ruas Sreseh - Pangarengan)	305,00	APBN
6	Kab. Sampang	Pengembangan Pelabuhan Trunojoyo Sampang	30,00	APBN
7	Kab. Sampang	Normalisasi Waduk Klampis	35,00	APBN
8	Kab. Sampang	Pembangunan floodway Kali Kemuning	1.300,00	APBN
9	Kab. Sampang	Pengembangan Kawasan Pariwisata Kepulauan Gili Mandangin	40,00	APBN, APBD dan KPBU
10	Kab. Sampang	Peningkatan Kualitas Pendidikan SDM melalui Pengembangan SMK dan BLK	10,00	APBN
11	Kab. Sampang	Pengembangan RSUD Ketapang Tahap III	35,50	KPBU
12	Kab. Pamekasan	Pengembangan RSUD Moch. Noer	295,00	KPBU
13	Kab. Pamekasan	Pengembangan Pelabuhan Pasean	150,00	APBN
14	Kab. Pamekasan	Pengembangan Pelabuhan Branta	80,00	APBN
15	Kab. Sumenep	Pembangunan Bandara Kangean	241,66	APBN

No	Kabupaten/Kota	Program/Proyek	Estimasi Nilai Investasi (Rp Miliar)	Sumber Dana
16	Kab. Sumenep	Pengadaan Kapal Cepat antar Pulau	50,00	APBN
17	Kab. Sumenep	Pengembangan Pelabuhan Kangean	210,00	APBN
18	Kab. Sumenep	Pengembangan Pelabuhan Pagerungan	170,00	APBN
19	Kab. Sumenep	Pengembangan Pelabuhan Masalembu	170,00	APBN
20	Kab. Sumenep	Pengembangan Pelabuhan Raas	170,00	APBN
21	Kab. Sumenep	Peningkatan Kapasitas Pelabuhan Kalianget	150,00	KPBU
22	Kab. Sumenep, Kab. Pamekasan, Kab. Bangkalan, Kab. Sampang	Pembangunan SPAM Regional Lintas Madura Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep (Sumber air baku dari : Mata Air Klebetan, Sungai Budur, Waduk Nipah, Waduk Klampis, Waduk Blega, Sungai Pasean, Sungai Pasongsongan, Sungai Semajid dan Sungai Pragaan)	750,00	KPBU
23	Kab. Sumenep	Pengembangan Industri Garam Sumenep	173,00	SWASTA/ BUMN
24	Se-Kawasan Pendukung Madura dan Kepulauan	Program Dewi Cemara	200,00	APBN, APBD dan KPBU
25	Se-Kawasan Pendukung Madura dan Kepulauan	Program Agropolitan Madura dan Kepulauan	140,00	APBN, APBD dan KPBU

No	Kabupaten/Kota	Program/Proyek	Estimasi Nilai Investasi (Rp Miliar)	Sumber Dana
26	Se-Kawasan Pendukung Madura dan Kepulauan	Program Pengembangan Minapolitan Madura dan Kepulauan	728,00	APBN, APBD dan KPBU

VI.3 Kawasan Prioritas Bromo-Tengger-Semeru

No	Kabupaten/Kota	Program/Proyek	Estimasi Nilai Investasi (Rp Miliar)	Sumber Dana
1	Kab. Probolinggo	Pelebaran jalan Tongas ke Sukapura	133,00	APBN
2	Kab. Probolinggo, Kab. Lumajang	Pembangunan Jalan Tol Probolinggo - Lumajang	4.700,00	KPBU
3	Kab. Probolinggo, Kab. Lumajang	Pelebaran Jalan Nasional Probolinggo - Lumajang	454,41	APBN
4	Kab. Malang, Kota Batu	Pelebaran Jalan Pendem - Batu	75,00	APBN
5	Kab. Probolinggo, Kota Probolinggo	Peningkatan Jalan Lingkar Kota dan Kab. Probolinggo	86,29	APBN
6	Kota Surabaya, Kab. Pasuruan, Kab. Malang, Kota Malang, Kab. Blitar, Kab. Nganjuk	Double Track Surabaya - Bangil - Malang - Blitar - Kertosono	6.550,00	BUMN
7	Kab. Pasuruan, Kota Pasuruan, Kab. Probolinggo, Kab. Lumajang, Kab. Jember	Percepatan Pembangunan Double Track Lintas Bangil - Jember - Banyuwangi	6.575,00	BUMN
8	Kab. Sidoarjo, Kab. Pasuruan	Pengendalian Banjir Kali Kedunglarangan	568,52	APBN
9	Kab. Probolinggo, Kota Probolinggo	Revitalisasi pipa SPAM Kab - Kota Probolinggo	57,48	KPBU

No	Kabupaten/Kota	Program/Proyek	Estimasi Nilai Investasi (Rp Miliar)	Sumber Dana
10	Malang, Probolinggo, Pasuruan,Lumajang	Penguatan wisata di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (proyek KSPN Peningkatan fasilitas BTS)	570,00	APBN
11	Kab. Malang	Pembangunan Jalan Tol Malang - Kepanjen	5.760,00	KPBU
12	Kab. Malang	Pelebaran jalan pada exit tol seksi 5 Pandaan - Malang	56,25	KPBU
13	Kab. Malang	Pembangunan Fly Over/Underpass Perlintasan Sebidang Karanglo	190,00	BUMN
14	Kab. Malang	Peningkatan Jalan Akses TNBTS "Taman Nasional Bromo Tengger Semeru" ke Malang Bagian Selatan (Kepanjen - JLS)	300,00	APBN
15	Kab. Malang	Pelebaran Ruas Turen - Batas Kab. Lumajang - Kota Lumajang	814,69	APBN
16	Kab. Malang	Jalan Akses Langsung TNBTS "Taman Nasional Bromo Tengger Semeru") Pakis - Tumpang (Akses Bandara ABD Saleh) (Tahap 1/2)	132,24	APBN
17	Kab. Malang	Jalan Akses Langsung TNBTS "Taman Nasional Bromo Tengger Semeru") Jalan Lingkar Jeru - Candi Jago (Tumpang) (Pembangunan Struktur Jalan Baru) (Tahap 1/2)	110,59	APBN
18	Kab. Malang	Jalan Akses Langsung TNBTS "Taman Nasional Bromo Tengger Semeru")	104,30	APBN

No	Kabupaten/Kota	Program/Proyek	Estimasi Nilai Investasi (Rp Miliar)	Sumber Dana
		Wringinanom - Jemplang (Tahap 1/2)		
19	Kab. Malang	Internasionalisasi Bandara Abdulrachman Saleh	200,00	APBN
20	Kab. Malang	SPAM Regional Malang Raya kapasitas Kab. Malang, Kota Malang, Kota Batu (Sumber air baku dari : Mata air Ngepoh, mata air Wendit, mata air Banyuning, mata air Ngesong, mata air Gemulo dan waduk Karangkates)	650,00	KPBU
21	Kab. Malang	Pengembangan Bromo Vulcania Park	450,00	KPBU
22	Kab. Malang	Penataan Prasarana Terrace Tematik	80,00	APBN
23	Kab. Malang	Pembangunan SMK Teknologi (Science Techno Park)	50,00	APBN
24	Kab. Malang	Revitalisasi Peralatan BLK Singosari	100,90	APBN
25	Kab. Malang	Penetapan KEK Pariwisata Singhasari	4.000,00	SWASTA
26	Kab. Lumajang	Pembangunan Tanggul di Sungai Jatiroto	175,00	APBN
27	Kab. Lumajang	Pengembangan Agropolitan Senduro - Candipuro - Pasrujambe - Gucialit	23,00	APBN, APBD dan KPBU
28	Kab. Lumajang	Pengembangan Kawasan Pariwisata Senduro – Candipuro	71,00	APBN, APBD dan KPBU

No	Kabupaten/Kota	Program/Proyek	Estimasi Nilai Investasi (Rp Miliar)	Sumber Dana
29	Kab. Probolinggo	Pelebaran jalan Lawean - Sukapura (18,91 KM)	139,39	APBN
30	Kab. Kota Probolinggo Kab. Lumajang	Pembangunan SPAM Regional Probolinggo - Lumajang	240,00	KPBU
31	Kab. Probolinggo	Pembangunan TPA Regional Kab/Kota Probolinggo	200,00	KPBU
32	Kab. Probolinggo	Pengembangan Kawasan Pariwisata Air Terjun Madakaripura	10,00	APBN, APBD dan KPBU
33	Kab. Probolinggo	Pengembangan Kereta Gantung Puncak Pananjakan - Kawah Bromo	350,00	SWASTA
34	Kab. Probolinggo	Pembangunan Gedung dan Kantor BLK, Peralatan Praktik dan Vokasi BLK	50,00	APBN
35	Kab. Pasuruan	Pembuatan Sudetan dan Normalisasi Kali Welang	211,90	APBN
36	Kab. Pasuruan	Longe strorage berjenjang di hulu sungai Welang	135,00	APBN
37	Kab. Pasuruan	Penataan dan Pengembangan Kawasan Minapolitan	75,00	APBN, APBD dan KPBU
38	Kab. Pasuruan	Penataan dan pengembangan wisata edukasi peternakan Purwosari dan Penataan Kawasan Pusat Pelayanan Peternakan (UPA)	140,00	APBN
39	Kab. Pasuruan	Pengembangan Taman Candra Wilwatikta	200,00	APBN

No	Kabupaten/Kota	Program/Proyek	Estimasi Nilai Investasi (Rp Miliar)	Sumber Dana
40	Kota Probolinggo	Pengembangan Pelabuhan Probolinggo (pembangunan dermaga III dan IV, pengembangan kompleks pergudangan serta pariwisata)	1.250,00	KPBU
41	Kota Probolinggo	Pembangunan/reaktivasi jalur kereta api menuju Pelabuhan Probolinggo	600,00	BUMN
42	Kota Probolinggo	Pengembangan RSUD Probolinggo	195,00	KPBU
43	Kota Batu	Pembangunan Kereta Gantung	300,00	SWASTA
44	Se-Kawasan Prioritas Bromo-Tengger-Semeru	Program Dewi Cemara	100,00	APBN, APBD dan KPBU
45	Se-Kawasan Prioritas Bromo-Tengger-Semeru	Program Agropolitan Bromo-Tengger-Semeru .	535,00	APBN, APBD dan KPBU
46	Se-Kawasan Prioritas Bromo-Tengger-Semeru	Program Pengembangan Minapolitan Bromo-Tengger-Semeru	105,00	APBN, APBD dan KPBU
47	Kota Batu	Pembangunan Pasar Induk Kota Batu	200,00	APBN

VI.4 Kawasan Selingkar Ijen sebagai Pendukung Kawasan Bromo-Tengger-Semeru

No	Kabupaten/Kota	Program/Proyek	Estimasi Nilai Investasi (Rp Miliar)	Sumber Dana
1	Kab. Bondowoso, Kab. Banyuwangi	Peningkatan fasilitas wisata Kawah Blue Fire (cable car)	350,00	KPBU
2	Kab. Bondowoso, Kab. Situbondo, Kab. Jember	Pengembangan Kopi Arabika dan Sarana Pengolahan kopi	77,00	SWASTA
3	Kab. Bondowoso, Kab. Banyuwangi	Pembangkit Listrik Geothermal Ijen	12.000,00	BUMN
4	Kab. Banyuwangi, Kab. Jember	Pelebaran dan pembangunan jalan nasional dari Rogojampi sampai Jember	550,00	APBN
5	Kab. Banyuwangi, Kab. Situbondo	Pelebaran Jalan Nasional BTS. Kota Situbondo - Ketapang	583,52	APBN
6	Kab. Jember	Pembangunan Tanggul Sungai Tanggul	250,00	APBN
7	Kab. Jember	Agrowisata Gunung Gambir Sumberbaru	10,00	APBN, APBD dan KPBU
8	Kab. Banyuwangi	Pembangunan jalan dari exit Tol Probowangi ke Bandara Banyuwangi	300,00	APBN
9	Kab. Banyuwangi	Pengembangan Pelabuhan Ketapang Banyuwangi	100,00	BUMN
10	Kab. Banyuwangi	Peningkatan Fasilitas Wisata Pantai Sukamade	10,00	APBN
11	Kab. Banyuwangi	Pengembangan Eduwisata Alas Purwo, Meru Betiri	10,00	APBN
12	Kab. Banyuwangi	Rencana Pengembangan Pariwisata dan Marina	700,00	KPBU

No	Kabupaten/Kota	Program/Proyek	Estimasi Nilai Investasi (Rp Miliar)	Sumber Dana
13	Kab. Banyuwangi	Fasilitasi Pengembangan Kawasan Industri Banyuwangi (Wongsorejo)	4.068,00	SWASTA
14	Kab. Banyuwangi	Pembangunan Workshop PT INKA di Banyuwangi (Usulan INKA)	14.500,00	BUMN
15	Kab. Bondowoso	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Regional Jember Bondowoso	50,00	KPBU
16	Kab. Bondowoso	Pembangunan Pariwisata Geopark Ijen Bondowoso	348,00	KPBU
17	Kab. Bondowoso	Pengembangan Industri Gula Bondowoso	950,00	KPBU
18	Kab. Situbondo	Jalan Akses exit Tol Probowangi Ke Pintu Gerbang Pelabuhan Jangkar	40,00	APBN
19	Kab. Situbondo	Pembangunan jalur KA menuju Pelabuhan Panarukan	500,00	BUMN
20	Kab. Situbondo	Pelayanan Long Distance Ferry Jangkar - Lembar - NTT	400,00	BUMN
21	Kab. Situbondo	Pengembangan pariwisata kampung kerapu	50,00	APBN
22	Se-Kawasan Pendukung Selingkar Ijen	Program Dewi Cemara	200,00	APBN, APBD dan KPBU
23	Se-Kawasan Pendukung Selingkar Ijen	Program Agropolitan Selingkar Ijen	245,00	APBN, APBD dan KPBU

No	Kabupaten/Kota	Program/Proyek	Estimasi Nilai Investasi (Rp Miliar)	Sumber Dana
24	Se-Kawasan Pendukung Selingkar Ijen	Program Pengembangan Minapolitan Selingkar Ijen	145,00	APBN, APBD dan KPBU

VI.5 Kawasan Prioritas Selingkar Wilis dan Lintas Selatan

No	Kabupaten/Kota	Program/Proyek	Estimasi Nilai Investasi (Rp Miliar)	Sumber Dana
Kawasan Prioritas Selingkar Wilis dan Lintas Selatan				
1	Kab. Nganjuk, Kab. Kediri, Tulungagung	Pembangunan Jalan Tol Kertosono - Kediri - Tulungagung	7.400,00	KPBU
2	Kab. Blitar, Kab. Tulugagung	Pelebaran Jalan Nasional Blitar - Tulungagung - Ngujang	105,00	APBN
3	Kab. Nganjuk, Kab. Kediri, Kab. Tulungagung, Kab. Trenggalek, Kab. Ponorogo, Kab. Madiun	Pelebaran Jalan Nasional (Ring 2) di Kawasan Selingkar Wilis	2.250,00	APBN
4	Kab. Trenggalek, Kab. Tulungagung, Kab. Blitar, Kab. Malang, Kab. Jember, Kab. Banyuwangi	Pembangunan Pansela di Kab. Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang, Jember, Banyuwangi (230,73 KM)	8.469,00	APBN/ Loan
5	Kab. Nganjuk, Kab. Kediri, Kab. Tulungagung, Kab. Trenggalek, Kab. Ponorogo, Kab. Madiun	Pelebaran dan Perbaikan geometri jalan Selingkar Wilis (Ring 1)	2.156,80	APBN
6	Kab. Nganjuk, Kab. Kediri, Kab. Tulungagung, Kab. Trenggalek, Kab.	Pelebaran Jalan Radial menuju Selingkar Wilis	1.000,00	APBN

No	Kabupaten/Kota	Program/Proyek	Estimasi Nilai Investasi (Rp Miliar)	Sumber Dana
	Ponorogo, Kab. Madiun			
7	Kab. Ponorogo, Kab. Madiun, Kab. Pacitan, Kab. Tulungagung, Kab. Trenggalek	Pengembangan Kakao, Sarana Pengolahan Kakao dan Kopi Arabika serta Sarana Pengolahan Kopi	88,70	KPBU
8	Kab. Tulungagung	Pengembangan Gugus Wisata Sendang	10,00	APBN
9	Kab. Tulungagung	Pembangunan Kawasan Wisata Pesanggrahan Argowilis dan Air Terjun Jurang Senggani/ Tiga Bidadari/ Jambuwok, Air Terjun Lawean	14,00	APBN
10	Kab. Nganjuk	Pembangunan Bendungan Margopatut Kecamatan Sawahan	1.500,00	APBN
11	Kab. Kediri	Pembangunan akses jalan dari Tol Kertosono - Kediri menuju Bandara Kediri	400,00	APBN
12	Kab. Kediri	Pembangunan TPA Regional Kediri	600,00	KPBU
13	Kab. Kediri	Pembangunan Jalan Lingkar Kediri	231,00	APBN
14	Kab. Kediri	SPAM Regional Lintas Tengah kapasitas Kab. Kediri, Kab. Nganjuk, Kab. Jombang (Sumber air baku dari Sungai Brantas).	750,00	KPBU
15	Kota Kediri	Pengembangan Wisata Kampung Tenun	65,00	KPBU
16	Kab. Trenggalek	Pelebaran Menuju Standar Jalan Nasional Durenan - Prigi	365,40	APBN
17	Kab. Trenggalek	Pengembangan Taman Teknologi Pertanian (TTP)	117,00	APBN

No	Kabupaten/Kota	Program/Proyek	Estimasi Nilai Investasi (Rp Miliar)	Sumber Dana
		dan *Science Techno Park* Atsiri		
18	Kab. Trenggalek	Pengembangan Minapolitan Panggul - Ngadipuro - Prigi	115,00	APBN
19	Kab. Trenggalek	Pembangunan SMK Panggul	50,00	APBN
20	Kab. Trenggalek	Pembangunan RSUD Watulimo	100,00	KPBU
21	Kab. Madiun	Pembangunan Tanggul dan Normalisasi Sungai Jeroan	175,00	APBN
22	Kab. Madiun	Pembangunan Tanggul dan Normalisasi Sungai Madiun	280,10	APBN
23	Kab. Madiun	RKI Madiun	2.500,00	SWASTA
24	Kota Madiun	Pembangunan Jalan Lingkar (ring road) Timur Kota Madiun	600,00	APBN
25	Kab. Blitar	Pelurusan (perbaikan geometri) Jalan Nasional Brongkos Karangkates (Blitar - Malang)	257,00	APBN
26	Kab. Blitar	Pembangunan TPA Regional Blitar	600,00	KPBU
27	Kab. Blitar	Penataan Kawasan Geosite Pantai Klayar, Pantai Srau, Pantai Pancer Dorr	11,50	APBN
28	Kota Blitar	Pengembangan wisata komplek Makam Bung Karno, Perjuangan PETA dan Kampung Wisata Kreatif	66,70	APBN
29	Kab. Ngawi	Pembangunan exit Tol Walikukun	200,00	KPBU

No	Kabupaten/Kota	Program/Proyek	Estimasi Nilai Investasi (Rp Miliar)	Sumber Dana
30	Kab. Magetan	Pembukaan interchange Tol ruas Ngawi - Madiun di Kecamatan Kartoharjo	50,00	KPBU
31	Kab. Magetan	Revitalisasi Kawasan Pariwisata Telaga Sarangan	100,00	APBN, APBD dan KPBU
32	Kab. Magetan	Pembangunan Kawasan Aneka Industri Kulit dan Pengolahan Limbahnya	3.000,00	APBN, APBD dan KPBU
33	Kab. Pacitan	Pembangunan Jalan Akses dari JLS menuju Pelabuhan Gelon	80,00	APBN
34	Kab. Pacitan	Pembangunan Dermaga dan Fasilitas Pelabuhan Gelon/Pacitan	50,00	APBN
35	Kab. Pacitan	Pembangunan Aksesibilitas antar Kawasan di Geopark Gunungsewu dan KSPN	195,39	APBN
36	Kab. Pacitan	Pembangunan Parapet dan Rehabilitasi Pengaman Tebing Sungai Asemgandok	14,21	APBN
37	Kab. Pacitan	Pengembangan Geopark Gunung Sewu	8,60	APBN
38	Se-Kawasan Prioritas Selingkar Wilis dan Lintas Selatan	Program Dewi Cemara	200,00	APBN, APBD dan KPBU
39	Se-Kawasan Prioritas Selingkar Wilis dan Lintas Selatan	Program Agropolitan Selingkar Wilis	392,50	APBN, APBD dan KPBU
40	Se-Kawasan Prioritas Selingkar Wilis dan Lintas Selatan	Program Pengembangan Minapolitan Selingkar Wilis	130,00	APBN, APBD dan KPBU

No	Kabupaten/Kota	Program/Proyek	Estimasi Nilai Investasi (Rp Miliar)	Sumber Dana
41	Kab. Nganjuk	Pembangunan Rencana Kawasan Industri Nganjuk (KING)	4.000,00	SWASTA
42	Kab. Trenggalek	Pengembangan Pelabuhan Prigi	45,80	APBN, APBD
43	Kab. Ngawi	Pembangunan Rencana Kawasan Industri Ngawi	3.000,00	SWASTA
44	Kab. Ngawi	Pembangunan & Revitalisasi Pasar Besar, dan Pasar Beran	102,06	APBN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Perekonomian,

SEKRETARIAT KABINET REPUBLIK INDONESIA

Satya Bhakti Parikesit